LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat
Telp. (0740) 7370006 Website www.tanjabtimkab.go.id

TANJUNG JABUNG TIMUR
SEPUCUK NIPAH SERUMPUN NIBUNG

H. Romi Hariyanto, SE

Bupati Tanjung Jabung Timur

Periode 2016 - 2021

H. Robby Nahliyansyah

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Periode 2016 - 2021

Sapril, S.IP

Sekretaris Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Secara eksternal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Masa Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, 5 Maret 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iv

I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. KELEMBAGAAN 16

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 27

D. ISSU-ISSU STARTEGIS..... 32

E. MAKSUD DAN TUJUAN..... 35

F. LANDASAN PENYUSUNAN..... 36

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2020..... 38

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41

A. VISI DAN MISI 44

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 46

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 51

D. PERJANJIAN KINERJA..... 68

III. AKUNTABILITAS KINERJA 69

A. INDIKATOR KINERJA 70

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA 70

C. KINERJA KEUANGAN 82

IV. PENUTUP 88

A. SIMPULAN..... 88

B. SARAN..... 89

V. LAMPIRAN

LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN

LAMPIRAN III. RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN

LAMPIRAN IV. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN KABUPATEN

LAMPIRAN V. POHON KINERJA KABUPATEN

LAMPIRAN VI. RENCANA AKSI KABUPATEN

LAMPIRAN VII. PETA PROSES BISNIS KABUPATEN

LAMPIRAN VIII. PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 merupakan LKjIP memasuki tahun keempat dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. LKjIP Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 melaporkan capaian kinerja *(Performance Results)* selama tahun 2020 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja *(Performance Plan)* Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021 dan APBD Tahun 2020.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 menetapkan 488 program dan 1.526 kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja dari 5 misi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, Tahun 2020 masuk kedalam kategori sangat berhasil yakni 80,75% lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MISI KABUPATEN	RATA-RATA CAPAIAN TERHADAP TARGET (%) 2020
1	MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	65,05
2	MISI 2 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)	70,65
3	MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK	97,72
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF	89,36
5	MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS	80,97
RATA-RATA		80,75

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian indikator ekonomi adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung

Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2020 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang

ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan

3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil

potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayagunakan.

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya "*good governance*" pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya "*good governance*". Untuk mewujudkan hal tersebut,

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Inpput), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuiakan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km^2 dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai

138.242 Ha,sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km2 dan lautan/perairan seluas 3.560 Km2. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km2 dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km2

yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km^2	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478.17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	**20**	**73**	**5.445,00**	**100,00**

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2014

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus

dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya ditandai dengaan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 bertambah sebanyak 1.586 jiwa dari 212.084 jiwa pada tahun 2014 menjadi 213.670 jiwa pada tahun 2015 atau dengan pertumbuhan 0,74 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2015 sebesar 39,24 jiwa/km^2 dan sex ratio 105,55.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	2014					2015				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Mendahara	13.252	12.700	25.952	104	35,12	13.306	12.747	26.053	104	28,59
2	Mendahara Ulu	8.747	7.708	16.455	113	42,40	9.001	7.932	16.933	113	44,41
3	Geragai	11.840	10.371	22.211	114	50,83	11.965	10.483	22.448	114	78,67
4	Dendang	7.627	7.344	14.971	104	55,10	7.641	7.354	14.995	104	31,32
5	Muara Sabak Barat	8.535	8.064	16.599	106	60,25	8.682	8.204	16.886	106	67,07
6	Muara Sabak Timur	15.672	15.476	31.148	101	53,39	15.710	15.507	31.217	101	76,09
7	Kuala Jambi	7.268	7.063	14.331	103	127,95	7.314	7.103	14.417	103	119,62
8	Rantau Rasau	11.741	11.182	22.923	105	73,71	11.857	11.287	23.144	105	64,99
9	Berbak	5.051	4.810	9.861	106	119,00	5.061	4.817	9.878	105	50,80
10	Nipah Panjang	12.881	12.585	25.466	102	43,26	12.906	12.603	25.509	102	108,69
11	Sadu	6.262	5.905	12.167	106	6,88	6.275	5.915	12.190	106	6,69
Jumlah		**108.924**	**103.208**	**212.084**	**105**	**39,23**	**109.718**	**103.952**	**213.670**	**106**	**39,24**

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 mencapai 4,21 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 2,65 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2020 dicapai oleh kategori Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 persen.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,81 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,13 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,18 persen, kategori Jasa Keuangan sebesar 3,42 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,68 persen, kategori industri Pengolahan sebesar 1,25 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,40 persen, kategori Jasa Konstruksi sebesar (0,09) persen, kategori Real Estate sebesar (0,18) persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar (0,34) persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar (0,54) persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar (1,25) persen, kategori Jasa Lainnya sebesar (1,52)

persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar (3,01), kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (7,24) persen, serta kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar (7,47).

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,58	6,41	4,11	2,95	2,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0,31)	0,87	1,53	4,38	(7,47)
3.	Industri Pengolahan	1,08	1,93	4,35	0,28	1,25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,07	2,05	4,43	3,42	5,18
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,11	2,64	7,24	5,46	6,81
6.	Konstruksi	6,54	13,32	5,79	7,54	(0,09)
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	7,20	6,01	6,19	(3,01)
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,74	6,17	4,66	5,20	(1,25)
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,27	10,54	8,11	2,44	(7,24)
10.	Informasi dan Komunikasi	9,91	7,69	9,46	7,69	7,73
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	5,40	1,24	3,85	3,42
12.	Real Estate	8,23	8,80	8,48	9,13	(0,18)
13.	Jasa Perusahaan	7,67	5,32	4,51	3,33	(0,54)
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	4,55	5,17	4,55	(0,34)
15.	Jasa Pendidikan	8,59	6,03	5,46	6,03	0,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	6,07	4,88	6,07	6,13
17.	Jasa lainnya	7,83	5,39	6,67	4,11	(1,52)
	Laju Pertumbuhan	**2,65**	**3,07**	**2,94**	**4,21**	**(3,87)**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan,

dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi .

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2020 tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2020 dengan migas yaitu sebesar Rp 19.499.943,08 juta dan tanpa migas sebesar Rp 11.279.934,79 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 17.273.090,29 juta dan tanpa migas sebesar Rp 6.711.429,71 juta.

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

5. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun saat ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2020 struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,30 persen, urutan kedua tahun 2020 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebsear 24,27 persen, urutan ketiga yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,20 persen, urutan keempat yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 9,00 persen, urutan kelima yaitu sektor konstruksi sebesar 5,88 persen, urutan keenam yaitu sektor Jasa Pendidikan sebesar 4,37%, urutan ketujuh yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,97 persen, urutan kedelapan yaitu sektor informasi dan komunikasi sebesar 2,23 persen, urutan kesembilan yaitu sektor jasa perusahaan sebesar 1,71 persen, urutan kesepuluh yaitu sektor transportasi dan perdagangan sebesar 1,49 persen, urutan kesebelas yaitu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,06 persen, urutan kedua belas yaitu sektor real estat sebesar 0,80 persen, urutan ketiga belas yaitu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,78 persen, urutan keempat belas yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,45 persen, urutan kelima belas yaitu Jasa lainnya sebesar 0,38 persen, urutan keenam belas yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang sebsesar 0,08 persen, dan urutan terakhir yaitu Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02 persen. Laju pertumbuhan ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadao nilai PDRB

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami kenaikan. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 sebesar Rp. 135.359.217,48 pertahun atau sebesar Rp. 11.279.934,79,- perbulan terus mengalami penaikan dari tahun 2019. Sementara PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2020 Rp. 80.537.156,52 pertahun atau Rp. 6.711.429,71 perbulan mengalami kenaikan dari tahun 2019. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan

demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

6. Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan. Tingkat inflasi Kota Jambi dari tahun 2017-2019 adalah berfluktuasi dengan rata-rata 2,32 persen per tahun. Pada tahun 2017, tingkat inflasi Kota Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 2,68 persen, tetapi pada tahun 2018 tingkat inflasi naik kembali menjadi 3,02 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, tingkat inflasi Kota Jambi menurun signifikan menjadi sebesar 1,27 persen. Inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga.

8. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020 antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi

pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang Pluktuatif cenderung stagnan. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup stabil. Indeks Gini pada tahun 2019 sebesar 0.29 sama pada tahun 2017. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak dari posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna

B. KELEMBAGAAN

1. Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan

pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semulanya diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah "*Miskin Struktur Kaya Fungsi*", maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18

Tahun 2014 menerapkan prinsip "*Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi*".

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

MATERI	PP No 18 Tahun 2016	PP No 41 Tahun 2007
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat; ▪ Dinas; ▪ Badan; ▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota) ▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan : ❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi)	❖ Pengelompokan perangkat daerah: ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat ▪ Lemtekda. ▪ Kecamatan (khsusus kab/kota) ❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor.

	❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH ❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memebreikan layanan langsung kepada masyarakat. ❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung.	
MATERI	**PP No 18 Tahun 2014**	**PP No 41 Tahun 2007**
TIPOLOGI	❖ Jumlah perangkat Derah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang. ❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelmpkkan menjadi : ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A. ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah tipe B ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang.	❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan. ❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah.
PEMETAAN URUSAN	❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung. ❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan	❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung. ❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.
JUMLAH PERANGKAT DAERAH	❖ Jumlah perangkat Derah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah	❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan.

	Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah. ❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4. ❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan. ❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah.	❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7.

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagiandari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan

unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujud sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi "siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya". Implikasinya, dalam organisasi

pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustaakan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;

12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:

a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;
c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah adalah:

a. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa.
b. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.

c. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
d. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.
e. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun.
f. masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.

2. Permasalahan Perekonomian Daerah;

a. Jumlah persentase Penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.
b. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena Daya dukung infrastruktur terbatas.
c. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
d. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena nilai tukar petuni (NTP) masih rendah.
e. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain.
f. Peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah.

g. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.
h. Masih adanya Infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi.
i. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
j. Produktivitas hasil pertanian masih rendah akibat mutu input yang digunakan petani rendah.
k. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
l. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung potensi pariwisata masih minim.

3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

a. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik.
b. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM Tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
c. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik.
d. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah.
e. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya.

f. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskemas pembantu belum berkualitas.

g. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas.

h. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.

i. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan.

j. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah.

k. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

a. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas.

b. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.

c. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.

d. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.

e. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

a. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada Perangkat Daerah masih rendah.
b. Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum optimal.
c. Belum optimalnya peran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan.
d. Belum optimalnya peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terutama dalam mentaati peraturan daerah.
f. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.
g. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena potensi belum optimal digunakan.
h. Pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
i. Masih terbatasnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam Perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

j. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan capaian opini laporan keuangan daerah belum optimal.

D. ISSU-ISSU STRATEGIS

1. Issu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

a) Kondisi Infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas.

b) Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu diseseuaikan dengan daya dukung lingkungan.

2. Issu Strategis Perekonomian Daerah

a) Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan.

b) Keberadaan UMKM dan Koperasi belum dapat berperan dalam peningkatkan ekonomi masyarakat.

c) Potensi Pariwisata Daerah belum tergali karena terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

3. Issu Strategis terkait dengan peningkatan SDM

a) Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .

c) peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam aspek bidang kehidupan.

d) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparatur daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing.

4. Issu-issu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik

a) Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.

b) Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik Masih rendah sehingga perlu peningkatan pendidikan politik masyarakat.

c) Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

5. Isu-issu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
2. Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

6. Isu-issu strategis Global, Nasional dan Regional

a) Letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis sangat strategis, karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

b) Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dengan adanya Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut, Tahura, dapat dipastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sumber paru-paru dunia

c) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan gas dan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d) Masih terdapat konflik sengketa lahan antara Penyelesaian Batas Kabupaten dan batas Desa dengan Taman Nasional Berbak merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2016.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1).

k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2020

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas konsidi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isue strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2020 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021 dan Rencana Kinerja 2020. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2020.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2016. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Instansi Pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung Visi, Misi, Program, dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan

strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)"**. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);

3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

3. Delapan Pilar Utama

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat–pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;

4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas;

2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan;
4. Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat;
5. Meningkatkan daya saing Produksi perikanan;
6. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah;
7. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara;
8. Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing;
9. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas;
10. Meningkatkan sarana pendidikan dasar;
11. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
13. Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi;

15. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya;
16. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat;
17. Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat;
18. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
19. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa;
20. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis;
21. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;

2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
5. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
6. Meningkatnya produksi tanaman padi;
7. Meningkatnya produksi tanaman palawija;
8. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan;
9. Meningkatnya Populasi Ternak;
10. Meningkatnya produksi daging;
11. Meningkatnya pendapatan petani;
12. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat;
13. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
14. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;
15. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM;
16. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
17. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi;

18. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
19. Meningkatnya sarana pendidikan dasar;
20. meningkatnya status kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
22. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan;
24. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
25. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat;
26. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat;
27. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum;
28. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran;
29. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat;
30. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas;

31. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik;
32. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa;
33. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
34. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016–2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

a) Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas;
b) Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat;

c) Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;

d) Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;

e) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;

f) peningkatan produksi tanaman padi;

g) peningkatan produksi tanaman palawija;

h) peningkatan produksi tanaman buah-buahan;

i) Peningkatan Populasi Ternak;

j) Peningkatan produksi daging;

k) Peningkatan Kesejahteraan Petani;

l) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

m) Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum,Kolam dan air laut);

n) Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;

o) Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh SKIM pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas;

p) Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing;

q) Peningkataan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa;

r) Pengembangan kawasan situs cagar budaya;

s) Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;

t) Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata;

u) Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;

v) Peningkatan mutu pendidikan dasar;

w) Peningkatan sarana pendidikan dasar;

x) Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat;

y) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

z) Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat;

aa) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

bb) Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat;

cc) Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;

dd) Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah;

ee) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;

ff) Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK;

gg) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK;

hh) Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan;

ii) Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya;

jj) Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;

kk) Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran;

ll) Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan;

mm) Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda;

nn) Peningkatan kemampuan kafilah;

oo) Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas

pp) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance);

qq) Peningkatan manejemen pemerintahan desa;

rr) Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;

ss) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan;

tt) Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016 – 2021 adalah :

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.
b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.
c) Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar

daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 – 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1) Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru;
2) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
3) Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung;
4) Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik;
5) Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik;
6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang;

7) Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh;
8) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
9) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi;
10) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija;
11) Mengembangkan komoditas buah-buahan;
12) Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak;
13) Meningkatkan produksi daging;
14) Meningkatkan Pendapatan Petani;
15) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan;
16) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut;
17) Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan;
18) Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat;
19) Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM;
20) Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin;
21) Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah;
22) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar;
23) Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya;

24) Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan;
25) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata;
26) Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi;
27) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
28) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
29) Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup;
30) Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas);
31) Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas;
32) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama;
33) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan;
34) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
35) Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
36) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB;
37) Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak;

38) Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan;
39) Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja;
40) Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi;
41) Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni;
42) Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
43) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
44) Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
45) Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah;
46) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah;
47) Meningkatkan TC MTQ;
48) Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia;
49) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
50) Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

51) Melaksanakan pemilihan kepala desa;

52) Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu;

53) Meningkatkan capaian penilaian SAKIP;

54) Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah;

55) Peningkatan tindaklajut temuan;

56) Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;

57) Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016–2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut ini:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)			
MISI I "Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan"			
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas	Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru
			Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat	Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik
			Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik
	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang
	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air
MISI II "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)"			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman padi	peningkatan produksi tanaman padi	Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi
	Meningkatnya produksi tanaman palawija	peningkatan produksi tanaman palawija	Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija
	Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	peningkatan produksi tanaman buah-buahan	Mengembangkan komoditas buah-buahan
	Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan Populasi Ternak	Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak
	Meningkatnya produksi daging	Peningkatan produksi daging	Meningkatkan produksi daging
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Pendapatan Petani
Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum,Kolam dan air laut)	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut
	Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan
			Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat
Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh Skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas	Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM
			Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin
		Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah
		Peningkataan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Pengembangan kawasan situs cagar budaya	Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya
		Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan
		Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata
Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi	Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi
MISI III "Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK"			
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu pendidikan dasar	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar	Peningkatan sarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat	Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat	Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)
		Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat	Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan
		Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
		Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB
Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK	Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK	Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja
MISI IV "Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif"			
Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan	Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi
	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya	Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni
Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
			Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah
		Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda	Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah
		Peningkatan kemampuan kafilah	Meningkatkan TC MTQ
			Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia
Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas	Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas

MISI V "Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis"			
Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance)	Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Peningkatan manejemen pemerintahan desa	Melaksanakan pemilihan kepala desa
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan	Meningkatkan capaian penilaian SAKIP
			Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
			Peningkatan tindaklajut temuan
			Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa
		Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020. Perjanjian Kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 837.793.339.939,94,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 424.337.008,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 413.456.331.643,17,-

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dengan Kondisi Mantap	Persentase Terhubungannya Desa / Kelurahan ke Ibu Kota Dengan Kondisi Mantap	73,12%
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi	38,00%
3.	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota	100%

4.	Mengurangi Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	5,11%
5.	Meningkatnya Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Cakupan rumah Tangga Dengan Air Bersih	60,00%
		Persentase Sanitasi Layak	67,00%
6.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,5
7.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,3
		Persentase Penurunan Kecelakaan Air	0,02
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis	NTUP	101,3
9.	Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	20,13%
10.	Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	96%
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114
12.	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,70
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13.	Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62
		Usia Harapan Hidup	65,65
		Harapan Lama Sekolah	11,38
14.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81
15.	Menekan Laju Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
16.	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%
17.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	97,4

MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
18.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	97,4
19.	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Dalam Juta)	330.750
20.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis e-Government	Persentase Peningkatan Jangkauan TIK	95,00%
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi TIK	61%
		Persentase Pelayanan Publik Yang Berbasi TIK	60%
21.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C
		Predikat SAKIP	B
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, indikator kinerja masih bersifat parsial dan komulatif sehingga pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif.

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85 %	Sangat berhasil
2	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2020 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

	MISI 1 : *MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*

Untuk mencapai Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** pada tahun 2020 telah dilaksanakan 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dengan Kondisi Mantap.
2) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan.
3) Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW.
4) Mengurangi Permukiman Kumuh.
5) Meningkatnya Layanan Air Bersih dan Sanitasi.
6) Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan.
7) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2020
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dengan Kondisi Mantap	Persentase Terhubungannya Desa / Kelurahan ke Ibu Kota Dengan Kondisi Mantap	73,12	72,04	98,5

2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi	38,00	38,40	101,1
3.	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota	100	100	100
4.	Mengurangi Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	5,11	0,02	0,39
5.	Meningkatnya Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Cakupan rumah Tangga Dengan Air Bersih	60,00	67,99	113,3
		Persentase Sanitasi Layak	67,00	27,32	40,8
6.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50	70,34	107,4
7.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,3	5,13	5,8
		Persentase Penurunan Kecelakaan Air	0,02	0,11	18,2

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 ***"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 7 sasaran yang didukung dengan 9 Indikator Kinerja Utama.

Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2020 sebesar 65,05% atau masuk dalam kategori cukup berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa stakeholder, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan, serta Dinas Perhubungan yang

mana kesemuanya itu saling berkaitan dalam mencapai target kepala daerah yang telah ditetap kedalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah.

Berdasarkan tabel standar dan kategori pengukuran kinerja untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa tahun 2020 persentase capaian kinerja untuk indicator diatas sebesar 98,52% dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 73,12% telah terealisasi sebesar 72,04% atau dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 93 desa/kelurahan terdapat 67 desa/kelurahan yang sudah terhubung ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap. Pencapaian indicator ini belum maksimal dikarenakan terkendala terjadinya pengurangan alokasi anggaran khuhusnya kegiatan fisik pada program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami refocusing anggaran hamper 50% dari alokasi APBD murni tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan turunnya volume penanganan peningkatan jalan di tahun 2020, demikian juga untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Perhubungan mengalami refocusing anggaran terkait pandemi Covid-19 namun tetap menunjukan hasil yang berdampak baik dalam realiasi capaian target kinerjanya. Berdasarakan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih konsisten dalam upaya pencapaian misi pertama ini.

	MISI 2 : ***MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)***

Untuk mencapai Misi 2 ***"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agrobisnis, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Investasi Industri, Kepariwisataan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Maritim)"*** pada tahun 2020 telah dilaksanakan 5 (lima) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis.
2) Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan.
3) Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah.
4) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
5) Pengembangan Destinasi Wisata.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2020
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis	NTUP	101,3	119,48	117,9
2.	Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	20,13	15,29	76
3.	Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	96%	82,69%	86,1%

4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114	107,37	94,2
5.	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhn PDRB Sektor Pariwisata	0,70	0,45	64,3

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2020 sebesar 70,65%. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan berhasil.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pertanian ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Minat petani akan budidaya tanaman tersebut semakin meningkat karena harga komoditi tanaman jagung dan kedelai dipasaran tinggi.
2. Perubahan varietas benih jagung yang disesuaikan dengan spesifik lokasi sehingga hasil ubinan akhir dapat lebih tinggi dibanding varietas yang sebelumnya ditanam yaitu : Varietas SHS.4 menjadi Varietas Bisi.2
3. Dukungan program pengembangan jagung hybrida dan kedelai meningkat baik kualitas maupun kuantitas, baik dari dana APBD maupun APBN.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan Jika dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Capaian		
				Bertambah	Berkurang	Capaian (%)
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	• Produksi Padi (Ton)	90.052	51.703	54.881	-	106
	• Produksi Jagung (Ton)	13.950	10.280	13.043	-	126
	• Produksi Kedelai (Ton)	1.356	870	573	-	67
	• Produksi benih padi (Ton)	312	5	5	-	100
Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	• Produktifitas Padi (Ton/Ha)	4,62	04,23	4,49	-	106
	• Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	6,08	6,23	7,05	-	113
	• Produktifitas Kedelai (Ton/Ha)	1,9	1,34	1,34	-	100

MISI 3 : ***MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK***

Untuk mencapai Misi 3 ***"Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan Penerapan Iptek"*** pada tahun 2020 telah dilaksanakan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1) Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat.
2) Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan.
3) Menekan Laju Penduduk.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2020
1.	Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62	64,43	101,3
		Usia Harapan Hidup	65,65	66,23	100,88

		Harapan Lama Sekolah	11,38	12,16	106,85
2.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81	68,81	109,55%
3.	Menekan Laju Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77	1,1	70

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 3 sasaran dan 5 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2020 hampir sempurna sebesar 97,72%. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100 % meskipun pada indikator laju pertumbuhan penduduk realiasi dari target tahun 2020 hanya sebesar 70%, namun secara rata-rata tetap masuk dalam katergori berhasil.

Ukuran keberhasilan khususnya pada indikator laju pertumbuhan penduduk ini dipengqruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Keterbatasan kegiatan dikarenakan pandemi Covid-19 sangat dirasakan terutama dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pendataan Keluarga (KKBPK).
2. Kegiatan pelayanan kontrasepsi tetap dilaksanakan dengan jumlah akseptor yang terbatas, serta tetap mematuhi protokol kesehatan, agar tenaga kesehatan dan penerima pelayanan tetap aman.

3. Timbulnya rasa khawatir di masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB di setiap Fasilitas Kesehatan, akibat ketakutan akan tertularnya Virus Covid-19.

	MISI 4 : *MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF*

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

1) Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya.
2) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2020
1.	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%	100	100
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	97,4	76,67	78,72%

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 2 sasaran dengan 2 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih angka nyaris sempurna karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2020 meraih angka sebesar 89,36%.

Pencapaian ini didapat karena adanya komitmen dari kepala daeah dan para kepala perangkat daerah khususnya yang telah mampu untuk meraih target yang telah ditetapkan walaupun ada indikator Indeks Kebebasan Sipil masih dibawah Indeks Gotong Royong namun hal ini cukup memberikan hasil yang sangat positif terlebih adanya recofusing anggaran terkait pandemi Covid-19.

	MISI 5 : *MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS*

Untuk mencapai Misi 5 ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis"*** pada tahun 2020 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

1) Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa.
2) Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan.
3) Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis e-Government.
4) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2020
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	97,4	67,12	68,07
2.	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Dalam Juta)	330.750	157.638	47,77%
3.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis e-Government	Persentase Peningkatan Jangkauan TIK	95,00%	75,27%	79,23%
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi TIK	61%	76%	124,59%
		Persentase Pelayanan Publik Yang Berbasi TIK	60%	60%	100%
4.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C	Nn	Nn
		Predikat SAKIP	B	CC	90%
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
		Predikat EPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	100%

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal capaian kinerja tahun 2020 pada Misi 5 rata-rata capaian kinerja misi kelima tahun 2020 sebesar 80,97% dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 124,59 % pada Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD.

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pemerintahan ini dikarenakan adanya goodwill dari kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelayan bagi masyarkatnya selaras dengan visi – misi Bupati "MERAKYAT"

C. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 1.060.401.195.432,59,- dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.052.612.778.826,01,- atau terealisasi sebesar 99,27%, dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	55.676.871.346,13,-	49.654.020.387,85,-	89,18
2	Pendapatan Dana Perimbangan	835.509.454.753,40,-	833.566.346.360,00-	99,77
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	169.214.869.333,06,-	169.392.412.078,16-	100,10
	Total	**1.060.401.195.432,59,-**	**1.052.612.778.826,01,-**	**99,27**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang

sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	17.173.312.712,50,-	15.859.280.136,99,-	92,35
2	Retribusi Daerah	2.239.621.000,-	1.752.106.753,00,-	78,23
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	6.794.487.721,66,-	6.731.659.232,59,-	99,08
4	Lain – Lain PAD yang sah	29.469.449.911,97,-	25.310.974.265,27,-	85,89
J u m l a h		**55.676.871.346,13,-**	**49.654.020.387,85,-**	**89,18**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2020 penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp. 55.676.871.346,13,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.654.020.387,85,- atau 89,18%. Realisasi ini lebih kecil dari Tahun 2019 sebesar Rp. 53.919.302.033,20,- dikarenakan adanya salah satu faktor yaitu pandemi kesehatan (Covid-19).

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	138.442.112.753.,40,-	143.344.109.224,00,-	103,54
2	Dana Alokasi Umum	523.900.364.000,-	521.920.298.000,-	99,62

3	Dana Alokasi Khusus	173.166.978.000,-	168.301.939;136,00,-	97,19
J u m l a h		**835.509.454.753,40,-**	**833.566.346.360,00,-**	**99,77**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2020 mencapai target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 835.509.454.753,40,-. Pendapatan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi Rp. 833.566.346.360,00,- atau 99,77%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah	37.460.100.000,00,-	36.961.230.000,00,-	98,67
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	44.234.993.333,06,-	44.911.406.078,16,-	101,53
3	Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus (DPDF)	81.939.776.000,-	81.939.776.000,-	100
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5.580.000.000,-	5.580.000.000,-	100
J u m l a h		**169.214.869.333,06**	**169.392.412.078,16**	**100,10**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	629.624.984.467,02,-	612.474.339.203,98,-	97,28
2	Belanja Langsung	510.901.481.158,17,-	483.427.037.948,19,-	94,62
	Total	**1.140.526.465.625,19,-**	**1.095.901.377.152,17,-**	**96,09**

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada tahun anggaran 2020 belanja tidak langsung hanya sebesar 97,28% dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2016-2021 bahwa belanja tidak langsung di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Total realisasi belanja sebesar Rp. 1.095.901.377.152,17,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.140.526.465.625,19,- atau terealisasi sebesar 96,09%, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 612.474.339.203,98,- atau 97,28% dan belanja langsung sebesar Rp. 483.427.037.948,19 atau 94,62%.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**82.125.270.192,60,-**	**83.025.270.192,60,-**
	- SiLPA	82.125.270.192,60,-	82.125.270.192,60,-
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00,-	0,00,-
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00,-	0,00,-
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00,-	0,00,-
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00,-	0,00,,-
	- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00,-	900.000.000,00,-
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.000.000.000,00,-**	**2.000.000.000,00,-**
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00,-	0,00,-
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.000.000.000,00,-	2.000.000.000,00,-
	- Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00,-	0,00,-
	- Pembayaran Pokok Utang	0,00,-	0,00,-
	- Pemberian Pinjaman Daerah	0,00,-	0,00,-
3	**Pembiayaan Netto**	**80.125.270.192,60,-**	**81.025.270.192,60,-**

** Data Sementara(unaudit)*
Sumber : BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2020, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 82.125.270.192,60,- terealisasi sebesar Rp. 82.125.270.192,60,- atau 100 %, sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 100% sama dengan Tahun 2019. Pembiayaan netto tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 80.125.270.192,60,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.025.270.192,60,- atau sebesar 101,12%.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2016–2021, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2020 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders,* antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

LAMPIRAN I

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 80);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berisi

Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 FEBRUARI 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR..8..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKTOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				Kondisi Awal 2018	2019		
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)							
MISI 1 : Meningkatkan pembangunan insfrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan							
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	(jumlah desa/kel yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi mantap/jumlah desa/kel) x 100%	-	61,29%	Primer	DINAS PUPR
	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	(Luas Sawah yang terairi oleh jaringan irigasi yang dibangun/dipelihara dibagi luas Sawah keseluruhan) x 100%	-	36,00%	Primer	DINAS PUPR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				Kondisi Awal 2018	2019		
	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Cukup Jelas	60,9	63,1	Primer	DINAS LH
MISI 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan							
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis	NTUP	Indeks yang diterima petani (It)/Indeks yang	99,8	100	Primer	DINAS TPH, DINAS BUNNAK,
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Rata-rata Jumlah ketersediaan Pangan setahun/Jumlah penduduk x 100%	78,00	80,00	Primer	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Indeks yang diterima nelayan (It)/Indeks yang dibayar nelayan (Ib) x 100%	-	113,37	Primer	DINAS PERIKANAN
MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK							
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Cukup Jelas	62,52	63,12	Primer	DINAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Cukup Jelas	0,78	0,77	Primer	DINAS PPKB
MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif							
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	Cukup Jelas	90,55	93.75	Primer	BADAN KESBANGPOL
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokrasi							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Sumber Data	SKPD PELAKSANA
				Kondisi Awal 2018	2019		
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup Jelas	B	A	Primer	DINAS KESEHATAN DISDUKCAPIL, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DPMPTSP, SETDA
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Predikat SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	B	B	Primer	SETDA, INSPEKTORAT
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Primer	BAKEUDA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
TAHUN 2020

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**

Jabatan : Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Sabak, November 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	73,12%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	38,00%
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,11%
5	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	60,00%
		Persentase Sanitasi Layak	67,00%
6	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,5
7	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,3
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,02
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	101,3
9	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	20,13%
10	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	96%
11	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114
12	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,70
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62
		Usia Harapan Hidup	65,65
		Harapan Lama Sekolah	11,38
14	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81
15	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten : **Tanjung Jabung Timur**
Tahun : **2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	73,12%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	38,00%
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4	Mengurangi permukiman kumuh	Persentase Pengurangan permukiman kumuh	5,11%
5	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Cakupan rumah tangga dengan air bersih	60,00%
		Persentase Sanitasi Layak	67,00%
6	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,5
7	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Persentase penurunan kecelakaan darat	0,3
		Persentase penurunan kecelakaan air	0,02
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	NTUP	101,3
9	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	20,13%
10	Meningkatnya Investasi Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	96%
11	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114
12	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,70
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13	Meningkatnya kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62
		Usia Harapan Hidup	65,65
		Harapan Lama Sekolah	11,38
14	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81
15	Menekan laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
16	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	97,4
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
18	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan Kemandirian desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	98,59%
19	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	330.750
20	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Persentase peningkatan jangkauan TIK	95,00%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK	61%
		Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	60%
21	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C
		Predikat SAKIP	B
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi

Jumlah APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 1.261.791.501.180,84 yang terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 628.251.876.342,68 dan,
2) Belanja Langsung sebesar Rp. 633.539.624.838,16
Jumlah P-APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 837.793.339.939,94 yang terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 424.337.008
2) Belanja Langsung sebesar Rp. 413.456.331.643,17

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dengan Kondisi Mantap	Persentase Terhubungannya Desa / Kelurahan ke Ibu Kota Dengan Kondisi Mantap	73,12%
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi	38,00%
3.	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4.	Mengurangi Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	5,11%
5.	Meningkatnya Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Cakupan rumah Tangga Dengan Air Bersih	60,00%
		Persentase Sanitasi Layak	67,00%
6.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,5
7.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,3
		Persentase Penurunan Kecelakaan Air	0,02
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)			
8.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis	NTUP	101,3
9.	Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	20,13%
10.	Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	96%
11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114
12.	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,70
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK			
13.	Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62
		Usia Harapan Hidup	65,65
		Harapan Lama Sekolah	11,38
14.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81
15.	Menekan Laju Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77

MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF			
16.	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya	Indeks Gotong Royong	100%
17.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	97,4
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS			
18.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	97,4
19.	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Dalam Juta)	330.750
20.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis e-Government	Persentase Peningkatan Jangkauan TIK	95,00%
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi TIK	61%
		Persentase Pelayanan Publik Yang Berbasi TIK	60%
21.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C
		Predikat SAKIP	B
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi

Muara Sabak, 6 Januari 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2020

PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020			CAPAIAN TARGET TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET	
MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dengan Kondisi Mantap	Persentase Terhubungannya Desa / Kelurahan ke Ibu Kota Dengan Kondisi Mantap	73,12	72,04	98,5	115,8
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air Penunjang Kedaulatan Pangan	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Terairi Oleh Jaringan Irigasi	38,00	38,40	101,1	104,2
3.	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota	100	100	100	100
4.	Mengurangi Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	5,11	0,02	0,39	10,94
5.	Meningkatnya Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Cakupan rumah Tangga Dengan Air Bersih	60,00	67,99	113,3	118,52
		Persentase Sanitasi Layak	67,00	27,32	40,8	109,12
6.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50	70,34	107,4	111,77
7.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,3	5,13	5,8	3,2
		Persentase Penurunan Kecelakaan Air	0,02	0,11	18,2	5,3
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)						
8.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis	NTUP	101,3	119,48	117,9	99,53
9.	Meningkatnya Peranan Koperasi Terhadap Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pertumbuhan Koperasi	20,13	15,29	76	30,5
10.	Meningkatnya Investasi Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	96%	82,69%	86,1%	30,55

11.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	114	107,37	94,2	103,49
12.	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,70	0,45	64,3	61,67
MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK						
13.	Meningkatnya Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,62	64,43	101,3	101
		Usia Harapan Hidup	65,65	66,23	100,88	66,08
		Harapan Lama Sekolah	11,38	12,16	106,85	103
14.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,81	68,81	109,55%	141,41
15.	Menekan Laju Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,77	1,1	70	106,9
MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF						
16.	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Berbudaya	Indeks Gotong Royong	100	100	100	100
17.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kebebasan Sipil	97,40	76,67	78,72%	Nn
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS						
18.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100	A
		Persentase Pertumbuhan Bumdes	98,59	67,12	68,07	81,83
19.	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Nilai Investasi (Dalam Juta)	330.750	157.638	47,77%	213,12
20.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Transparan Berbasis e-Government	Persentase Peningkatan Jangkauan TIK	95,00%	75,27%	79,23%	86,05
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi TIK	61%	76%	124,59%	135,56
		Persentase Pelayanan Publik Yang Berbasi TIK	60%	60%	100%	Nn
21.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C	Nn	Nn	Nn
		Predikat SAKIP	B	CC	90%	CC
		Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	WTP
		Predikat EPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	100%	Sangat TInggi

Muara Sabak, 5 Maret 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN V

POHON KINERJA KABUPATEN
TAHUN 2020

VISI
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)

Misi I.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Tujuan 1
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah

Indikator Tujuan
Persentase peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar dengan kondisi awal 65% dan target capaian akhir 72%)

- **Sasaran 1**: Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap
  - Indikator: Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap
- **Sasaran 2**: Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan
  - Indikator: Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi
- **Sasaran 3**: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota
  - Indikator: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota
- **Sasaran 4**: Mengurangi permukiman kumuh
  - Indikator: Persentase pengurangan permukiman kumuh
- **Sasaran 5**: Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi
  - Indikator: 1. Cakupan rumah tangga dengan air bersih , 2. Persentase sanitasi layak

Tujuan 2
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan

Indikator Tujuan
Indeks kualitas lingkungan hidup dengan kondisi awal 56,57% dan target capaian akhir 65,50%

- **Sasaran 6**: Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan
  - Indikator: Indeks kualitas lingkungan hidup

Tujuan 3
Meningkatkan keselamatan transportasi

Indikator Tujuan
Persentase Penurunan Kecelakaan lalu lintas dengan kondisi awal 0,39 dan target capaian akhir 0,25

- **Sasaran 7**: Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air
  - Indikator: 1. Persentase penurunan kecelakaan darat, 2. Persentase penurunan kecelakaan air

Misi 2.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)

Tujuan 4
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan

Indikator Tujuan
Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dengan kondisi awal 6,57% dan target capaian akhir 8%

- **Sasaran 8**: Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis
  - Indikator: Indikator NTUP
- **Sasaran 9**: Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan
  - Indikator: Persentase koperasi pertumbuhan koperasi
- **Sasaran 10**: Meningkatnya investasi industri kecil menengah
  - Indikator: Persentase Pertumbuhan IKM
- **Sasaran 11**: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan
  - Indikator: Nilai Tukar Nelayan
- **Sasaran 12**: Pengembangan destinasi wisata
  - Indikator: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Misi 3.
Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK

Tujuan 5
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK

Indikator Tujuan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kondisi awal 61,02dan target capaian akhir 64,12

- **Sasaran 13**: Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat
  - Indikator: 1. Usia Harapan Hidup, 2. Harapan Lama Sekolah
- **Sasaran 14**: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
  - Indikator: Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- **Sasaran 15**: Menekan laju pertumbuhan penduduk
  - Indikator: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Misi 4.
Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif

Tujuan 6
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib

Indikator Tujuan
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Kondisi Awal 71 dan target capaian Akhir 74

- **Sasaran 16**: Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya
  - Indikator: Indeks Gotong Royong
- **Sasaran 17**: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - Indikator: Indeks aspek kebebasan sipil

Misi 5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis

Tujuan 7
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Indikator Tujuan
Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi Awal NA target capaian Akhir B

- **Sasaran 18**: Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa
  - Indikator: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), 2. Persentase Pertumbuhan bumdes
- **Sasaran 19**: Meningkatnya nilai investasi pembangunan
  - Indikator: Nilai investasi (Juta Rupiah)
- **Sasaran 20**: Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government
  - Indikator: 1. Persentase peningkatan jangkauan TIK, 2. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK
- **Sasaran 21**: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah
  - Indikator: 1. Predikat SAKIP, 2. Opini atas Laporan Keuangan Daerah, 3. Predikat EPPD

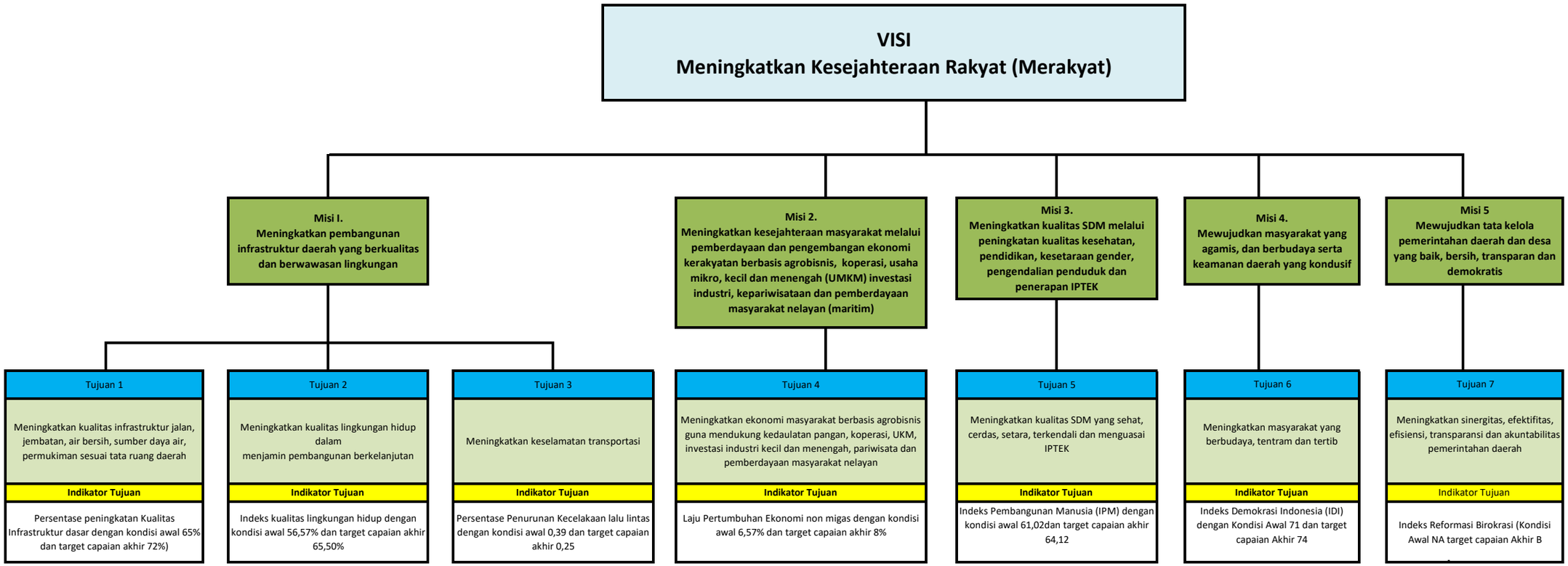
VISI
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)
Misi I.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Misi 2.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)
Misi 3.
Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK
Misi 4.
Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif
Misi 5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis
Tujuan 1
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah
Indikator Tujuan
Persentase peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar dengan kondisi awal 65% dan target capaian akhir 72%)
Tujuan 2
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan
Indikator Tujuan
Indeks kualitas lingkungan hidup dengan kondisi awal 56,57% dan target capaian akhir 65,50%
Tujuan 3
Meningkatkan keselamatan transportasi
Indikator Tujuan
Persentase Penurunan Kecelakaan lalu lintas dengan kondisi awal 0,39 dan target capaian akhir 0,25
Tujuan 4
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan
Indikator Tujuan
Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dengan kondisi awal 6,57% dan target capaian akhir 8%
Tujuan 5
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK
Indikator Tujuan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kondisi awal 61,02dan target capaian akhir 64,12
Tujuan 6
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib
Indikator Tujuan
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Kondisi Awal 71 dan target capaian Akhir 74
Tujuan 7
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah
Indikator Tujuan
Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi Awal NA target capaian Akhir B

TUJUAN 1

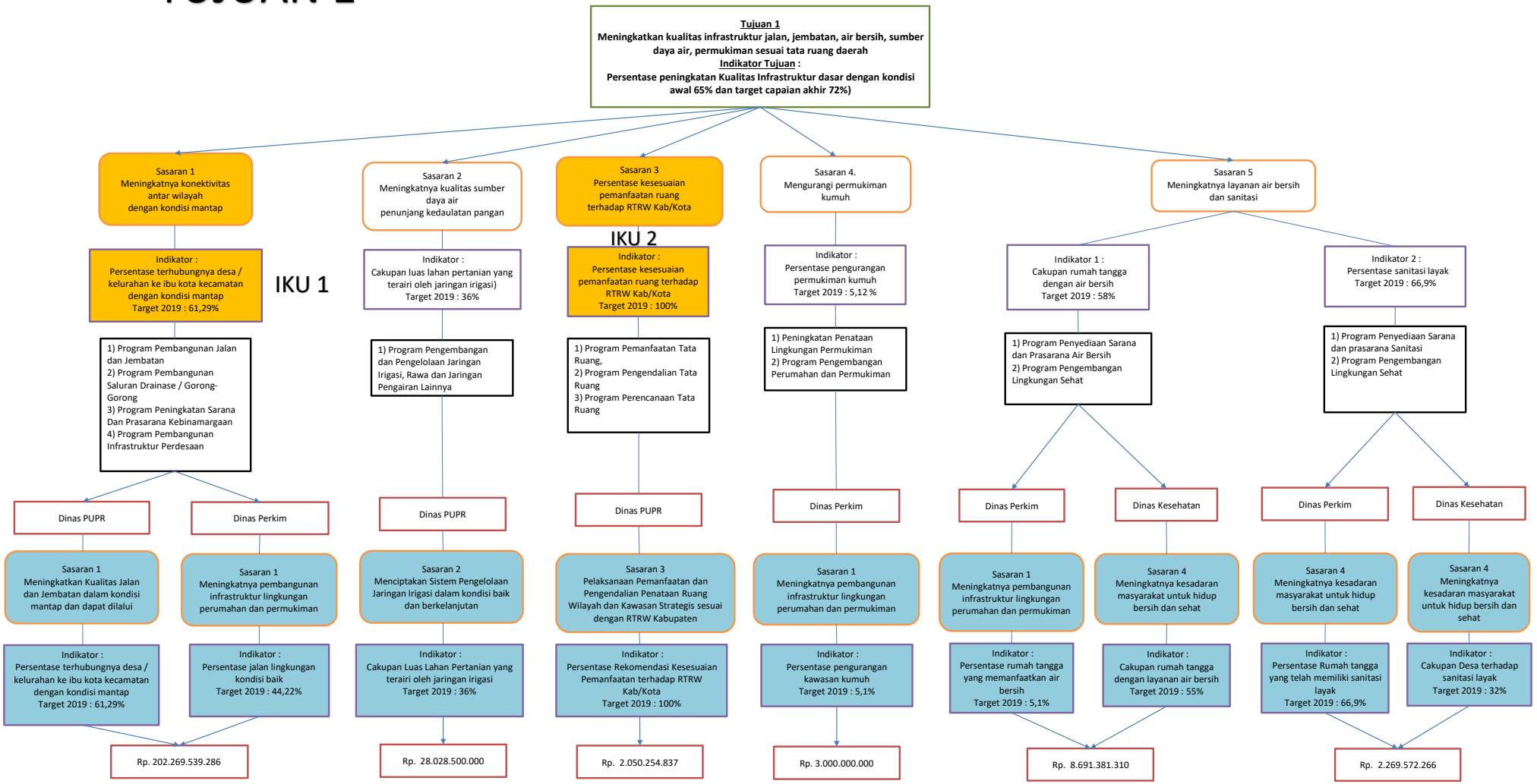
Tujuan 1
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah
Indikator Tujuan :
Persentase peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar dengan kondisi awal 65% dan target capaian akhir 72%)
Sasaran 1
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap
Indikator :
Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2019 : 61,29%
IKU 1
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
4) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Dinas PUPR
Dinas Perkim
Sasaran 1
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui
Sasaran 1
Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman
Indikator :
Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2019 : 61,29%
Indikator :
Persentase jalan lingkungan kondisi baik
Target 2019 : 44,22%
Rp. 202.269.539.286
Sasaran 2
Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan
Indikator :
Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi)
Target 2019 : 36%
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Dinas PUPR
Sasaran 2
Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan
Indikator :
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi
Target 2019 : 36%
Rp. 28.028.500.000
Sasaran 3
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota
IKU 2
Indikator :
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota
Target 2019 : 100%
1) Program Pemanfaatan Tata Ruang,
2) Program Pengendalian Tata Ruang
3) Program Perencanaan Tata Ruang
Dinas PUPR
Sasaran 3
Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten
Indikator :
Persentase Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota
Target 2019 : 100%
Rp. 2.050.254.837
Sasaran 4.
Mengurangi permukiman kumuh
Indikator :
Persentase pengurangan permukiman kumuh
Target 2019 : 5,12 %
1) Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman
2) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Dinas Perkim
Sasaran 1
Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman
Indikator :
Persentase pengurangan kawasan kumuh
Target 2019 : 5,1%
Rp. 3.000.000.000
Sasaran 5
Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi
Indikator 1 :
Cakupan rumah tangga dengan air bersih
Target 2019 : 58%
1) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Perkim
Dinas Kesehatan
Sasaran 1
Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman
Sasaran 4
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Indikator :
Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih
Target 2019 : 5,1%
Indikator :
Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih
Target 2019 : 55%
Rp. 8.691.381.310
Indikator 2 :
Persentase sanitasi layak
Target 2019 : 66,9%
1) Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi
2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Perkim
Dinas Kesehatan
Sasaran 4
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Sasaran 4
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Indikator :
Persentase Rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak
Target 2019 : 66,9%
Indikator :
Cakupan Desa terhadap sanitasi layak
Target 2019 : 32%
Rp. 2.269.572.266

TUJUAN 2

Tujuan 2.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan
Indikator Tujuan :
Indeks kualitas lingkungan hidup dengan kondisi awal 56,57% dan target capaian akhir 65,50%)

Sasaran 6
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan

IKU 3

Indikator :
Indeks kualitas lingkungan hidup
Target 2019 : 63,1

1) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH
2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dinas LH

Sasaran 1
Berkurangnya beban pencemaran air, udara dan tanah

Indikator :
Indeks kualitas lingkungan hidup
Target 2019 : 63,1

Rp. 1.400.200.000

TUJUAN 3

Tujuan 3.
Meningkatkan keselamatan transportasi
Indikator Tujuan :
Persentase Penurunan Kecelakaan lalu lintas dengan kondisi awal 0,39 dan target capaian akhir 0,25

Sasaran 7
Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air

Indikator 1 :
Persentase penurunan kecelakaan darat
Target 2019 : 0,35

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
3) Program Penerangan Lampu Kota

Dinas Perhubungan

Dinas Perkim

Sasaran 1
Meningkatnya Infrastruktur Penunjang Keselamatan Transportasi darat dan air

Sasaran 2
Meningkatnya Infrastruktur Penerangan Jalan Umum

Indikator :
Persentase Penurunan Kecelakaan Darat
Target 2019 : 0,35%

Indikator :
Persentase LPJU yang terpasang
Target 2019 : 66 %

Indikator 2 :
Persentase penurunan kecelakaan air
Target 2019 : 0,04

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Sasaran 1
Meningkatnya Infrastruktur Penunjang Keselamatan Transportasi darat dan air

Indikator :
Persentase Penurunan Kecelakaan Air
Target 2019 : 0,04

Rp. 975.268.408

TUJUAN 4

Tujuan 4
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan

Indikator Tujuan :
Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dengan kondisi awal 6,57% dan target capaian akhir 8%

IKU 4

Sasaran 8
Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis

Indikator :
NTUP
Target 2019 : 100

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak
6) Penciptaan Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan
7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

1) Dinas Perkebunan dan Peternakan

Sasaran 1
Meningkatkan Produksi Perkebunan

Indikator :
1) Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam
Target 2019 : 0,26%

Indikator :
2) Persentase Peningkatan Produksi Kopi
Target 2019 : 1,89%

Indikator :
2) Persentase Peningkatan Produksi Pinang
Target 2019 : 2,02%

Sasaran 2
Meningkatkan Populasi ternak dan Produksi Daging

Indikator :
1) Persentase Peningkatan Produksi Ternak
Target 2019 : 6,45%

Indikator :
2) Persentase Peningkatan Produksi Daging
Target 2019 : 4,35%

2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortiikultura

Sasaran 1
Meningkatnya produksi tanaman Pangan

Indikator :
peningkatan Produksi tanaman Padi (Ton)
Target 2019 : 82.555 ton

Sasaran 2
Meningkatnya produksi tanaman hortikultura

Indikator :
Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)
Target 2019 : 395 ton

Sasaran 3
Meningkatnya sarana prsarana pertanian Tanaman pangan dan hortikultura

Indikator :
Persentase peningkatan sarana prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura (%)
Target 2019 : 2,4%

Rp. 12.608.190.500

Sasaran 9
Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan

Indikator :
Persentase Pertumbuhan Koperasi
Target 2019 : 18,51%

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran 1
Meningkatnya Koperasi Mandiri

Indikator :
Persentase peningkatan koperasi mandiri
Target 2019 : 20%

Rp. 12.608.190.500

Sasaran 10
Meningkatnya investasi industri kecil menengah

Indikator :
Persentase Pertumbuhan IKM
Target 2019 : 92 %

1) Program Program Pengembangan dan Peningkatan IKM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran 1
Meningkatnya IKM Sehat

Indikator :
Persentase peningkatan IKM Produktif
Target 2019 : 92%

Rp. 1.752.522.985

IKU 5

Sasaran 11
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan

Indikator :
Nilai Tukar Nelayan Target 2019 : 113,37

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3) Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan

Sasaran 1
Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator :
Persentase peningkatan Produksi
Target 2019 : 2,04%

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pengolahan

Indikator :
Persentase Produksi Pengolahan
Target 2019 : 0,42%

Sasaran 3
Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Perikanan

Indikator :
Persentase peningkatan Lokasi Pelestarian Sumberdaya Perikanan Target 2019 : 2 lokasi

Rp. 3.980.248.000

Sasaran 12
Pengembangan destinasi wisata

Indikator :
Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
Target 2019 : 0,02 %

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3) Program Pengembangan Kemitraan
4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
8) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
9) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dinas Pariwisata kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Sasaran 1
Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi

Indikator :
1) ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata
Target 2019 : 2 Biro

Indikator :
2) Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan
Target 2019 : 72%

Indikator :
3) Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Target 2019 : 2%

Dinas PUPR

Sasaran 1
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan

Indikator :
Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2019 : 61,29%

Dinas Perkim

Sasaran 1
Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman

Indikator :
Persentase jalan lingkungan kondisi baik
Target 2019 : 44,22%

Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran 1
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan

Indikator :
Volume Sampah Terangkut per hari
Target 2019 : 24,75 Ton

Satpol PP & Damkar

Sasaran 1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum

Indikator :
Cakupan petugas linmas
Target 2019 : 50%

Rp. 1.430.148.500

TUJUAN 5

IKU 6

Tujuan 5
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK

Indikator Tujuan :
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kondisi awal 61,02dan target capaian akhir 64,12

Sasaran 13
Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat

Indikator 1 :
Usia Harapan Hidup
Target 2019 : 65,65 Tahun

1) Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
6) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dan Balita
8) Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan
9) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Anak
10) Program Pengembangan Kesehatan
11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan

Sasaran 1
Meningkatnya kesehatan masyarakat

Indikator :
1) Angka Harapan Hidup
Target 2019 : 65,6 Th

Indikator :
2) Indeks Keluarga Sehat
Target 2019 : 0,08

Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Indikator :
Indeks Kepuasan Mayarakat
Target 2019 : 76,61

Dinas PPKB

Sasaran 1
Terciptanya keseimbangan pertumbuhan penduduk

Indikator :
Total Fertility Rate (TFR)
Target 2019 : 2,6 Anak

Rp. 32.712.502.203

Indikator 2 :
Harapan Lama Sekolah
Target 2019 : 11,36 Tahun

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3) Program Pendidikan Non Formal
4) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Sasaran 1
Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan

Indikator :
Harapan Lama Sekolah
Target 2019 : 11,36 Th

Rp. 59.720.331.400

Sasaran 14
Menekan laju pertumbuhan penduduk

Indikator :
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Target 2019 : 0,77

1) Program Keluarga Berencana
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran 1
Terciptanya keseimbangan pertumbuhan penduduk

Indikator :
Ratio jumlah penduduk dengan luas wilayah
Target 2019 : 0,78 Anak

Rp. 1.976.515.000

Sasaran 15
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator :
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Target 2019 : 62,06

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Dinas Sosial PPPA

Sasaran 1
Meningkatkan Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

Indikator :
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Target 2019 : 62,06

Kecamatan

Sasaran 1
Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kecamatan

Indikator :
Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan
Target 2019 : 10%

Rp. 1.652.589.766

TUJUAN 6

Tujuan 6
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib

Indikator Tujuan :
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Kondisi Awal 71 dan target capaian Akhir 74

IKU 7

Sasaran 16
Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya

Indikator :
Indeks Gotong Royong

1) Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi
2) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Dinas Perumahan dan Permukiman

Sasaran 1
Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman

Indikator :
Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih
Target 2019 : 5,1%

Sasaran 4
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Indikator :
Persentase Rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak
Target 2019 : 66,9%

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran 1
Meningkatnya produksi tanaman Pangan

Indikator :
peningkatan Produksi tanaman Padi (Ton)
Target 2019 : 82.555 ton

Rp. 11.634.772.044

Sasaran 17
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

Indikator :
Indeks aspek kebebasan sipil
Target 2019 : 93,75

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
3) Program Peningkatan Pembarantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
4) Program Pendidikan Politik Masyarakat
5) Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah
6) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Badan Kesatuan Bangsan dan Politik

Sasaran 1
Menciptakan Stabilitas Politik yang demokratis

Indikator :
Indeks Kebebasan Sipil
Target 2019 : 82.555 ton

Satuan Polisi Pamong Paraja dan Damkar

Sasaran 1
Peningkatan penanganan pelanggaran Perda

Indikator :
Persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
Target 2019 : 50 %

Rp. 766.461.000

TUJUAN 7

Tujuan 7
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Indikator Tujuan :
Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kondisi Awal NA target capaian Akhir B

IKU 8

Sasaran 18
Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa

Indikator 1 :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target 2019 : A

1) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4) Program Penataan Pelayanan Publik
5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
6) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
7) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
8) Upaya Peningkatan Kesehatan Rujukan
9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPMPTSP)

- Dinas Kesehatan → Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat → Indikator : Indeks Kepuasan Mayarakat Target 2019 : 76,61
- RSUD NH → Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rujukan → Indikator : Indeks kepuasan masyarakat Target 2019 : 80,0
- DPMPTSP → Sasaran 1 Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah → Indikator : Indeks kepuasan masyarakat Target 2019 : 88,31
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan → Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik → Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Target 2019 : 81,17
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil → Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik → Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Target 2019 : 85,00
- Sekretariat Daerah → Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik → Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Target 2019 : 85,00

Rp. 21.886.134.998

Indikator 2 :
Persentase Pertumbuhan bumdes
Target 2019 : 89,04 %

1) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa → Sasaran 1 Meningkatnya BUMDesa yang aktif → Indikator : Persentase peningkatan BUMDes yang aktif Target 2019 : 41,1%

Rp. 450.845.500

Sasaran 19
Meningkatnya nilai investasi pembangunan

Indikator :
Nilai investasi (Juta Rupiah)
Target 2019 : Rp. 315.000.000.000

1) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

DPMPTSP → Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Investasi → Indikator : Nilai Realiasi Investasi PMDN Target 2019 : Rp.

Rp. 585.060.500

Sasaran 20
Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government

Indikator 1 :
Persentase peningkatan jangkauan TIK
Target 2019 : 86 %

Indikator : 2. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK
Target 2019 : 45 %

Indikator : 3. Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK
Target 2019 : ..... %

1) Pengembangan E-Government
2) Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Dinas Kominfo → Sasaran 1 Meningkatnya Akses Layanan teknologi komunikasi dan informasi
- Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi IT Target 2019 : 45%
- Indikator 2 : Persentase peningkatan jangkauan TIK Target 2019 : 86%

Rp. 1.797.954.500

IKU 9

IKU 10

Sasaran 21
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah

Indikator 1 :
Predikat SAKIP
Target 2019 : B

1) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Seluruh OPD → Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja → Indikator : Nilai AKIP Target 2019 : B

Rp. 3.128.107.971

Indikator 2 :
Opini atas Laporan Keuangan Daerah
Target 2019 : WTP

1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3) Program Pengamanan dan

- Bakeuda → Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah → Indikator : Opini BPK Target 2019 : WTP
- Inspektorat → Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset OPD yang efektif, efisien dan akuntabel. → Indikator : Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti Target 2019 : 100%

Rp. 6.499.246.073

Indikator 3 :
Predikat EPPD
Target 2019 : Tinggi

1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Sekretariat Daerah → Sasaran 1 Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan → Indikator : Skor / Nilai Evaluasi LPPD Kabupaten Target 2019 : 2.500

Rp. 920.000.000

LAMPIRAN VI

RENCANA AKSI KABUPATEN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
1	**Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap**	**Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap**	**-**	**-**	**-**	**73,12%**	**1**	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**		**persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**81,42%**	**Dinas PUPR**	**188.341.725.621**
									Perencanaan Jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan yang dihasilkan	-	-	-	25		2.780.769.000
									Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	15		149.447.103.080
									Perencanaan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang dihasilkan	-	-	-	15		3.198.100.000
									Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	-	-	-	15		28.005.471.541
									Pengawasan Jalan	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaaan pembangunan jalan yang dilaksanakan	-	-	-	15		4.179.782.000
									Pengawasan Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaaan pembangunan jembatan yang dilaksanakan	-	-	-	15		730.500.000
							2	**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**		**persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air**	**-**	**-**	**-**	**0,09%**		**7.397.000.000**
									Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong	Jumlah box culvert yang dibangun	-	-	-	25		7.000.000.000
									Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	-	-	-			183.000.000
									Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	-	-	-	25		214.000.000
							3	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan**		**Persentase alat berat dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**-**	**100**		**7.907.970.250**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
										Persentase Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD perlatan dan perbekalan (Km)	**-**	**-**	**-**	**100**		
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang di pelihara	-	-	-	10		300.000.000
									Operasional UPTD - ALKAL	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD peralatan dan perbekalan	-	-	-	50		7.607.970.250
							4	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**		**Persentase Panjang jalan lingkungan**	**-**	**-**	**-**	**36,70%**	**Dinas Perkim**	**15.213.931.820**
									Pembangunan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun (Km)	-	-	-	47,87		15.213.931.820
2	**Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan**	**Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi**	**-**	**-**	**-**	**36%**	**1**	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**		**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**-**	**75,95%**	**Dinas PUPR**	**30.829.110.000**
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang saluran dan tanggul yang di rehab (Km)	-	-	-	59		28.449.102.000
									Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Panjang saluran yang dilaksanakan pemeliharaan (Km)	-	-	-	75		2.380.008.000
3	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota**	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**1**	**Program Pemanfaatan Tata Ruang**		**persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota**	**-**	**-**	**-**	**100**	**Dinas PUPR**	**449.625.000**
									Koordinasi Penataan Ruang Kab.Tanjung Jabung Timur	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	1		449.625.000
							2	**Program Pengendalian Tata Ruang**		**persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang**	**-**	**-**	**-**	**100**		**470.750.000**
									Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang disusun	-	-	-	1		470.750.000
							3	**Program Perencanaan Tata Ruang**		**persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani**	**-**	**-**	**-**	**100**		**1.470.750.000**
									Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang disusun	-	-	-	1		366.875.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Jumlah Dokumen Finalisasi materi Teknis dan Draf Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan, Kecamatan	-	-	-	1		372.375.000
									Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	-	-	-	1		530.750.000
									Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	1		200.750.000
4	**Mengurangi permukiman kumuh**	**Persentase pengurangan permukiman kumuh**	**-**	**-**	**-**	**5,12%**	**1**	**Progrm pembangunan infrastruktur perdesaan**		**Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat**	**-**	**-**	**-**	**60,80%**	**Dinas Perkim**	**149.125.000**
									Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rehab rumah tidak layak huni	-	-	-	110		149.125.000
5	**Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi**	**Cakupan rumah tangga dengan air bersih**	**-**	**-**	**-**	**58%**	**1**	**Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih**		**Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih**	-	-	-	**75,15%**	**Dinas Perkim**	**11.138.291.900**
									Pembangunan sumur air tanah	Jumkah Sumur yang dibangun (unit)	-	-	-	14		1.183.825.000
									Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah SR	-	-	-	1200		4.979.516.900
									Operasional UPTD sisitim penyediaan air minum	Jumlah SR	-	-	-	1469		4.974.950.000
							2	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**		**Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih**	-	-	-	**58%**	**Dinas Kesehatan**	**135.625.000**
									Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jumlah Penyuluhan Lingkungan Sehat (kali)	-	-	-	12		121.140.000
									Sosialisasi Kebijakan Kesehatan Lingkugan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kesehatan Lingkugan	-	-	-	12		111.490.000
		Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak				**66,90%**	**1**	**Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi**		**Persentase Sanitasi Layak**	-	-	-	**66,90%**	**Dinas Perkim**	**1.344.491.000**
									Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Jumlah Sanitasi Rumah (unit)	-	-	-	2207		1.240.936.000
							2	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**		**Persentase Sanitasi Layak**	**-**	**-**	**-**	**66,90%**	**Dinas Kesehatan**	**103.555.000**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
								Lingkungan Sehat	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Kegiatan STBM (kali)	-	-	-	12		103.555.000
6	**Terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan**	**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**-**	**-**	**-**	**63,1**	**1**	**Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	-	-	-	**63,1**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**206.900.000**
										Persentase Dokumen Lingkungan yang telah ditetapkan	-	-	-	**100**		
										Indeks Kepuasan Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan	-	-	-	**77**		
									Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelollan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD)	-	-	-	2		75.175.000
									Pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan sosialisasi Peduli Lingkungan	-	-	-	4		131.725.000
							2	**Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**		**Persentase Pelaku usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Izin Pengelolaan Lingkungan**	-	-	-	**100**		**1.193.200.000**
										Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin Pengelolaan limbah B3	-	-	-	**50**		
										Nilai Indeks Kualitas Air	-	-	-	**57,31**		
										Nilai Indeks Kualitas Udara	-	-	-	**90,85**		
										Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	**62,51**		
										Persentase Usaha/Kegiatan yang menerapkan Izin PPLH dan Izin Lingkungan	-	-	-	**70**		
										Persentase pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	-	-	-	**100**		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah titik sampling air	-	-	-	27		153.000.000
										jumlah titik sampling Udara	-	-	-	2		
										jumlah data Tutupan Lahan	-	-	-	1		
									Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	-	-	-	49		126.400.000
									Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah Pembinaan terhadap Perusahaan yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	18		61.625.000
									Koordinasi Pemeriksaaan Instrument Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan Pemeriksaan Dokumen (UKL/UPL dan SPPL) yang dilayani	-	-	-	100		98.325.000
									Pengembangan Studi Kebijakan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun (Daya Dukung Daya Tampung)	-	-	-	1		451.000.000
									Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	Jumlah usaha / kegiatan yang dilayani	-	-	-	15		186.600.000
									Hutan Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Hutan Kota	-	-	-	30		116.250.000
7	**Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air**	**Persentase penurunan kecelakaan darat**	**-**	**-**	**-**	**0,35**	**1**	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**		**Persentase tingkat pelanggaran lalu lintas**	-	-	-	**44,11**	**Dinas Perhubungan**	**559.240.000**
										Persentase pemasangan perlengkapan keselamatan	-	-	-	**16,39**		
		Persentase penurunan kecelakaan air				**0,04**			Meningkatkan Disipilin Masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah Kecelakaan Darat	-	-	-	0		
									Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Jumlah Dokumen Informasi Lintas Perhubungan Darat Dan Air Yang Tersedia	-	-	-	1		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pengawasan dan Penertiban Angkutan Perairan	Jumlah Kecelakaan Air	-	-	-	0		
							2	**Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas**		**Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas**	-	-	-	**16,67**		**282.029.625**
									Pengawalan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan Dan Pengaturan LLAJ	Jumlah Pengawalan dan Pemanduan Rute Yang Aman	-	-	-	12		282.029.625
							3	**Program Penerangan Lampu Kota**		**Persentase penerangan lampu kota**	-	-	-	**66**	**Dinas Perkim**	**2.520.200.000**
									Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota	Jumlah LPJU yang terpasang	-	-	-	1049		1.663.000.000
									Pemliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Jumlah LPJU yang terpelihara	-	-	-	1937		857.200.000
8	**Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis**	**NTUP**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1**	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**		**Persentase Peningkatan kelas Poktan : Pemula**	-	-	-	**30**	**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**661.493.000**
										Persentase Peningkatan kelas Poktan : Lanjut	-	-	-	**47**		
										Persentase Peningkatan kelas Poktan : Madya	-	-	-	**19**		
										Persentase Peningkatan kelas Poktan : Utama	-	-	-	**1,3**		
									Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Poktan kelas Pemula	-	-	-	336		27.713.000
										Jumlah Poktan kelas Lanjut	-	-	-	480		
										Jumlah Poktan kelas Madya	-	-	-	193		
										Jumlah Poktan kelas Utama	-	-	-	13		
									Operasional UPTD	Jumlah Satker UPTD	-	-	-	11		508.594.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan	Jumlah Penyuluh mengikuti diklat dasar	-	-	-	2		13.766.000
									penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan	Jumlah Demplot Pertanian	-	-	-	3		18.451.000
									pemberdayaan komisi penyuluhan pertanian	Jumlah Pertemuan Komisi Penyuluhan Pertanian	-	-	-	12		30.376.000
									Penigkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /perkebunan	Jumlah penyuluh mengikuti Diklat Dasar (orang)	-	-	-	2		13.766.000
									Penyuluhan & Pendampingan bagi Pertanian /perkebunan	Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani (kelmpk)	-	-	-	12		18.451.000
									Pemberdayaan Komisi penyuluhan Kabupaten	Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluh	-	-	-	10		30.376.000
							2	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**		**Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman : Nenas**	-	-	-	**0,39**		**2.173.728.000**
										Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman : Semangka	-	-	-	**7,5**		
										Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman : Cabe	-	-	-	**1,65**		
										Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman : Padi	-	-	-	**0,71**		
										Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman : Jagung	-	-	-	**0,97**		
										Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman : Kedele	-	-	-	**2,29**		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Semangka (Ton)	-	-	-	412		84.138.000
										Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	-	-	-	5,15		
										Luas Tanaman semangka (Ha)	-	-	-			
										Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	-	-	-	80		
										Luas Tanam Nanas (Hektar)	-	-	-	16		
										Luas Panen Nanas (Hektar)	-	-	-	16		
										Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	-	-	-	0,043		
										Produksi Nanas (Ton)	-	-	-	12,5		
									Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Produksi benih padi (ton) benih sebar	-	-	-	350		200.194.000
										Produksi beras merah (Ton)	-	-	-	79,2		
										Luas Panen Beras Merah(hektar)	-	-	-	15		
										Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	-	-	-	3,6		
									Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	NPK (ton)	-	-	-	4500		8.220.000
										Urea (ton)	-	-	-	1100		
										SP 36 (ton)	-	-	-	850		
										Organik (ton)	-	-	-	150		
										ZA (ton)	-	-	-	60		
										Jumlah Kelompok Tani yang menyusun RDKK	-	-	-	650		
									Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Produksi Cabe (ton)	-	-	-	1242		88.432.000
										Luas Panen Cabe (Ha)	-	-	-	103		
										Produktivitas Cabe (ton/Ha)	-	-	-	2,46		
									Pengembangan intensifikasi Tanaman Padi	Produksi padi (Ton)	-	-	-	83232		1.277.819.000
										Luas Tanam Padi (Hektar)	-	-	-	21000		
										Luas panen Padi (Hektar)	-	-	-	19770		
										Provitas Tanaman padi (Ton/Ha)	-	-	-	4,21		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pengembangan Perbenihan / Perbibitan	Produksi benih padi Pokok (Ton)	-	-	-	6		203.247.000
										Produksi benih kedelai (Kg)	-	-	-	2		
									Pengembangan Perbenihan / Perbibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	Jumlah Bibit buah-buahan (batang)	-	-	-	500		57.088.000
									Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Asuransi Usaha Tanaman Padi /AUTP (Hektar)	-	-	-	660		17.830.000
									Pengolahan Lahan, air dan perluasan areal	Dokumen Pemetaan Lahan LP2B	-	-	-	1		43.475.000
									Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Jerat Babi(unit)	-	-	-	40		8.000.000
									Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	Powertresher (unit)	-	-	-	9		175.065.000
										Alat panen padi (unit)	-	-	-	8		
										Corn Seller (unit)	-	-	-	5		
										Terpal plastik (lembar)	-	-	-	105		
									Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Hortikultura	Alat pengolah nanas (unit)	-	-	-	2		10.220.000
										Alat pasca panen Semangka (unit)	-	-	-	2		
							3	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**		**Persentase promosi/pameran luar daerah/luar provinsi**	-	-	-	**100**	**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**23.847.000**
									Promosi atas hasil Pertanian produk unggulan daerah	Jumlah Promosi luar daerah/provinsi (Kali)	-	-	-	5		23.847.000
							4	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**		**Jumlah Peningkatan Populasi Ternak**	-	-	-	**4446468**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**517.328.000**
										Jumlah Peningkatan Produksi Daging Ruminansia	-	-	-	**261568**		
										Jumlah Peningkatan Produksi Daging Unggas	-	-	-	**1113774**		
									Pengembangan Balai Pembibitan Ternak	Jumlah Kelahiran Ternak Bibit	-	-	-	15		295.170

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Komoditas Agribisnis Peternakan	-	-	-	14		35.208
									Pengembangan Budidaya ternak	Pengembangan Kelompok Budidaya Ternak	-	-	-	2200		120.950
									Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Akseptor	-	-	-	3		66.000
							5	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak**		**Pengawasan Pangan Asal Hewan yang ASUH /Aman, Sehat, utuh dan Halal (Sampel)**	-	-	-	**130**		**319.708.000**
										Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	-	-	-	**2,2**		
									Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	-	-	-	32000		223.478
									Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan tempat pemotongan hewan	-	-	-	12		88.730
									Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Keswan dan Kesmavet	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keswan dan Kesmavet	-	-	-	35		7.500
							6	**Penciptaan Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan**		**Persentase Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan**	-	-	-	**1**		**136.444.000**
										Penerapan Tekhnologi	-	-	-	**1**		
									Pendampingan Inovasi Pertanian dan Program Strategis Nasional	Jumlah Inovasi Tekhnologi Pertanian	-	-	-	1		136.444.000
							7	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**		**Produktivitas Kelapa Dalam (Kg/Ha)**	-	-	-	**1167**		**611.861.000**
										Produktivitas Pinang (Kg/Ha)	-	-	-	**499**		
										Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	-	-	-	**510**		
									Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang dikembangkan (Batang)	-	-	-	1000		107.002
									Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul yang disalurkan (Batang)	-	-	-	40000		199.653

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pengelolaan Tata Air Mikro	Luas Areal Pengelolaan Tata Air Mikro (Ha)	-	-	-	150		23.520
									Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan	Persentase Penurunan Kebakaran Lahan dan Kebun (%)	-	-	-	0,06		159.250
									Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan	Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan (%)	-	-	-	2		35.750
									Penyediaan Alat/Sarana Produksi Perkebunan	Jumlah Alat/Sarana Produksi Perkebunan (unit)	-	-	-	5		86.686
9	**Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan**	**Persentase Pertumbuhan Koperasi**	**-**	**-**	**-**	**18,51**	**1**	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM**		**Persentase UKM Sehat**	-	-	-	**10,3**	**Dinas Koperasi UMKM**	**62.919.000**
									Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah SHAT bagi usaha mikro, kecil dan koperasi untuk mendapatkan modal usaha	-	-	-	100		20.228
									Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UKM	-	-	-	20		12.245
									Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Jumlah UKM yang dilegalitas HAKI	-	-	-	12		30.446
							2	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		**Persentase Kopearasi Sehat**	-	-	-	**20,13**		**120.862.000**
									Revitalisasi dan Penataan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif dan sehat usaha	-	-	-	165		7.043.250
									Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	-	-	-	6		41.393.000
									Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pertumbuhan UMKM	-	-	-	30		50.107
									Pelatihan Managemen Pengelola Koperasi/KUD	Jumlah Pelatihan Manajemen	-	-	-	15		110.683
10	**Meningkatnya investasi industri kecil menengah**	**Persentase Pertumbuhan IKM**	**-**	**-**	**-**	**92**	**1**	**Program Pengembangan dan Peningkatan IKM**		**Persentase IKM produktif**	-	-	-	**96**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**283.625.000**
									Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Pembinaan IKM (kali)	-	-	-	1		8.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Sertifikat HAKI dan Halal yg dikeluarkan (unit)	-	-	-	10		18.625.000
									Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah Sosialisasi kerjasama IKM (kali)	-	-	-	1		22.255.000
									Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah KUB penerima Bantuan Sarana prasarana IKM (unit)	-	-	-	2		74.939.000
									Pembinaan dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda	Jumlah Pelaksanaan pembinaan Dekranasda (Kali)	-	-	-	1		89.281.000
									Pameran dan Promosi Produk Kerajinan	Jumlah Pameran dan Promosi produk kerajinan	-	-	-	0		24.000.000
									Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Dokumen Pendataan IKM dan laporan UKL UPL sentra industri (dok)	-	-	-	2		39.525.000
									Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Pelatihan Inovasi Teknologi Industri (Kali)	-	-	-	1		7.000.000
11	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan**	**Nilai Tukar Nelayan**	**-**	**-**	**-**	**113,37**	**1**	**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**		**Nilai Tukar Nelayan**	-	-	-	**113,37**	**Dinas Perikanan**	**251.144.000**
									Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dibina	-	-	-	2		63.474.000
									Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan	Jumlah Sosialisasi terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	2		187.670.000
							2	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	-	-	-	**2,01**		**445.490.000**
									Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Tani yang didampingi	-	-	-	5		17.900.000
									Pengembangan Budidaya Keramba dan Tambak/ Kolam	Jumlah Sarana Budidaya yang dikembangankan	-	-	-	5		377.375.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Biaya Operasional BBI Kecamatan Dendang	Jumlah Peningkatan Produksi Benih	-	-	-	78300		50.215.000
							3	**Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan**		**Persentase produksi olahan hasil perikanan**	-	-	-	**0,45**		**336.233.000**
										Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	-	-	-	**35,4**		
									Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Olahan Perikanan yang diproduksi	-	-	-	10		105.000.000
									Pengujian Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Mutu Produk Perikanan	Jumlah Terujinya Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Produk Perikanan	-	-	-	2		25.345.000
									Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran serta Pengembangan Distribusi Pasar	Jumlah Sarana Pengolahan yang ditingkatkan	-	-	-	12		205.888.000
							4	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	-	-	-	**0,45**		**2.144.905.000**
									Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang didampingi	-	-	-	20		95.130.000
									Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Prasarana yang ditingkatkan	-	-	-	12		2.049.775.000
12	**Pengembangan destinasi wisata**	**Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata**	**-**	**-**	**-**	**0,02**	**1**	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**		**Jumlah Kunjungan wisatawan domestik**				**10600**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemudan dan Olahraga**	**391.500**
										Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara				**90**		
										Jumlah even pariwisata				**6**		
										Jumlah Promosi Pariwisata				**5**		
									Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Festival Kesenian dan Budaya				4		391.500.000
										Jumlah Pameran Promosi dalam dan luar daerah				2		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
										Jumlah papan reklame promosi pariwisata				8		
							2	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**		**Jumlah KSPD yang dibentuk**				**2**		**305.900.000**
									Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah daya tarik wisata				1		272.900.000
										Jumlah stackholder				3		
										Pembuatan Dokumenter pariwisata				1		
										TDUP				2		
									Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW	Jumlah sarana di ODTW				3		33.000.000
							3	**Program Pengembangan Kemitraan**		**Jumlah kemitraan dan stakeholder pariwisata**				**2**		**135.700.000**
										Masyarakat yang mempunyai capabilitas dibidang pariwisata				**40**		
									Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata				40		135.700.000
										Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata alam				40		
										Jumlah peserta pemandu wisata budaya kuliner dan pedesaan				40		
										Jumlah peserta pelatihan management home stay				40		
										Jumlah peserta pelatihan sadar wisata				40		
							4	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**		**persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**81,42%**	**Dinas PUPR**	**188.341.725.621**
									Perencanaan Jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan yang dihasilkan	-	-	-	25		2.780.769.000
									Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	-	-	-	15		149.447.103.080

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Perencanaan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang dihasilkan	-	-	-	15		3.198.100.000
									Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	-	-	-	15		28.005.471.541
									Pengawasan Jalan	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaaan pembangunan jalan yang dilaksanakan	-	-	-	15		4.179.782.000
									Pengawasan Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaaan pembangunan jembatan yang dilaksanakan	-	-	-	15		730.500.000
							5	**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**		**persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air**	**-**	**-**	**-**	**0,09%**		**7.397.000.000**
									Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong	Jumlah box culvert yang dibangun	-	-	-	25		7.000.000.000
									Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	-	-	-			183.000.000
									Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	-	-	-	25		214.000.000
							6	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan**		**Persentase alat berat dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**-**	**100**		**7.907.970.250**
										Persentase Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD perlatan dan perbekalan (Km)	**-**	**-**	**-**	**100**		
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang di pelihara	-	-	-	10		300.000.000
									Operasional UPTD - ALKAL	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD peralatan dan perbekalan	-	-	-	50		7.607.970.250
							7	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**		**Persentase Panjang jalan lingkungan**	**-**	**-**	**-**	**36,70%**	**Dinas Perkim**	**15.213.931.820**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pembangunan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun (Km)	-	-	-	47,87		15.213.931.820
							8	**Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**		**Persentase Pelaku usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Izin Pengelolaan Lingkungan**	-	-	-	**100**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**1.193.200.000**
										Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin Pengelolaan limbah B3	-	-	-	**50**		
										Nilai Indeks Kualitas Air	-	-	-	**57,31**		
										Nilai Indeks Kualitas Udara	-	-	-	**90,85**		
										Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	**62,51**		
										Persentase Usaha/Kegiatan yang menerapkan Izin PPLH dan Izin Lingkungan	-	-	-	**70**		
										Persentase pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	-	-	-	**100**		
									Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah titik sampling air	-	-	-	27		153.000.000
										jumlah titik sampling Udara	-	-	-	2		
										jumlah data Tutupan Lahan	-	-	-	1		
									Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	-	-	-	49		126.400.000
									Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah Pembinaan terhadap Perusahaan yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	18		61.625.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Koordinasi Pemeriksaaan Instrument Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan Pemeriksaan Dokumen (UKL/UPL dan SPPL) yang dilayani	-	-	-	100		98.325.000
									Pengembangan Studi Kebijakan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun (Daya Dukung Daya Tampung)	-	-	-	1		451.000.000
									Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Daerah	Jumlah usaha / kegiatan yang dilayani	-	-	-	15		186.600.000
									Hutan Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Hutan Kota	-	-	-	30		116.250.000
							9	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %**				**20**	**Satpol PP**	**339.941.000**
									Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumkah Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya				40		195.541.000
									Patroli Lingkungan	Intensitas Patroli (3 x perhari)				3404		88.700.000
									Operasi Pekat dan Gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Penyakit Masyarakat dan Gangguan Keamanan Kenyamanan Lingkungan				5		55.700.000
13	**Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat**	**Usia Harapan Hidup**	**-**	**-**	**-**	**65,65**	**1**	**Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan**		**Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Persentase pemberian informasi obat (PIO)**				**100**	**Dinas Kesehatan**	**1.263.248.000**
									Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (kali)				1		1.263.248.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
							2	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Jumlah Penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS**				**2500**		**7.938.829.543**
									Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringanya	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan				12		4.660.043.343
									Peningkatan Pelayanan dan Penangulangan Masalah Kesehatan	Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				12		6.520.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Barat				12		122.390.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Pandan				12		250.829.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Tuan				12		246.097.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Timur				12		268.380.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simbur Naik				12		80.516.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Lambur				12		180.814.500
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Kampung Laut				12		175.482.500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Dendang				12		132.329.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Rantau Rasau				12		222.470.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Tering				12		100.760.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Nipah Panjang				12		258.150.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Mendahara				12		205.210.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Pangkal Duri				12		90.280.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Berbak				12		175.304.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Lokan				12		58.800.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Jambat				12		104.846.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Air Hitam Laut				12		244.404.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Operasional gudang farmasi				12		355.204.200
							3	**Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat**		**Persentase Rumah Tangga PHBS,Jumlah Desa Siaga,Jumlah Posyandu serta IKM**				**100**		**238.529.000**
										Persentase Rumah Tangga PHBS				**0,56**		
										Jumlah Desa Siaga Aktif				**51**		
										Jumlah Posyandu				**282**		
										IKM				**0,72**		
									Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Persentase Terlaksananya Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat				12		94.450.000
									Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah Sekolah dilakukan Penyuluhan PHBS				12		101.872.500
									Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya PHBS				12		42.206.500
							4	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**		**Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita**				**0,75%**		**818.109.000**
										Prevalensi kurus dan sangat kurus pada Balita(Wasting)				**11,50%**		
										Persentase gizi balita buruk yang mendapat perawatan				**100**		
										Cakupan pemberian makanan pendamping Asi pada anak usia6-24 bulan keluarga miskin				**70%**		
										Persentase Asi Ekslusif				**58%**		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
										Prevalensi Pendek dan sangat pendek pada balita				**31%**		
									Penaggulangan Kurang Energi Protein, Anemia, Gizi Besi, GAKY Kurang	Persentase D/S				12		5.625.000
									Konfergesi dan Koordinasi Dengan LP/LS	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi				12		78.250.000
									Penguatan Pergerakan Pelaksanaan Intervensi Spesifikasi dan Sensitif	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi				12		629.234.000
									Monev dan Pelaporan	Persentase Perbaikan GIZI				12		105.000.000
							5	**Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular**		**Cakupan penemuan dan penanganan TB BTA+**				**82%**		**2.035.108.500**
										penemuan dan pengangan DBD				**100%**		
										Cakupan Desa / Kelurahan UCI				**96,20%**		
										Prevslensi Penyakit Kusta / 100.000 pddk				**2%**		
										Angka Kesembuhan TB Paru BTA +				**96%**		
										desa/kelurahanyang mengalami KLB yang dilakukan penyelididkan epidemiologi < 24 jam				**1**		
									Pelayanan Vaksinasi Bagi balita dan Anak Sekolah	Vaksinasi anak balita dan anak sekolah				12		277.185.000
									Pelayanan Pencegahan Penangulangan Penyakit Menular	Penyakit menular yang ditangani				12		1.757.923.500
							6	**Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya**		**PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN**				**96,96**		**15.398.850.000**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pembangunan Puskesmas	Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas				1		3.748.500.000
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas				1		11.650.350.000
							7	**Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan**		**Persentase meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan**				**70**		**6.200.000**
									Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga	Industri rumah tangga yang diawasi dan dibina				1		6.200.000
							8	**Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Anak**		**Jumlah Kematian Ibu**				**4**		**64.440.000**
										Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)				**20,5**		
										Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup (KH)				**21**		
										Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)				**20**		
										Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan				**65**		
									Monitoring PWS KIA bagi Bidan Desa	Terlaksananya pelatihan Manajemen PWS KIA bagi Bidan Desa				1		64.400.000
							9	**Program Pengembangan Kesehatan**		**Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi**				**100**		**2.023.619.000**
									Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas	jumlah puskesmas terakreditasi				12		1.756.828.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat dan sekolah	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Sekolah				12		20.061.000
									Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Komunikasi Antar Pribadi	Jumlah Pelayanan Kesehatan				1		166.730.000
									Penggalangan Palang Merah Indonesia	Jumlah Kegiatan Palang Merah Indonesia				1		80.000.000
							10	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**		**Persentase kec yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)**				**20**		**568.657.000**
										Prevalensi tekanan darah tinggi				**23,6**		
										Prevalensi Obesitas pada penduduk 18 + Tahun				**11**		
										Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun				**18**		
									Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi tekanan darah tinggi dan Obesitas				12		177.334.000
									Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA	Persentase Kasus Penyalahgunaan NAFZA				12		79.918.000
									Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu	Jumlah Posbindu di Kabupaten				12		311.405.000
			-	**-**	**-**	**11,36**	**1**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**		**APK PAUD**				**62,11**	**Dinas Pendidikan**	**3.944.787.100**
									Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih	Jumlah Sanitasi dan Air Bersih yang Dibangun				1		84.940.600
									Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah unit Kelas yang Direhab				6		608.837.900
									Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah orang yang menerima bantuan				347		1.350.927.600

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan yang melakukan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini				1		85.600.000
									Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga Kegiatan yang mengikuti Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini				14		133.950.000
									Pembangunan Gedung Baru	Jumlah Gedung Baru TK Pembina Negeri				5		1.097.631.000
									Bantuan Operasional PAUD (BOP)	Jumlah Lembaga yng diberi Bantuan Operasional PAUD (BOP)				17		455.400.000
									Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Jumlah guru yang mengikuti Diklat PAUD Berjenjang Tingkat Dasar				60		127.500.000
							2	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**		**Angka Rata-rata Lama Sekolah**				**7**		**65.568.099.122**
										Harapan Lama Sekolah				**11,36**		
										Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat				**97,13**		
										Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat				**84,28**		
										Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				**60,31**		
										Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat				**112,99**		
										Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat				**92,34**		
										Angka Partisipasi Sekolah SD				**104,47**		
										Angka Partisipasi Sekolah SMP				**84,95**		
									Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Bidang Pembinaan SD)				6		1.088.669.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pembangunan Perpustakaan (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Perpustakaan yang dibangun (Bidang Pembinaan SD)				6		1.020.000.000
									Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah unit sekolah yang dibangun Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)				5		1.177.631.000
									Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD) yang dinbangun				3		441.429.550
									Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Mebeleur Sekolah yang diberi(Bidang Pembinaan SD)				720		594.000.000
									Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah ruang Sekolah yang direhab(Bidang Pembinaan SD)				17		6.330.761.850
									Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah Rumah Dinas Guru SD yang direhab				3		119.522.000
									Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD)	Pembayaran Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				1		673.656.100
									Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) Bidang Pembinaan SD	Persentase Kelulusan Siswa				100		20.520.000
									Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD)				1		389.340.000
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba OSN,FLS2N,O@SN				205		141.775.000
									Pembinaan Sekolah Sehat / Berwawasan (Bidang Pembinaan SD)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba seolah Sehat				3		40.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bidang Pembinaan SD	Jumlah Kelompok yang Mengikuti KKG				35		497.154.000
									Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD)	Persentase Sekolah yang di Akreditasi				85		46.000.000
									Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)	Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)				17		864.000.000
									Pengadaan Media Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)	Pengadaan Media Pendidikan (Bidang Pembinaan SD)				5		300.000.000
									Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Bidang Pembinaan SMP)				6		4.346.500.000
									Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun (Bidang Pembinaan SMP)				2		11.430.000
									Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah sekoalah yang dibangun Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)				5		993.980.000
									Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah yang dinbangun (Bidang Pembinaan SMP)				7		1.451.116.000
									Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah sekolah yang dibangun Laborattorium				2		760.460.000
		Harapan Lama Sekolah							Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP				23		405.760.000
									Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Meubeler yang diadakan untuk sekolah SMP				284		227.150.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Ruang Gedung sekoah yang direhab				49		7.045.189.000
									Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Rumah Dinas SMP yang direhab				2		12.940.000
									Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				12		660.565.000
									Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP	Persentase Sekolah yang Ujian Nasional (UN) Bidang Pembinaan SMP				100		147.650.000
									Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SMP)				1		405.984.000
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba OSN,FLS2N,O@SN				45		106.250.000
									Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba seolah Sehat				1		5.000.000
									Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SMP)	Persentase Sekolah yang di Akreditasi				65		164.000.000
									Pengadaan Buku Kepustakaan (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Pengadaan Buku Kepustakaan (Bidang Pembinaan SMP)				6		189.000.000
									Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang Pembinaan SMP)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan peralatan Pendidikan SMP				18		2.090.650.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Dana BOS SD	Jumlah Sekolah Mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)				205		23.125.016.622
									Dana BOS SMP	Jumlah Sekolah Mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)				45		9.675.000.000
							3	**Program Pendidikan Non Formal**		**Jumlah Persentase Angka Melek Huruf**				**97,4**		**1.706.113.200**
										Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD				**4**		
										Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP				**8**		
										Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA				**28**		
									Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	JumlahPemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal				1		144.140.000
									Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal				17		53.071.000
									Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pendidikan Kursus dan Kelembagaan				16		116.710.000
									Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pendidikan Keaksaraan				1		413.000.000
									Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup				7		204.750.000
									Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Lembaga yang di Monitoring				100		136.262.200
									Penyelenggaraan Paket C	Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Paket C				21		512.710.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyelenggaraan Paket B	Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Paket B				7		102.970.000
									Penyelenggaraan Paket A	Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Paket A				4		22.500.000
							4	**Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**		**Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**				**97,87**		**5.136.890.000**
									Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik				1		83.910.000
									Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan				11		1.958.000.000
									Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar	Pembinaan Peningkatan Profesional Tenaga Pendidik				1		134.400.000
									Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Diklat Peningkatan PotensiTenaga Pendidik dan Kependidikan				4		1.088.880.000
									BOS Pengganti Komite	Pembayaran Jasa Kerja PHTT (GTT dan TU.TT)				11		1.871.700.000
							5	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**		**Rasio guru/murid SD sederajat**				**61,27**		**284.200.000**
										Rasio guru/murid SMP sederajat				**61,27**		
									Pengelolaan dan Pengembangan DAPODIK	Pembayaran Pelaksanan Sosialisasi dan Jasa Data Pokok Pendidik (DAPODIK)				1		95.000.000
									Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendukung Profil Pendidik				1		40.500.000
									Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Pembayaran Jasa Sistem dan Informasi Manajemen Pendididkan				1		55.000.000
									Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pembayaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				1		30.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyusunan Perencanaan dan Program	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan				6		63.700.000
14	**Menekan laju pertumbuhan penduduk**	**LPP**	**-**	**-**	**-**	**0,77**	**1**	**Program Keluarga Berencana**		**Menurunnya jumlah anak pasangan usia subur (Total Fertility Rate/TFR)**				**2,66**	**Dinas Pengendalian Penduduk an Keluarga Berencana**	**3.475.114.000**
										Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun				**3,8**		
										Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif				**67,5**		
										Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)				**9**		
									Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	Angka pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun				67,5		76.326.000
									Pelayanan KIE (Konsumsi, Informasi dan Edukasi)	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan				11		99.070.000
									Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)				39		192.650.000
									Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah UPPKS yang aktif dan dibina				36		319.710.000
									Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	Jumlah terlayaninya peserta KB pria				1100		10.060.000
									Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Sarana Mobilitas Tim KB Keliling				4		434.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang terpenuhi biaya operasionalnya				11		1.184.128.000
									Penguatan Keluarga dalam Pembangunan Nasional	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)				1		23.300.000
									Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB	Jumlah Kampung KB yang aktif dan dibina				12		32.750.000
									Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah PLKB/PKB yang dilatih				65		1.060.136.000
									Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alkon)	Jumlah Faskes yang tersedia dan terdistribusi Alokon				18		42.984.000
							2	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**		**Miks Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**				**15,4**		**5.000.000**
										Jumlah PIK-R (Pusat Informasi dan Keluarga Remaja)				**50**		
									Pendirian Pusat Pelayanan Infomasi dan Konseling	Jumlah PIK-R (Pusat Informasi dan Keluarga Remaja) yang aktif				35		5.000.000
							3	**Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**		**Persentase jumlah kader bina keluarga terlatih**				**35**		**247.590.000**
									Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				220		35.750.000
									Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				450		211.840.000
							4	**Program Pengendalian Penduduk**		**Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**				**0,77**		**8.900.000**
									Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga	Jumlah Rumah Data dan Pojok Kependudukan				2		8.900.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
15	**Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan**	**IPG**	**-**	**-**	**-**	**67**	**1**	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak**		**IPG**				**67**		**56.625.000**
									Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak	Jumlah POKJA Perlindungan Anak dan Forum Anak Daerah yang terbentuk						3.505.000
									Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	Jumlah Fasilitasi P2TP2A yang tersedia						53.120.000
							2	**Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**		**Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan**				**100**		**522.500.000**
									Gerakan Organisasi Wanita (GOW)	Persentase Pemberdayaan Perempuan				1		225.000.000
									Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Jumlah perempuan yang di bina				1		297.500.000
16	**Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya**	**Indeks Gotong Royong**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1**	**Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih**		**Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih**	-	-	-	**75,15%**	**Dinas Perkim**	**11.138.291.900**
									Pembangunan sumur air tanah	Jumkah Sumur yang dibangun (unit)	-	-	-	14		1.183.825.000
									Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah SR	-	-	-	1200		4.979.516.900
									Operasional UPTD sisitim penyediaan air minum	Jumlah SR	-	-	-	1469		4.974.950.000
							2	**Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi**		**Persentase Sanitasi Layak**	-	-	-	**66,90%**	**Dinas Perkim**	**1.344.491.000**
									Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Jumlah Sanitasi Rumah (unit)	-	-	-	2207		1.240.936.000
							3	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**		**Produktivitas Kelapa Dalam (Kg/Ha)**	-	-	-	**1167**	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**23.520.000**
										Produktivitas Pinang (Kg/Ha)	-	-	-	**499**		
										Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	-	-	-	**510**		
									Pengelolaan Tata Air Mikro	Luas Areal Pengelolaan Tata Air Mikro (Ha)	-	-	-	150		23.520.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
17	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat**	**Indeks aspek kebebasan sipil**	**-**	**-**	**-**	**93,75**	**1**	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**		**Persentase Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa**	-	-	-	**100**	**Badan Kesbangpol**	**43.695.000**
										Persentase Kegiatan Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah Empat Pilar Kebangsaan	-	-	-	**100**		
										Persentase Cakupan Penyuluhan Revolusi Mental	-	-	-	**100**		
										Indeks Aspek Kebebasan Sipil	-	-	-	**93,75**		
										Persentase Data Jumlah Rumah Ibadah	-	-	-	**100**		
										Persentase Peningakatan Aliran Kepercayaan	-	-	-	**100**		
										Persentase Fasilitasi dan Verifikasi data Ormas	-	-	-	**100**		
										Persentase jumlah Konflik antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan yang akan di selesaikan	-	-	-	**96,62**		
									Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah sosialisasi penguatan pendidikan wawasan kebangsaan	-	-	-	1		16.095.000
									Pembinaan Fokum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah rakor Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	-	-	-	1		9.530.000
									Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Jumlah sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	-	-	-	1		2.660.000
									Peningkatan dan Pemeberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi pemberdayaan ORMAS	-	-	-	1		8.140.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah	Jumlah dokumen Ormas dan rumah ibadah	-	-	-	1		7.270.000
							2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan**		**Persentase Konflik Sosial, Keamanan dan Ketentraman yang di Fasilitasi**	-	-	-	**90**		**21.277.000**
									Pembinaan dan Pemantapan FKDM	Jumlah sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat	-	-	-	1		3.143.000
									Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sosialisasi TIM-DU penanganan konflik sosial	-	-	-	1		18.134.000
							3	**Program Peningkatan Pembarantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**		**Persentase Penyuluhan PEKAT**	-	-	-	**100**		**3.185.741**
										Persentase penurunan perkembangan pemyakit masyarakat	-	-	-	**14**		
									Penyuluhan Bajaya Narkoba, Minuman Keras, Prostitusi, Premanisme dan Perjudian	Jumlah Sosialisasi P4GN, minuman keras, prostitusi, premanisme dan perjudian	-	-	-	1		3.185.741
							4	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**		**Persentase partai politik yang mengelola administrasi keuangan dengan baik**	-	-	-			**3.030.000**
										Indeks Aspek Hak-hak Politik	-	-	-			
									Pemutakhiran data Kepengurusan partai politik	Jumlah dokumen data base parpol	-	-	-	1		3.030.000
							5	**Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah**		**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.**	-	-	-	**100**		**40.310.000**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Pengamanan dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Orang-orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah	Satuan Personil Pengamanan dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang Penting dan Penjagaan Aset-aset Daerah termasuk pengamanan unjuk rasa	-	-	-	12		34.592.000
									Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	24		70.200.000
									PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	Jumkah pelaksanaan penanganan pelanggaran peraturan daerah	-	-	-	1		7.200.000
									PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Penataan peraturan dan perundang undangan daerah	-	-	-	1		7.175.000
							6	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %**	-	-	-	**20**	**Satpol PP**	**339.941.000**
									Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumkah Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	40		195.541.000
									Patroli Lingkungan	Intensitas Patroli (3 x perhari)	-	-	-	3404		88.700.000
									Operasi Pekat dan Gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Penyakit Masyarakat dan Gangguan Keamanan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	5		55.700.000
18	**Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian**	**IKM**	**-**	**-**	**-**	**A**	**1**	**Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi**		**Peningkatan Peluang Promosi dan Kerjasama Investasi**	-	-	-	**100**	**DPMPTSP**	**109.164.250**
										Profil Peluang Investasi (Dokumen)	-	-	-	1		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
	desa									**Evaluasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Telah Berjalan**	-	-	-	1		
									Penyusunan Profil Peluang Investasi	Profil Peluang Investasi (Dokumen)	-	-	-	1		30.376.750
									Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Evaluasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Telah Berjalan	-	-	-	1		78.787.500
							2	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Jumlah Penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS**	-	-	-	**2500**		**7.938.829.543**
									Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringanya	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	-	-	-	12		4.660.043.343
									Peningkatan Pelayanan dan Penangulangan Masalah Kesehatan	Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	-	-	-	12		6.520.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Barat	-	-	-	12		122.390.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Pandan	-	-	-	12		250.829.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simpang Tuan	-	-	-	12		246.097.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Muara Sabak Timur	-	-	-	12		268.380.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Simbur Naik	-	-	-	12		80.516.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Lambur	-	-	-	12		180.814.500
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Kampung Laut	-	-	-	12		175.482.500
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Dendang	-	-	-	12		132.329.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Rantau Rasau	-	-	-	12		222.470.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Tering	-	-	-	12		100.760.000
									Penyediaan Biaya	Kegiatan operasional dan	-	-	-	12		258.150.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Mendahara	-	-	-	12		205.210.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Pangkal Duri	-	-	-	12		90.280.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Berbak	-	-	-	12		175.304.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Lokan	-	-	-	12		58.800.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Sungai Jambat	-	-	-	12		104.846.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut	Kegiatan operasional dan program di Puskesmas Air Hitam Laut	-	-	-	12		244.404.000
									Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kabupaten	Operasional gudang farmasi	-	-	-	12		355.204.200
							3	**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**Persentase skor IKM (Indeks Kepuasaan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik)**	-	-	-	**90**		**211.412.600**
									Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	-	-	-	509		82.050.000
									Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat	Jumlah Media Massa	-	-	-	1		12.375.450
									Pelayanan Mutasi Penduduk dan Adminsitrasi WNA	Jumlah penduduk yg pindah	-	-	-	2855		16.000.000
									Pelayanan KIA Keliling	Jumah KIA yag diterbitkan	-	-	-	4719		11.000.000
									Konektifitas Data Warehouse	Jumah peralatan warehouese	-	-	-	1		63.804.600
									Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Jumlah Kecamatan dg pengembangan SAK terpadu	-	-	-	11		26.182.550
							4	**Program Penataan Pelayanan Publik**		**Persentase Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pada Unit Pelayanan Publik**	-	-	-	**100**	**Setda**	**17.924.800**
									Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Jumlah Dokumen Himpunan Regulasi Pelayanan Publik	-	-	-	1		17.924.800

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
							5	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**		**Persentase Jumlah Pengunjung**	-	-	-	**21,62**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**80.346.000**
										Persentase Koleksi Buku	-	-	-	**19,78**		
									Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lomba Perpustakaan Sekolah	-	-	-	1		690.000
									Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta Mengikuti Bimtek Pengelolaan perpustakaan	-	-	-	10		14.000.000
									Standarisasi, Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan dan Evaluasi Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	20		30.166.000
									Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah	Jumlah Buku yang tersedia/Judul	-	-	-	0		2.580.000
									Pengembangan Perpustakaan, Minat dan Penyediaan Bantuan Perpustakaan	Jumlah Rakor / seminar Perpustakaan Tingkat Nasional dan Provinsi	-	-	-	1		2.250.000
									Layanan Perpustakaan Keliling	Cakupan layanan perpustakaan keliling	-	-	-	6		29.660.000
									Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	-	-	-	0		1.000.000
19	**Meningkatnya nilai investasi pembangunan**	**Nilai Investasi**	**-**	**-**	**-**	**315 M**	**1**	**Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi**		**Peningkatan Peluang Promosi dan Kerjasama Investasi**	-	-	-	**100**	**DPMPTSP**	**109.164.250**
										Profil Peluang Investasi (Dokumen)	-	-	-	1		
										Evaluasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Telah Berjalan	-	-	-	1		
									Penyusunan Profil Peluang Investasi	Profil Peluang Investasi (Dokumen)	-	-	-	1		30.376.750
									Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Evaluasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Telah Berjalan	-	-	-	1		78.787.500
20	**Tata kelola pemerintahan yang efektif,**	**Persentase peningkatan jangkauan TIK**	**-**	**-**	**-**	**86**	1	**Pengembangan E-Government**		**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi TIK**	-	-	-	**61**	**Dinas Kominfo**	**1.163.289.400**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
	efisien dan transparan berbasis e-government	**perangkat daerah yang mengimplementasikan TIK**	-	-	-	**45**				**Cakupan layanan akses internet pada ruang publik**	-	-	-	**75**		
		Pelayanan Publik yang berbasis TIK	-	-	-	**86**			Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Goverment	Jumlah jaringan Intranet OPD yang terintegrasi	-	-	-	100		1.138.675.000
									Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Persentase sistem aplikasi yang terbangun	-	-	-	60		9.500.000
									Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi	Jumlah jaringan interkoneksi internet	-	-	-	2		12.489.400
									Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keaman Informasi	Jumlah koordinasi/konsultasi sistem keamanan informasi	-	-	-	2		2.625.000
							2	**Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa**		**Persentase pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat desa/kelurahan**	-	-	-	**13**		**137.665.543**
										Persentase peningkatan jangkauan TIK	-	-	-	**95**		
									Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan KIM	Jumlah KIM Desa/Kelurahan yang dibina	-	-	-	2		17.062.500
									Koordinasi, Pengembangan, Evaluasi dan Pengembangan Informasi	Jumlah BTS yang terbangun area blank spot	-	-	-	8		47.003.043
									Peningkatan dan Pengelolaan data Informasi	Jumlah Publikasi Data yang Telah diverifikasi melalui Website	-	-	-	3		73.600.000
21	**Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah**	**Predikat SAKIP**	**-**	**-**	**-**	**B**	**1**	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Nilai SAKIP**				**B**	**Seluruh OPD**	**3.128.107.971**
									Pembinaan Statistik Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja, Statistik dan Keuangan				3		782.026.993
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,Triwulanan,Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan, PK, LAKIP, LKPJ dan LPPD				5		782.026.993
									Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Keuangan				5		782.026.993

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan				5		782.026.993
									Pembinaan, Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan	Jumlah pembinaan, koordinasi/pelaksanaan monitoring dan pelaporan						782.026.993
							2	**Program Penataan Perangkat Daerah**		**Persentase OPD Yang Telah Melaksanakan ANJAB dan ABK**				**85**		**157.351.500**
									Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Lembaga Prangkat Daerah yang ikut Kopetensi				11		28.297.800
									Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Asn Yang mengikuti Kompetensi Jabatan				60		51.673.800
									Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi	Jumlah IKM, SOP, SPM dan AD PPK				3		17.987.300
									Penataan Tata Naskah Dinas	Jumlah Tata Naskah Dinas				1		10.260.000
									Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Daerah	Jumlah buku Himpunan pertaturan Bupati				2		49.132.600
		Opini atas Laporan Keuangan Daerah	**-**	**-**	**-**	**WTP**	**1**	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Peningkatan PAD**				**100**		**2.267.420.580**
									Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah				1		81.785.000
									Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya APBD dan APBDP Tepat Waktu				2		676.492.700
									Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terciptanya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu Akuntabel dan Akurat				1		173.260.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Penyusnan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Sistem dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				1		247.597.500
									Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Tentang Pengelolaan Keuda				2		88.900.000
									Peningaktan Manajemen dan Evaluasi Aset Daerah	Terciptanya Laporan Aset yang Tepat Waktu Akuntabel dan Akurat				1		149.599.990
									Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Mengevaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah				1		200.605.800
									Sistem Informasi dan Manajemen Gaji	Terpenuhinya Data Belanja Pegawai yang Tertib dan Akuntabel				1		59.122.000
									Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terciptanya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Kas Daerah				1		74.015.000
									Pengamanan Aset Millik Pemerintah	Terpenuhinya Administrasi Penatausahaan Aset Daerah				1		102.975.090
									Pengendalian Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Terhadap Pelaksanaan APBD				2		32.534.000
									Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	Terealisasinya Proses Pengajuan Keberatan, Pengurangan dan Penghapusan PBB				1		380.533.500
							2	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**				**WTP**		**2.433.120.594**
									Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)				75		1.021.495.000
									Review, Monitoring dan Evaluasi	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai " B "				30		614.650.000
									Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti				4		440.239.100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	PROGRAM	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGARAN
			TR1	TR2	TR3	TR4					TR1	TR2	TR3	TR4		
											1	4	7	10		
									Monitoring dan Penyelesaian TPTGR	Jumlah Penyelesaian TPTGR				15		45.755.000
									Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Laporan Pengawasan				12		100.000.000
									Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumah Laporan Evaluasi Temuan				6		157.275.594
									Kormonev, Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumah Laporan Kormonev				4		53.705.900
							3	**Program Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah**		**Persentase Aset Daerah yang Diamankan dan Didayagunakan**				**100**		**57.480.000**
									Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Dokumen Aset Daerah				1		57.480.000
		Peringkat EPPD	**-**	**-**	**-**	**Tinggi**	**1**	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**		**Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)**				**100**		**413.494.400**
									Pengelolaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Kecamatan				10		100.550.000
									Penataan dan Penegasan Batas Daerah	Jumlah Penepatan batas daerah devinitif				1		296.500.000
									Peningkatan Kapasitas Camat	Jumlah Camat yang terpilih berprestasi				3		95.300.000
									Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Rupa Bumi yang tersedia				40		39.250.000
									Pembinaan dan Evaluasi PATEN	Jumlah monitoring kegitang pelayanan PATEN				1		25.611.000
									Penyusunan Laporan LPPD	Jumlah Laporan LPPD yang tersusun				1		56.350.000
									Desk Pemilu	JumlahMonitoring Desk Pemilu				1		39.050.000

LAMPIRAN VII

PETA PROSES BISNIS KABUPATEN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 625 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2012 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19[illegible]0323 200212 1 004

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun peta proses bisnis di lingkungan unit kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 OKTOBER 2020

Pjs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

19/10-2020

H. VARIAL ADHI PUTRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
NIP	NIP	NIP

Tembusan, Kepada Yth.
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 625 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PEMETAAN PROSES BISNIS

Tahapan Persiapan dan Perencanaan

PETA PROSES BISNIS	
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI	
VISI	Dengan mengacu pada RPJPD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yakni : "**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)**"
MISI	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim). 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK. 4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PROSES UTAMA (Strategi dalam rangka pencapaian kinerja utama)

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan jaringan dan kualitas jalan jembatan kabupaten	Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
	Meningkatnya kualitas sumber daya air	Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat	Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian
	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW kabupaten	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
	Mengurangi permukiman kumuh	Perbaikan permukiman kumuh padat penduduk	Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh
	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi layak pada masyarakat	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah
Meningkatkan keselamatan transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun ai	Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi	Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan
		Peningkatan aksesibilitas orang dan barang melalui jalur air	

MISI 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	Peningkatan produktivitas tanaman pangan	➢ Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija ➢ Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan ➢ Pengembangan tanaman hortikultura ➢ Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian
		Peningkatan produksi daging	Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan
		Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	➢ Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. ➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil perkebunan
		Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat	➢ Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat ➢ Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan
	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM
	Meningkatnya investasi industri kecil menengah	Peningkatan usaha industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan	Peningkatan produksi perikanan (perairan umum, kolam dan air laut)	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut

	Pengembangan destinasi wisata	Peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan

MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK	Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu pendidikan dasar	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
		Peningkatan sarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar
		Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	Menguatkan upaya kesehatan melalui pendekatan keluarga
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak
	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana

MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Peningkatan peran masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	➢ Pengendalian Kebijakan Daerah ➢ Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat

MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa	Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang baik	➢ Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa
	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Peningkatan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu
	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis e-government	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan	➢ Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP ➢ Meningkatkan kapabilitas internal audit ➢ Meningkatkan kualitas laporan keuangan

SUB PROSES, PETA LINTAS FUNGSI, DAN PETA RELASI

MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sumber daya air, permukiman sesuai tata ruang daerah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan jaringan dan kualitas jalan jembatan kabupaten	➢ Membangun jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis ➢ Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase terhubungnya desa / kelurahan ke ibu kota kecamatan dengan kondisi mantap	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	PD Penanggung Jawab
Indikator : Persentase peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas sumber daya air	Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat	Membangun dan memelihara jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR
	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW kabupaten	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota	1) Program Pemanfaatan Tata Ruang, 2) Program Pengendalian Tata Ruang 3) Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas PUPR
	Mengurangi permukiman kumuh	Perbaikan permukiman kumuh padat penduduk	Meningkatkan penanganan penanggulangan permukiman kumuh	Persentase pengurangan permukiman kumuh	1) Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman 2) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Dinas Perkim
	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi	Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi layak pada masyarakat	➢ Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	➢ Cakupan rumah tangga dengan air bersih ➢ Persentase sanitasi layak	1) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3) Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Perkim

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan Indikator : Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah	Indeks kualitas lingkungan hidup	1) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
Meningkatkan keselamatan transportasi Indikator : Persentase Penurunan Kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya keselamatan transportasi darat maupun air	Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi	➢ Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas ➢ Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala	➢ Persentase penurunan kecelakaan darat ➢ Persentase penurunan kecelakaan air	1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 3) Program Penerangan Lampu Kota 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	1) Dinas Perhubungan 2) Dinas Perkim
		Peningkatan aksesibilitas orang dan barang melalui jalur air	Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan			

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis guna mendukung kedaulatan pangan, koperasi, UKM, investasi industri kecil dan menengah, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat nelayan Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas	Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	Peningkatan produktivitas tanaman pangan	➢ Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija ➢ Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan ➢ Pengembangan tanaman hortikultura ➢ Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian ➢ Meningkatkan intensifikasi tanaman padi dan palawija ➢ Meningkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan ➢ Pengembangan tanaman hortikultura ➢ Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian	NTUP	1. Program Peningkatan esejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak 6. Penciptaan Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan

			➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian			
		Peningkatan produksi daging	Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan pelayanan keswan			
		Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	➢ Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. ➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil perkebunan			
		Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat	➢ Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat ➢ Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan			
	Meningkatnya peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Koperasi	1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil 2) Menengah Yang Kondusif 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM

	Meningkatnya investasi industri kecil menengah	Peningkatan usaha industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	1) Program Program Pengembangan dan Peningkatan IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nelayan	Peningkatan produksi perikanan (perairan umum, kolam dan air laut)	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan air laut	Nilai Tukar Nelayan	1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3) Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Pengembangan destinasi wisata	Peningkatan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik	Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemeratan dan daya saing kegiatan kepariwisataan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Kemitraan 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1. Dinas Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perkim 4. Dinas LH Satpol PP Damkar

					8) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 9) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	

MISI 3 : Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Program	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, setara, terkendali dan menguasai IPTEK Indikator : Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu pendidikan dasar	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	➢ Usia Harapan Hidup ➢ Harapan Lama Sekolah	1) Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 6) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan

					7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dan Balita 8) Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan 9) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Anak 10) Program Pengembangan Kesehatan 11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 12) Program Pendidikan Anak Usia Dini 13) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14) Program Pendidikan Non Formal 15) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 16) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

					2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Program	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, tentram dan tertib Indikator : Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya kualitas masyarakat berbudaya	Peningkatan peran masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya	➢ Indeks Gotong Royong	1. Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi 2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 3. Program Peningkatan Produksi	1. Dinas Perkim 2. Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura

	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	➢ Pengendalian Kebijakan Daerah ➢ Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	➢ Indeks Aspek Kebebasan Sipil	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 2. Program Peningkatan Pembarantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat 4. Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah 5. Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1. Dinas Satpol PP Damkar 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Program	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan daerah Indikator : Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa	Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang baik	➢ Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa ➢ Meningkatkan kemandirian desa	➢ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ➢ Persentase Pertumbuhan Bumdes	1. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Program Penataan Pelayanan Publik	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Dukcapil 3. RSUD NH 4. DPMPTSP 5. Sekretariat Daerah 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

					5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 8. Upaya Peningkatan Kesehatan Rujukan 9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPMPTSP) 11. Program Penataan Pemanfaatan Adminstrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 12. Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 13. Program Pembangunan Sarana &Prasarana Perhubungan 14. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 15. Program peningkatan sarana dan prasarana	7.

					16. Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an	
	Meningkatnya Nilai Investasi Pembangunan	Peningkatan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Meningkatkan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	➢ Nilai Investasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Dinas PMPTSP
	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis egovernment	Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis e-government	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja	➢ Persentase peningkatan jangkauan TIK ➢ Persentase perangkat daerah yang mengimplement as ikan TIK ➢ Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	1. Pengembangan e-Government 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Dinas Kominfo
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan	➢ Meningkatkan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP ➢ Meningkatkan kapabilitas internal audit ➢ Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	➢ Predikat SAKIP ➢ Opini atas Laporan Keuangan Daerah ➢ Peringkat EPPD	1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

					4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 5. Program Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah 6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	

IDENTIFIKASI PROSES

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1.	Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Utama	TANJABTIMKAB-1.1
2.	Peningkatan kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Utama	TANJABTIMKAB-1.2
3.	Peningkatan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Sesuai RTRW	Utama	TANJABTIMKAB-1.3
4.	Pengurangan permukiman kumuh	Utama	TANJABTIMKAB-1.4
5.	Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi	Utama	TANJABTIMKAB-1.5
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Utama	TANJABTIMKAB-1.6
7.	Peningkatan keselamatan transportasi darat maupun air	Utama	TANJABTIMKAB-1.7

MISI 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim).

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1.	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis	Utama	TANJABTIMKAB-2.1
2.	Peningkatan peranan koperasi terhadap ekonomi kerakyatan	Utama	TANJABTIMKAB-2.2
3.	Peningkatan investasi industri kecil menengah	Utama	TANJABTIMKAB-2.3
4.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan	Utama	TANJABTIMKAB-2.4
5.	Pengembangan destinasi wisata	Utama	TANJABTIMKAB-2.5

MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1.	Peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat	Utama	TANJABTIMKAB-3.1
2.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Utama	TANJABTIMKAB-3.2
3.	Menekan laju pertumbuhan penduduk	Utama	TANJABTIMKAB-3.3

MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1.	Peningkatan kualitas masyarakat berbudaya	Utama	TANJABTIMKAB-4.1
2.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Utama	TANJABTIMKAB -4.2

MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1.	Peningkatan mutu pelayanan pemerintah daerah dan kemandirian desa	Utama	TANJABTIMKAB-5.1
2.	Peningkatan nilai investasi pembangunan	Utama	TANJABTIMKAB-5.2
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan berbasis e-government	Utama	TANJABTIMKAB-5.3
4.	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah	Utama	TANJABTIMKAB-5.4

SUB PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1.	TANJABTIMKAB-1.1	➢ Pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan dan kawasan strategis	TANJABTIMKAB-1.1.1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	TANJABTIMKAB-1.1.1.01
				Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	TANJABTIMKAB-1.1.1.02
				Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	TANJABTIMKAB-1.1.1.03
		➢ Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	TANJABTIMKAB-1.1.2	Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong	TANJABTIMKAB-1.1.2.01
2.	TANJABTIMKAB-1.2	➢ Pembangunan dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian	TANJABTIMKAB-1.2.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	TANJABTIMKAB-1.2.1.1
3	TANJABTIMKAB-1.3	➢ Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	TANJABTIMKAB-1.3.1	Pemanfaatan Tata Ruang	TANJABTIMKAB-1.3.1.1
				Pengendalian Tata Ruang	TANJABTIMKAB-1.3.1.2
				Perencanaan Tata Ruang	TANJABTIMKAB-1.3.1.3
4	TANJABTIMKAB-1.4	➢ Peningkatan penanganan penanggulangan permukiman kumuh	TANJABTIMKAB-1.4.1	Penataan Lingkungan Permukiman	TANJABTIMKAB-1.4.1.1
				Pengembangan Perumahan dan Permukiman	TANJABTIMKAB-1.4.1.2
5	TANJABTIMKAB-1.5	➢ Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	TANJABTIMKAB-1.5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	TANJABTIMKAB-1.5.1.1
				Pengembangan Lingkungan Sehat	TANJABTIMKAB-1.5.1.2
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	TANJABTIMKAB-1.5.1.3
6	TANJABTIMKAB-1.6	➢ Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan dan limbah	TANJABTIMKAB-1.6.1	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	TANJABTIMKAB-1.6.1.1
				Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	TANJABTIMKAB-1.6.1.2

7	TANJABTIMKAB-1.7	➢ Pemasangan perlengkapan alat keselamatan lalu lintas	TANJABTIMKAB-1.7.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	TANJABTIMKAB-1.7.1.1
				Penerangan Lampu Kota	TANJABTIMKAB-1.7.1.2
		➢ Uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala	TANJABTIMKAB-1.7.2	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	TANJABTIMKAB-1.7.2.1
		➢ Pembangunan dermaga dan tambatan perahu pada daerah perairan	TANJABTIMKAB-1.7.3	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	TANJABTIMKAB-1.7.3.1

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1	TANJABTIMKAB-2.1	➢ Peningkatan intensifikasi tanaman padi dan palawija	TANJABTIMKAB-2.1.1	Peningkatan Produksi Tanaman Padi dan Palajiwa	TANJABTIMKAB-2.1.1.01
				Penerapan Teknologi Pertanian	TANJABTIMKAB-2.1.1.02
		➢ Meingkatkan produksi benih pada balai benih induk tanaman pangan	TANJABTIMKAB-2.1.2	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Padi dan Palawija	TANJABTIMKAB-2.1.3.01
		➢ Pengembangan tanaman hortikultura	TANJABTIMKAB-2.1.3	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	TANJABTIMKAB-2.1.3.01
		➢ Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian	TANJABTIMKAB-2.1.4	Peningkatan Kesejahtraan Petani	TANJABTIMKAB-2.1.4.01
		➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil pertanian	TANJABTIMKAB-2.1.5	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	TANJABTIMKAB-2.1.5.01
		➢ Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak,IB dan pelayanan keswan	TANJABTIMKAB-2.1.6	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	TANJABTIMKAB-2.1.6.01
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	TANJABTIMKAB-2.1.6.02
				Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	TANJABTIMKAB-2.1.6.03

		➢ Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	TANJABTIMKAB-2.1.7	Peningkatan Produksi Perkebunan	TANJABTIMKAB-2.1.7.01
		➢ Optimalisasi pasar dan promosi hasil perkebunan	TANJABTIMKAB-2.1.8	Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	TANJABTIMKAB-2.1.8.01
		➢ Pemanfaatan lahan perkarangan masyarakat	TANJABTIMKAB-2.1.9	Peningkatan ketahanan pangan	TANJABTIMKAB-2.1.9.01
		➢ Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	TANJABTIMKAB-2.1.10	Peningkatan ketahanan pangan	TANJABTIMKAB-2.1.10.01
2	TANJABTIMKAB-2.2	➢ Fasilitasi dan pendampingan koperasi dan UKM	TANJABTIMKAB-2.2.1	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	TANJABTIMKAB-2.2.1.01
				Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM	TANJABTIMKAB-2.2.1.02
				Peningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	TANJABTIMKAB-2.2.1.03
3	TANJABTIMKAB-2.3	➢ Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Industri Kecil dan Menengah	TANJABTIMKAB-2.3.1	Pengembangan dan Peningkatan Industri Kecil Menengah	TANJABTIMKAB-2.3.1.01
4	TANJABTIMKAB-2.4	➢ Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan Air Laut	TANJABTIMKAB-2.4.1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	TANJABTIMKAB-2.4.1.01
				Pengembangan Budidaya Perikanan	TANJABTIMKAB-2.4.1.02
				Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	TANJABTIMKAB-2.4.1.03
				Pengembangan Perikanan Tangkap	TANJABTIMKAB-2.4.1.04
5	TANJABTIMKAB-2.5	➢ Meningkatkan Keragaman dan Kualitas Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Mendorong Pemerataan dan Daya Saing Kegiatan Kepariwisataan	TANJABTIMKAB-2.5.1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	TANJABTIMKAB-2.5.1.01

				Pengembangan Destinasi Pariwisata	TANJABTIMKAB-2.5.1.02
				Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan	TANJABTIMKAB-2.5.1.03
				Pembangunan Jalan dan Jembatan	TANJABTIMKAB-2.5.1.04
				Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	TANJABTIMKAB-2.5.1.05
				Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	TANJABTIMKAB-2.5.1.06
				Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	TANJABTIMKAB-2.5.1.07
				Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	TANJABTIMKAB-2.5.1.08
				Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	TANJABTIMKAB-2.5.1.09

MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1.	TANJABTIMKAB-3.1	➢ Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	TANJABTIMKAB-3.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	TANJABTIMKAB-3.1.1.01
				Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	TANJABTIMKAB-3.1.1.02
				Pendidikan Non Formal	TANJABTIMKAB-3.1.1.03
		➢ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	TANJABTIMKAB-3.1.2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	TANJABTIMKAB-3.1.2.01
				Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidian	TANJABTIMKAB-3.1.2.02
				Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	TANJABTIMKAB-3.1.2.03
		➢ Menguatkan upaya kesehatan melalui pendekatan keluarga	TANJABTIMKAB-3.1.3	Penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	TANJABTIMKAB-3.1.3.01

				Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	TANJABTIMKAB-3.1.3.02
				Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	TANJABTIMKAB-3.1.3.03
				Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	TANJABTIMKAB-3.1.3.04
				Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	TANJABTIMKAB-3.1.3.05
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dan Balita	TANJABTIMKAB-3.1.3.06
				Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan	TANJABTIMKAB-3.1.3.07
				Perbaikan Gizi Masyarakat	TANJABTIMKAB-3.1.3.08
				Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Anak	TANJABTIMKAB-3.1.3.09
				Pengembangan Kesehatan Msyarakat	TANJABTIMKAB-3.1.3.10
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	TANJABTIMKAB-3.1.3.11
2	TANJABTIMKAB-3.2	➢ Meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan gender dan anak	TANJABTIMKAB-3.2.1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	TANJABTIMKAB-3.2.1.01
				Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	TANJABTIMKAB-3.2.1.02
				Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	TANJABTIMKAB-3.2.1.03
3	TANJABTIMKAB-3.3	➢ Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana	TANJABTIMKAB-3.3.1	Keluarga Berencana	TANJABTIMKAB-3.3.1.01

				Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	TANJABTIMKAB-3.3.1.02
				Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	TANJABTIMKAB-3.3.1.03
				Pengendalian Penduduk	TANJABTIMKAB-3.3.1.04

MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1.	TANJABTIMKAB-4.1	➢ Peningkatan Kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya	TANJABTIMKAB-4.1.1	Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi	TANJABTIMKAB-4.1.1.01
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	TANJABTIMKAB-4.1.1.02
				Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	TANJABTIMKAB-4.1.1.03
2.	TANJABTIMKAB-4.2	➢ Pengendalian Kebijakan Daerah	TANJABTIMKAB-4.2.1	Pendidikan Politik Masyarakat	TANJABTIMKAB-4.2.1.01
		➢ Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	TANJABTIMKAB-4.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	TANJABTIMKAB-4.2.2.01
				Peningkatan Pembarantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	TANJABTIMKAB-4.2.2.02
				Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah	TANJABTIMKAB-4.2.2.03
				Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	TANJABTIMKAB-4.2.2.04

MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokrasi

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1.	TANJABTIMKAB-5.1	➢ Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa	TANJABTIMKAB-5.1.1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	TANJABTIMKAB-5.1.1.01
				Upaya Kesehatan Masyarakat	TANJABTIMKAB-5.1.1.02
				Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TANJABTIMKAB-5.1.1.03

				Penataan Pelayanan Publik	TANJABTIMKAB-5.1.1.04
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	TANJABTIMKAB-5.1.1.05
				pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	TANJABTIMKAB-5.1.1.06
				Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	TANJABTIMKAB-5.1.1.07
				Upaya Peningkatan Kesehatan Rujukan	TANJABTIMKAB-5.1.1.08
				Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	TANJABTIMKAB-5.1.1.09
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	TANJABTIMKAB-5.1.1.10
				Penataan Pemanfaatan Adminstrasi Kependudukan	TANJABTIMKAB-5.1.1.11
		➢ Meningkatkan kemandirian desa	TANJABTIMKAB-5.1.2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	TANJABTIMKAB-5.1.2.01
				Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	TANJABTIMKAB-5.1.2.02
2.	TANJABTIMKAB-5.2	➢ Peningkatan investasi melalui pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu	TANJABTIMKAB-5.2.1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	TANJABTIMKAB-5.2.1.01
3.	TANJABTIMKAB-5.3	➢ Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, tata naskah, data dan informasi pembangunan serta kinerja	TANJABTIMKAB-5.3.1	Pengembangan E-Government	TANJABTIMKAB-5.3.1.01
				Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	TANJABTIMKAB-5.3.1.02
4.	TANJABTIMKAB-5.4	➢ Peningkatan capaian penilaian SAKIP dan maturitas SPIP	TANJABTIMKAB-5.4.1	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	TANJABTIMKAB-5.4.1.01

				Penataan Daerah Otonomi Baru	TANJABTIMKAB-5.4.1.02
		➢ Peningkatan kapabilitas internal audit	TANJABTIMKAB-5.4.2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	TANJABTIMKAB-5.4.2.01
		➢ Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	TANJABTIMKAB-5.4.3	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	TANJABTIMKAB-5.4.3.01
				Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	TANJABTIMKAB-5.4.3.02

PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

LEVEL 0

PROSES UTAMA

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

MANAJERIAL

- PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN MENUJU PUSAT PEMERINTAHAN DAN KAWASAN STRATEGIS (TANJABTIMKAB-1..1.1)
- PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG MENDUKUNG PRODUKSI PERTANIAN (TANJABTIMKAB-1.2.1)
- PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG (TANJABTIMKAB-1.3.1)
- PENINGKATAN PENANGANAN PENANGGULANGAN PERMUKIMAN KUMUH (TANJABTIMKAB-1.4.1)
- PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (TANJABTIMKAB-1.5.1)
- PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN LIMBAH (TANJABTIMKAB-1.6.1)
- PEMASANGAN PERLENGKAPAN ALAT KESELAMATAN LALU LINTAS (TANJABTIMKAB-1.7.1)

UTAMA

- PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DENGAN KONDISI MANTAP TANJABTIMKAB-1.1
- PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA AIR PENUNJANG KEDAULATAN PANGAN TANJABTIMKAB-1.2
- PENINGKATAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW TANJABTIMKAB-1.3
- PENGURANGAN PERMUKIMAN KUMUH TANJABTIMKAB-1.4
- PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI TANJABTIMKAB-1.5
- PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN TANJABTIMKAB-1.6
- PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT MAUPUN AIR TANJABTIMKAB-1.7

LAINNYA

- PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN (TANJABTIMKAB-1.1.2)
- UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA BERKALA (TANJABTIMKAB-1.7.2)
- PEMBANGUNAN DERMAGA DAN TAMBATAN PERAHU PADA DAERAH PERAIRAN (TANJABTIMKAB-1.7.3)

PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

MANAJERIAL

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN MENUJU PUSAT PEMERINTAHAN DAN KAWASAN STRATEGIS (TANJABTIMKAB-1..1.1) DINAS PUPR DINAS PERKIM - PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN - PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG MENDUKUNG PRODUKSI PERTANIAN (TANJABTIMKAB-1.2.1) DINAS PUPR - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG (TANJABTIMKAB-1.3.1) DINAS PUPR - PEMANFAATAN TATA RUANG - PENGENDALIAN TATA RUANG - PERENCANAAN TATA RUANG	PENINGKATAN PENANGANAN PENANGGULANGAN PERMUKIMAN KUMUH (TANJABTIMKAB-1.4.1) DINAS PERKIM - PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN - PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (TANJABTIMKAB-1.5.1) DINAS PERKIM DINAS KESEHATAN - PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH - PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT - PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN LIMBAH (TANJABTIMKAB-1.6.1) DINAS LH - PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH - PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMASANGAN PERLENGKAPAN ALAT KESELAMATAN LALU LINTAS (TANJABTIMKAB-1.7.1) DINAS PERHUBUNGAN - PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN - PENERANGAN LAMPU KOTA - PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS - PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

UTAMA

PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DENGAN KONDISI MANTAP (TANJABTIMKAB-1.1) DINAS PUPR DINAS PERKIM	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA AIR PENUNJANG KEDAULATAN PANGAN (TANJABTIMKAB-1.2) DINAS PUPR	PENINGKATAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW (TANJABTIMKAB-1.3) DINAS PUPR	PENGURANGAN PERMUKIMAN KUMUH (TANJABTIMKAB-1.4) DINAS PERKIM	PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI (TANJABTIMKAB-1.5) DINAS PERKIM DINAS KESEHATAN	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN (TANJABTIMKAB-1.6) DINAS LH	PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT MAUPUN AIR (TANJABTIMKAB-1.7) DINAS PERHUBUNGAN

LAINNYA

PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN (TANJABTIMKAB-1.1.2) DINAS PUPR - PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG	UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA BERKALA (TANJABTIMKAB-1.7.2) DINAS PERHUBUNGAN - PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	PEMBANGUNAN DERMAGA DAN TAMBATAN PERAHU PADA DAERAH PERAIRAN (TANJABTIMKAB-1.7.3) DINAS PERHUBUNGAN - PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

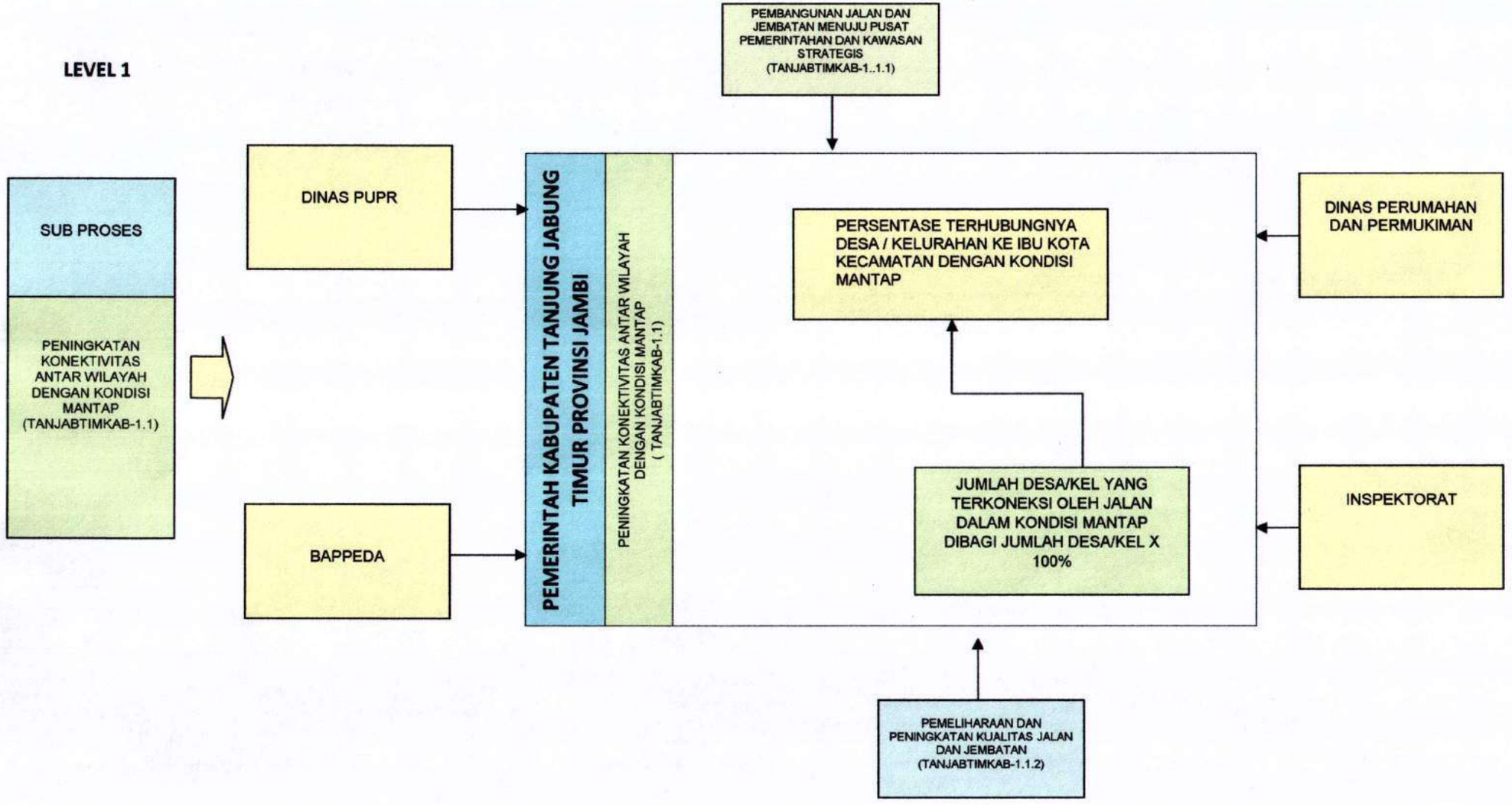

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DENGAN KONDISI MANTAP (TANJABTIMKAB-1.1)

LEVEL 2

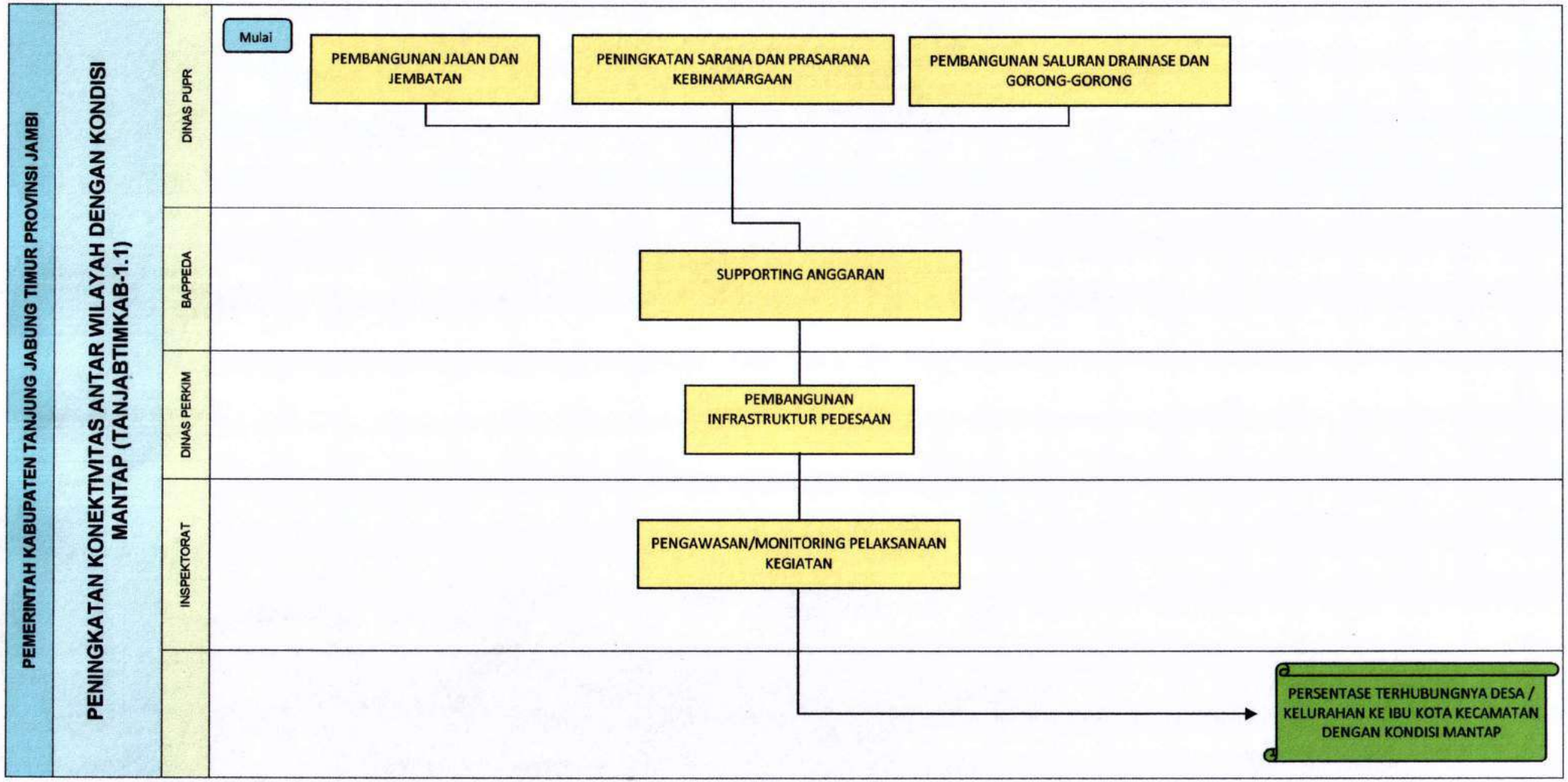

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

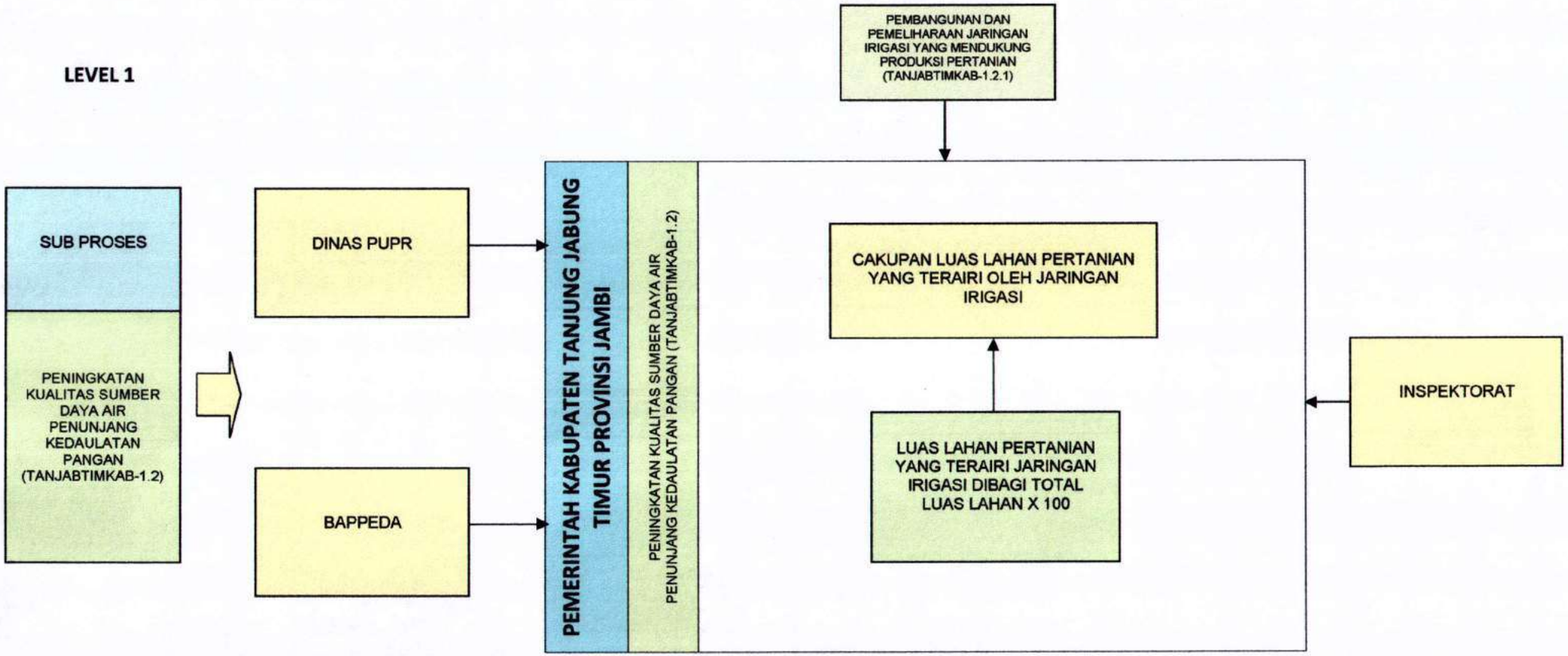

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA AIR PENUNJANG KEDAULATAN PANGAN (TANJABTIMKAB-1.2)

LEVEL 2

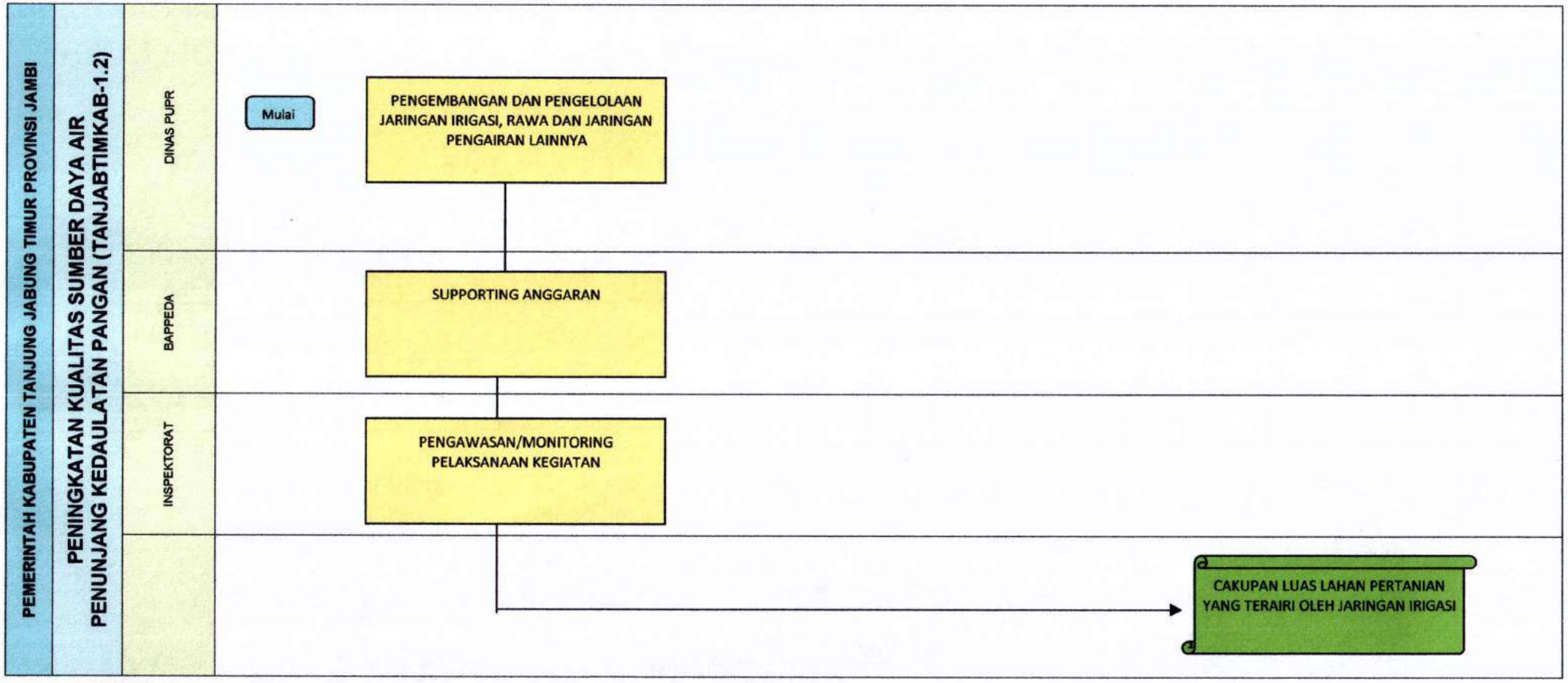

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.3

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

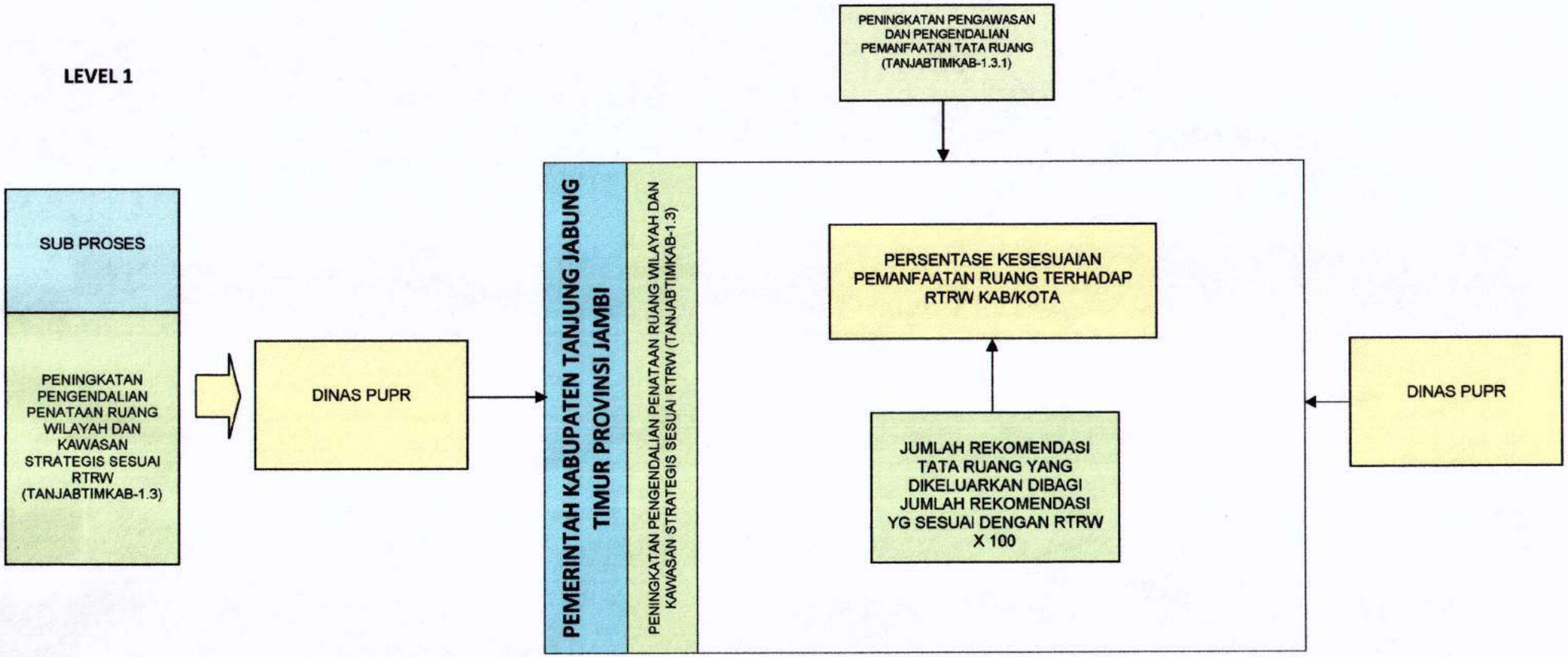

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW (TANJABTIMKAB-1.3)

LEVEL 2

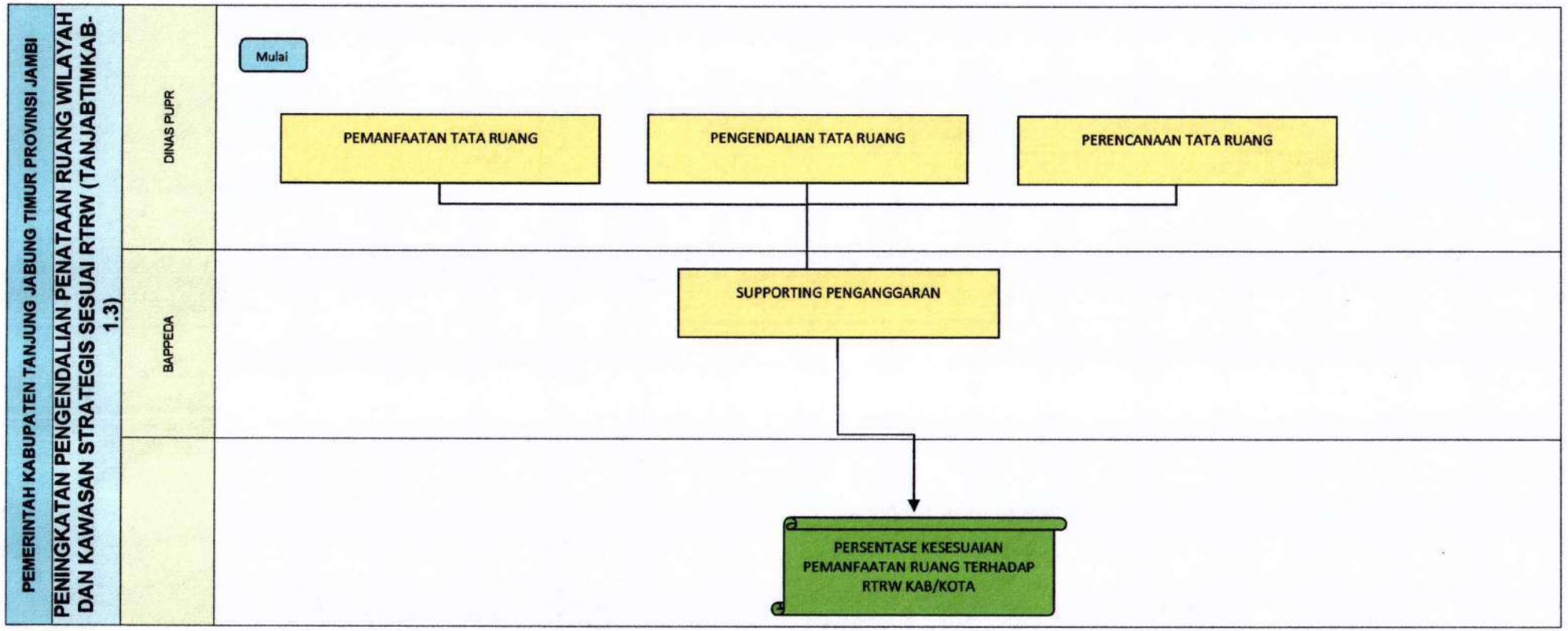

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.4

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

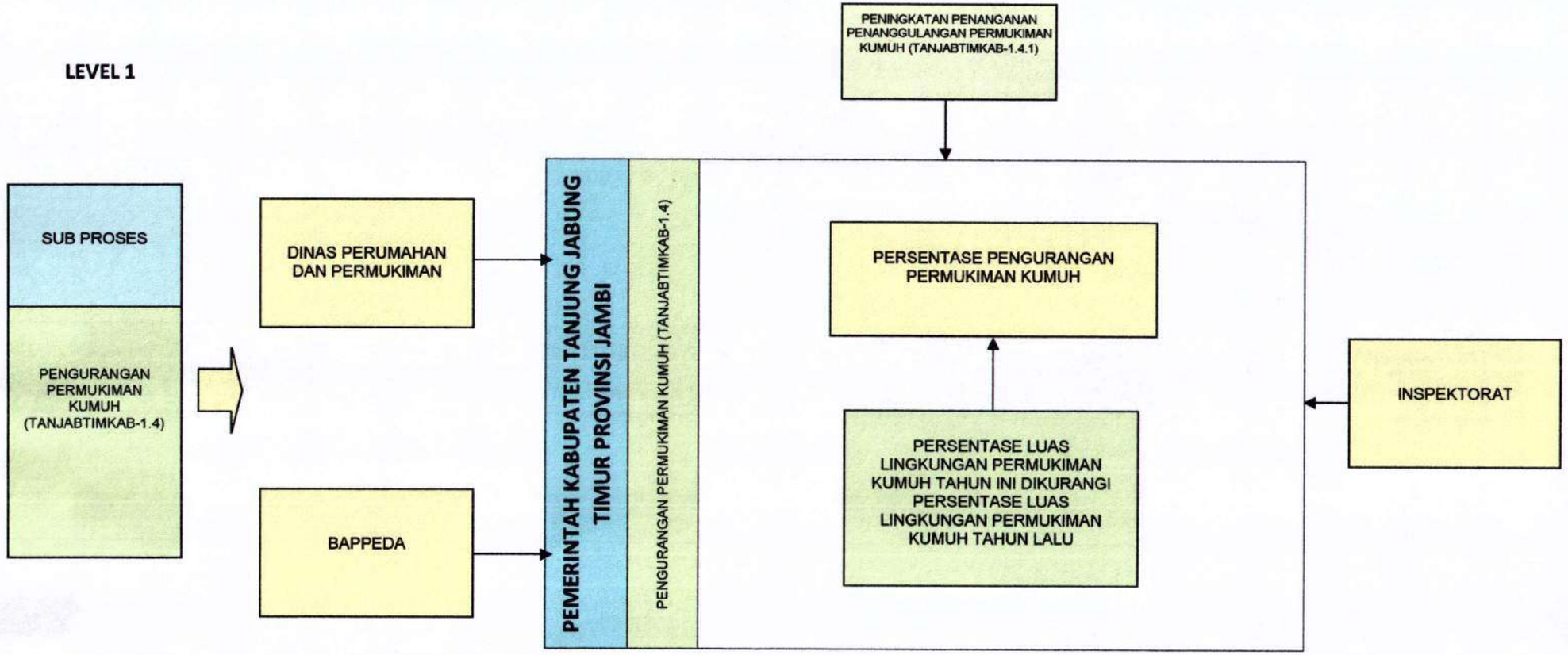

PETA LINTAS FUNGSI

PENGURANGAN PERMUKIMAN KUMUH (TANJABTIMKAB-1.4)

LEVEL 2

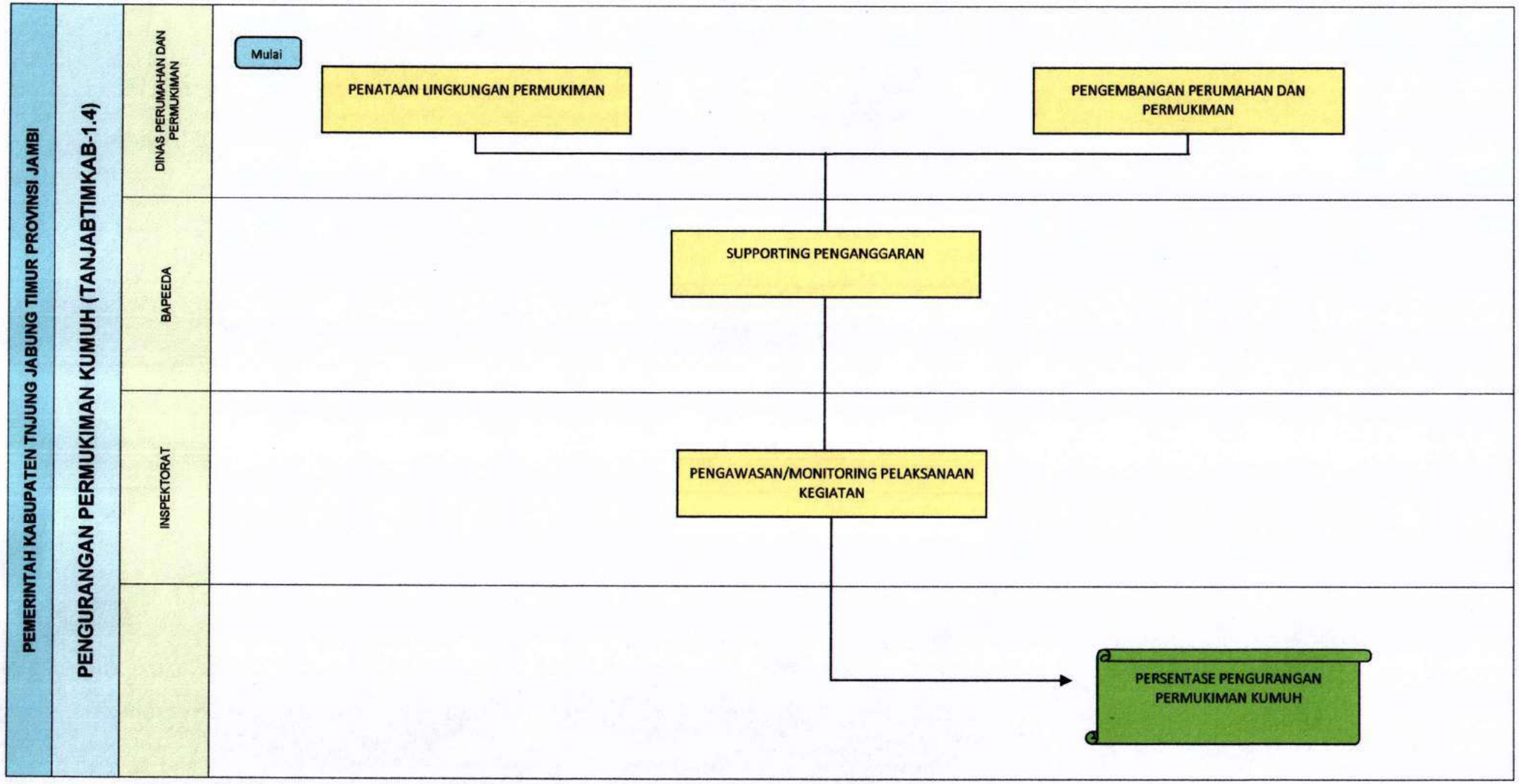

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.5

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

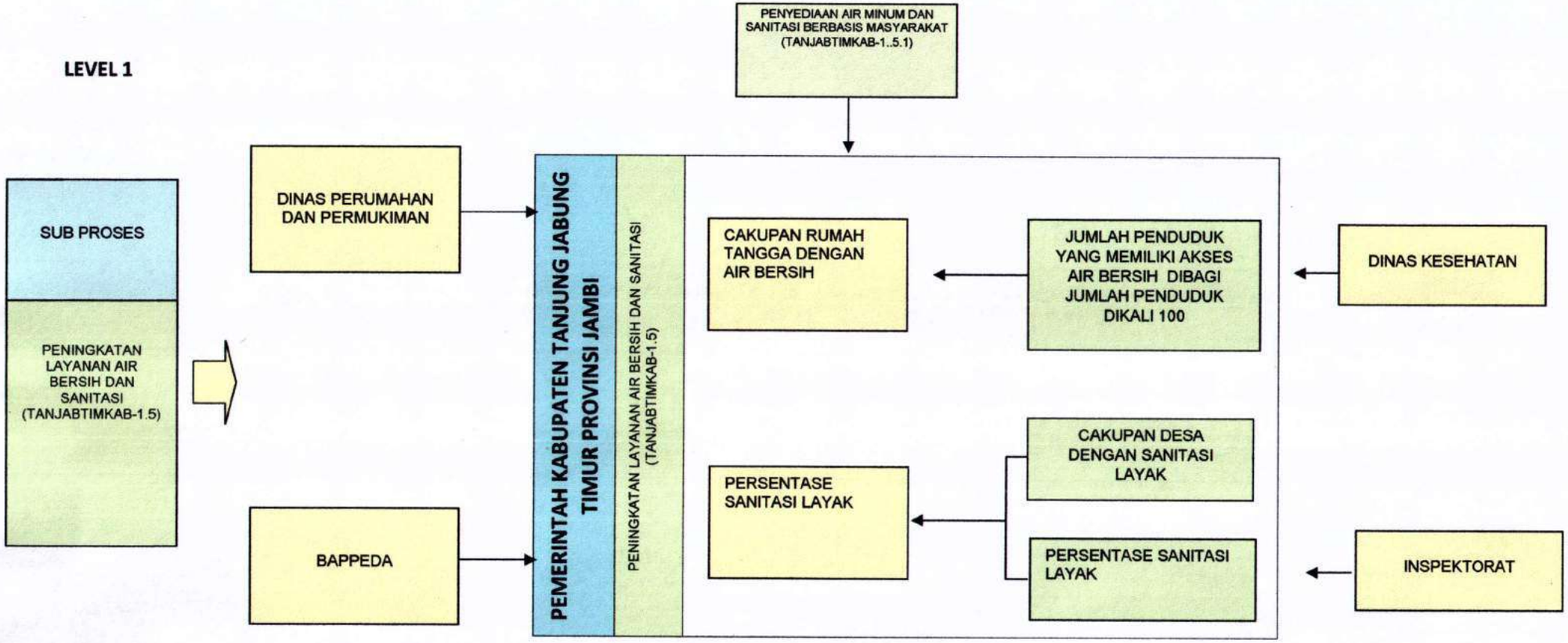

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI (TANJABTIMKAB-1.5)

LEVEL 2

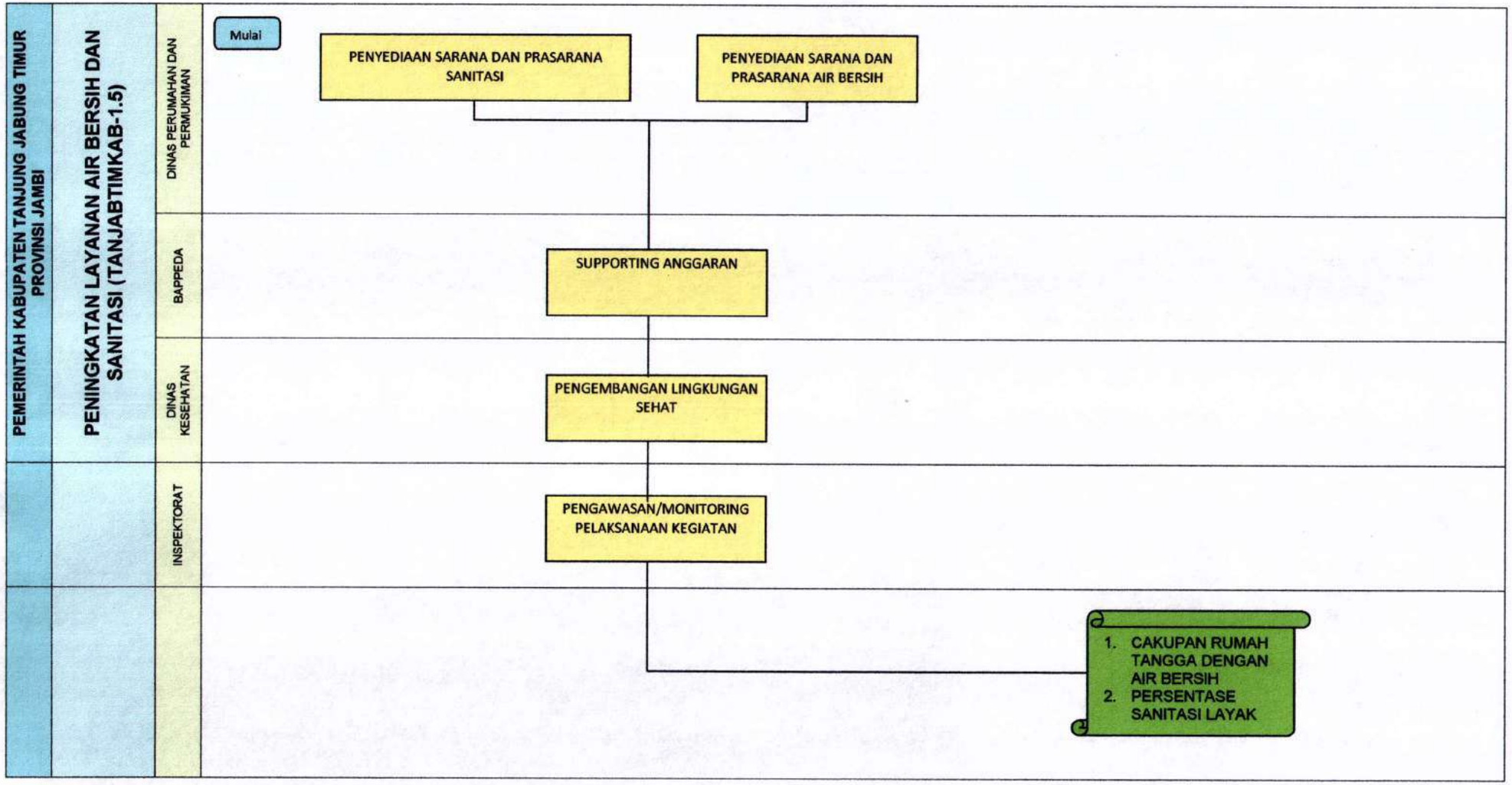

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.6

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

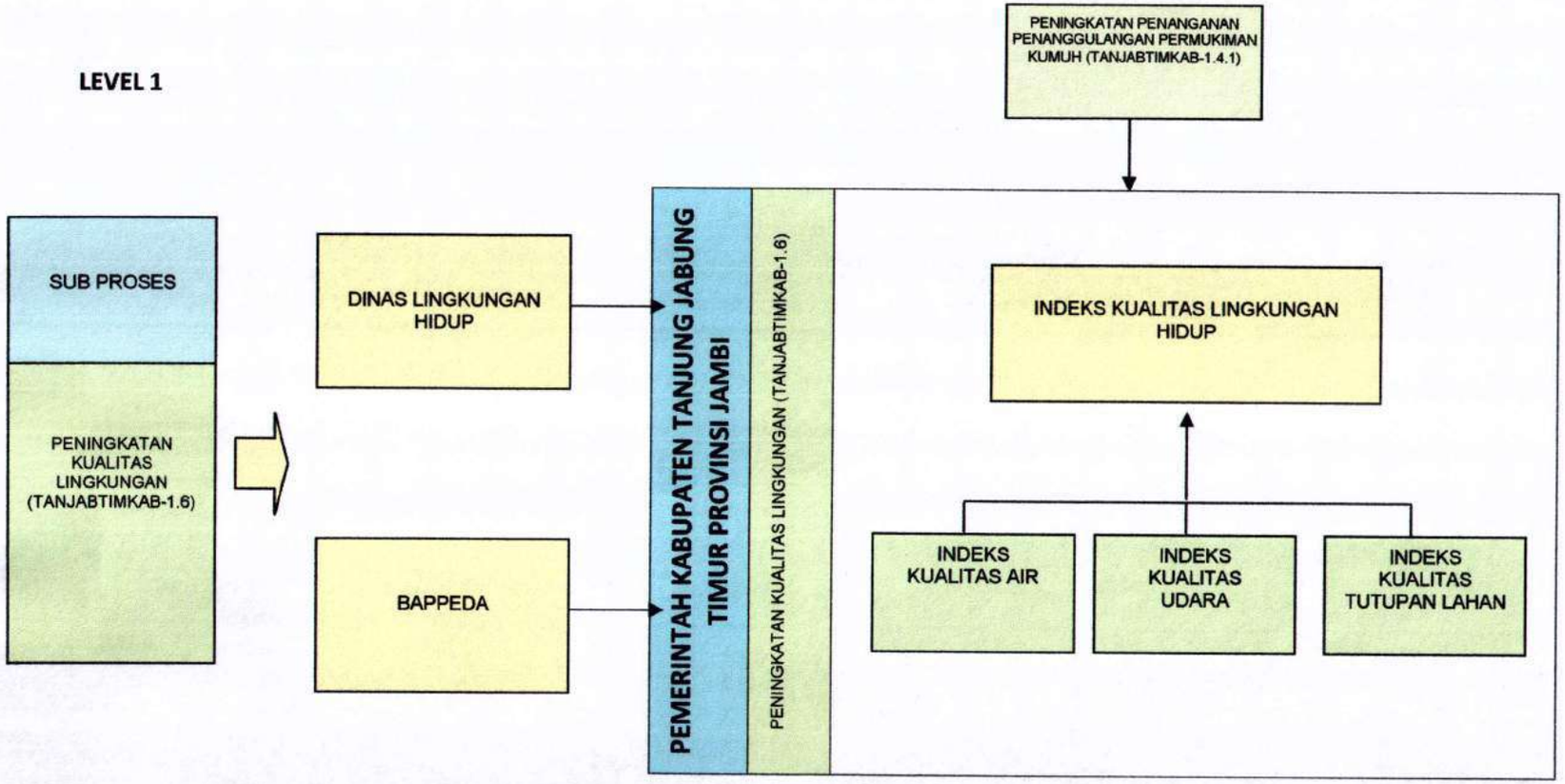

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN (TANJABTIMKAB-1.6)

LEVEL 2

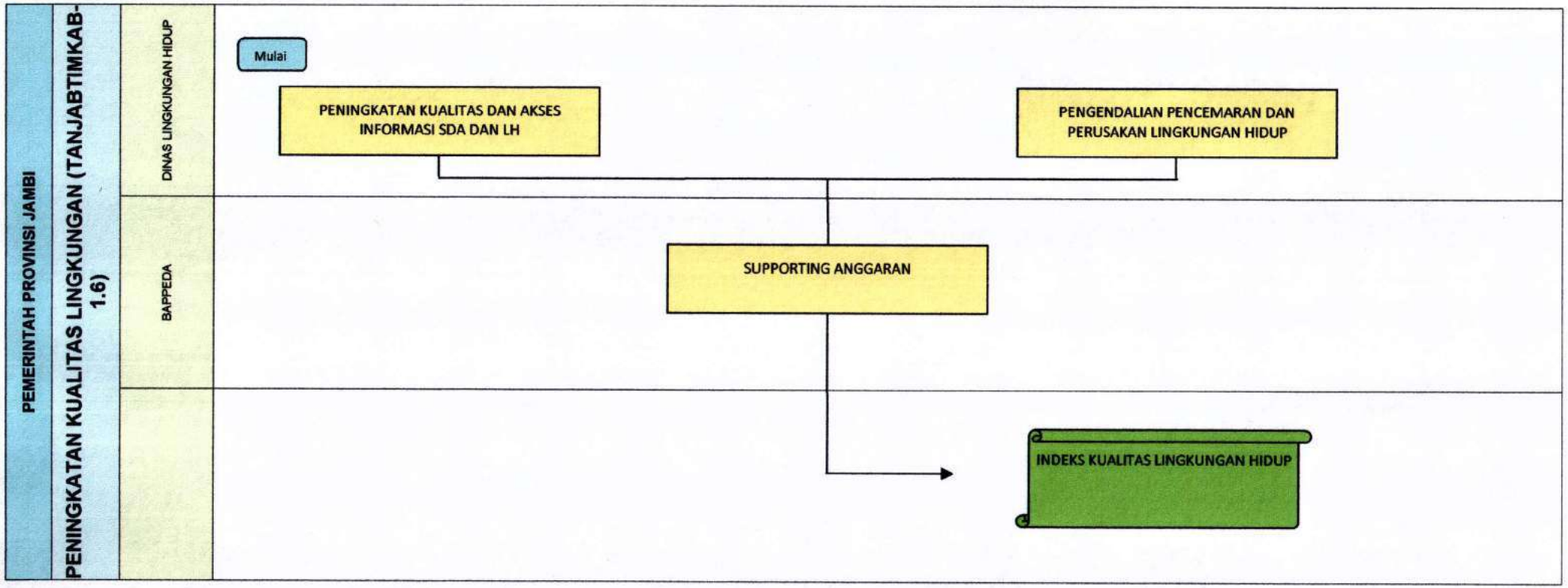

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-1.7

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

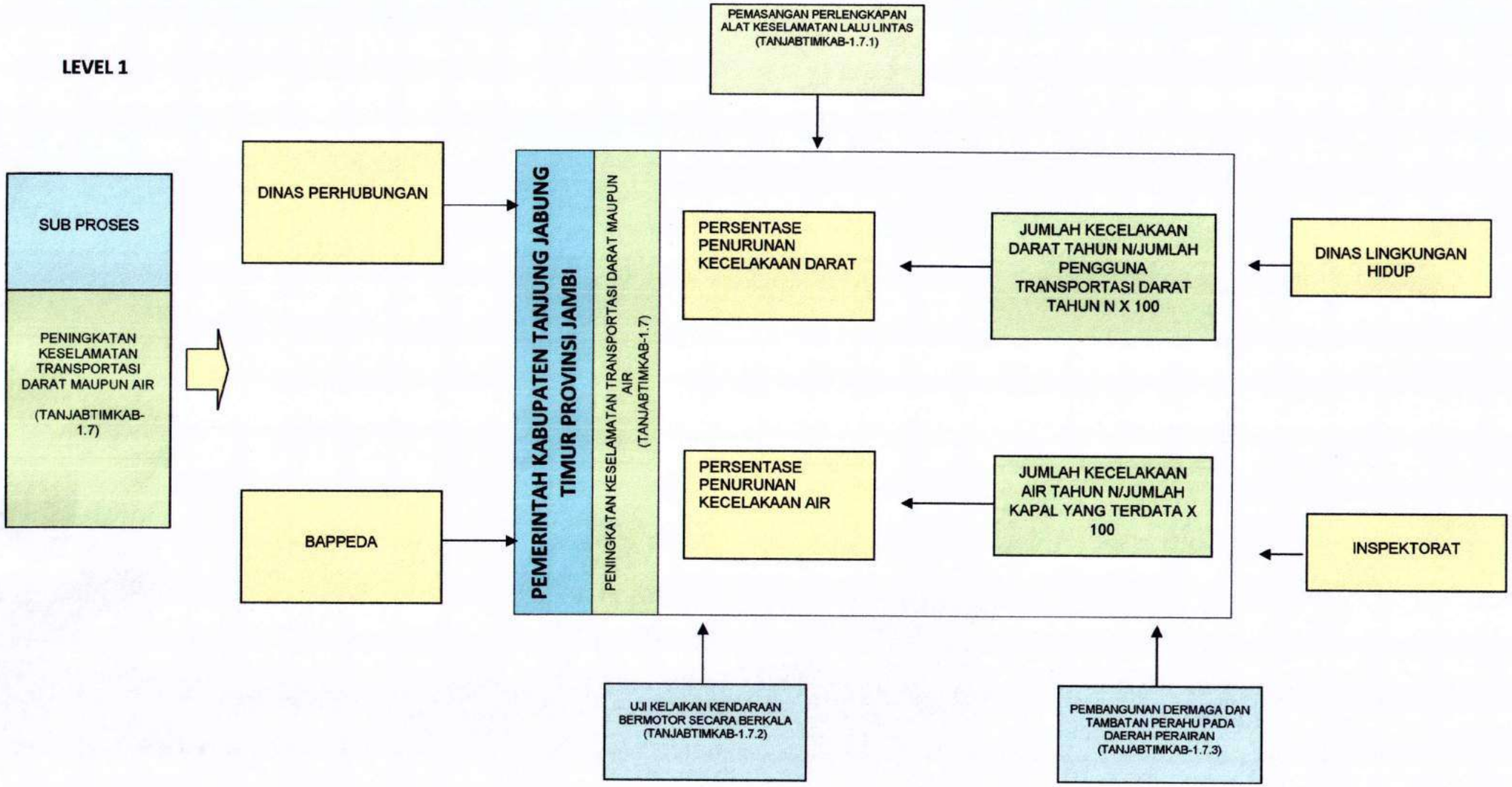

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT MAUPUN AIR (TANJABTIMKAB-1.7)

LEVEL 2

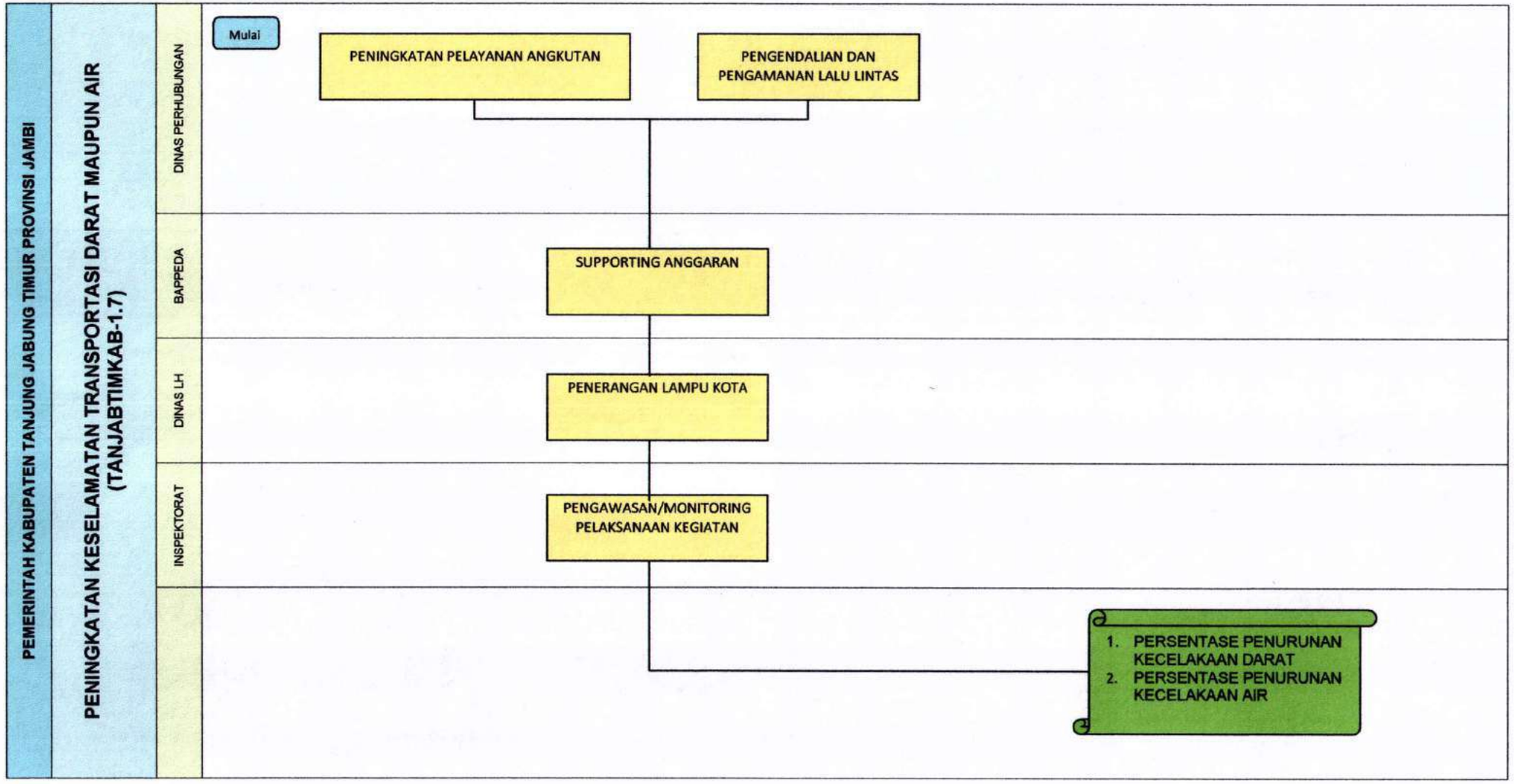

PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

LEVEL 0

PROSES UTAMA

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, TERDIDIK, BERBUDAYA, AGAMIS, DAN BERKESETARAAN GENder.

MANAJERIAL

- PENINGKATAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA (TANJABTIMKAB-2.1.1)
- MENGOPTIMALKAN PRODUKSI TERNAK MELALUI BALAI BENIH TERNAK, IB DAN PELAYANAN KESWAN (TANJABTIMKAB-2.1.6)
- MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN (TANJABTIMKAB-2.1.7)
- FASILITASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI DAN UKM (TANJABTIMKAB-2.2.1)
- PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (TANJABTIMKAB-2.3.1)
- PENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA DAN AIR LAUT (TANJABTIMKAB-2.4.1)
- MENINGKATKAN KERAGAMAN DAN KUALITAS DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PEMERATAN DAN DAYA SAING KEGIATAN KEPARIWISATAAN (TANJABTIMKAB-1.7.1)

UTAMA

- PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS AGROBISNIS TANJABTIMKAB-2.1
- PENINGKATAN PERANAN KOPERASI TERHADAP EKONOMI KERAKYATAN TANJABTIMKAB-2.2
- PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI KECIL MENENGAH TANJABTIMKAB-2.3
- PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN TANJABTIMKAB-2.4
- PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA TANJABTIMKAB-2.5

LAINNYA

- MENINGKATKAN PRODUKSI BENIH PADA BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN (TANJABTIMKAB-2.1.2)
- PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA (TANJABTIMKAB-2.1.3)
- MENINGKATKAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN (TANJABTIMKAB-2.1.4)
- OPTIMALISASI PASAR DAN PROMOSI HASIL PERTANIAN (TANJABTIMKAB-2.1.5)
- OPTIMALISASI PASAR DAN PROMOSI HASIL PERKEBUNAN (TANJABTIMKAB-2.1.8)
- PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MASYARAKAT (TANJABTIMKAB-2.1.9)
- PEMBERDAYAAN DESA MANDIRI PANGAN (TANJABTIMKAB-2.1.10)

PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

MANAJERIAL

PENINGKATAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA (TANJABTIMKAB-2.1.1)

DINAS TPH

- PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA
- PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN

MENGOPTIMALKAN PRODUKSI TERNAK MELALUI BALAI BENIH TERNAK, IB DAN PELAYANAN KESWAN (TANJABTIMKAB-2.1.6)

DINAS BUNNAK

- PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
- PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK
- PENCIPTAAN TEKHNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN (TANJABTIMKAB-2.1.7)

DINAS BUNNAK

- PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI DAN UKM (TANJABTIMKAB-2.2.1)

DINAS KOP UKM

- PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
- PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM
- PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (TANJABTIMKAB-2.3.1)

DINAS PERINDAG

- PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

PENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA DAN AIR LAUT (TANJABTIMKAB-2.4.1)

DINAS PERIKANAN

- PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
- PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
- PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
- PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

MENINGKATKAN KERAGAMAN DAN KUALITAS DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PEMERATAN DAN DAYA SAING KEGIATAN KEPARIWISATAAN (TANJABTIMKAB-1.7.1)

DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PUPR, DINAS PERKIM, DINAS LH, SATPOL PP DAMKAR

- PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
- PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
- PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
- PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
- PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
- PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
- PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
- PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

UTAMA

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS AGROBISNIS

TANJABTIMKAB-2.1

DINAS TPH
DINAS BUNNAK
DINAS KETAHANAN PANGAN

PENINGKATAN PENINGKATAN PERANAN KOPERASI TERHADAP EKONOMI KERAKYATAN

TANJABTIMKAB-2.2

DINAS KOP UKM

PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI KECIL MENENGAH

TANJABTIMKAB-2.3

DINAS PERINDAG

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

TANJABTIMKAB-2.4

DINAS PERIKANAN

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

TANJABTIMKAB-2.5

DINAS PARBUDPORA
DINAS PUPR
DINAS PERKIM
DINAS LH
SATPOL PP DAMKAR

LAINNYA

MENINGKATKAN PRODUKSI BENIH PADA BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN (TANJABTIMKAB-2.1.2)

DINAS TPH

PENINGKATAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PADI DAN PALAWIJA

PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA (TANJABTIMKAB-2.1.3)

DINAS TPH

PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA

MENINGKATKAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN (TANJABTIMKAB-2.1.4)

DINAS TPH

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

OPTIMALISASI PASAR DAN PROMOSI HASIL PERTANIAN (TANJABTIMKAB-2.1.5)

DINAS TPH

PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

OPTIMALISASI PASAR DAN PROMOSI HASIL PERKEBUNAN (TANJABTIMKAB-2.1.8)

DINAS BUNNAK

PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MASYARAKAT (TANJABTIMKAB-2.1.9)

DINAS KETAHANAN PANGAN

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PEMBERDAYAAN DESA MANDIRI PANGAN (TANJABTIMKAB-2.1.10)

DINAS KETAHANAN PANGAN

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-2.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

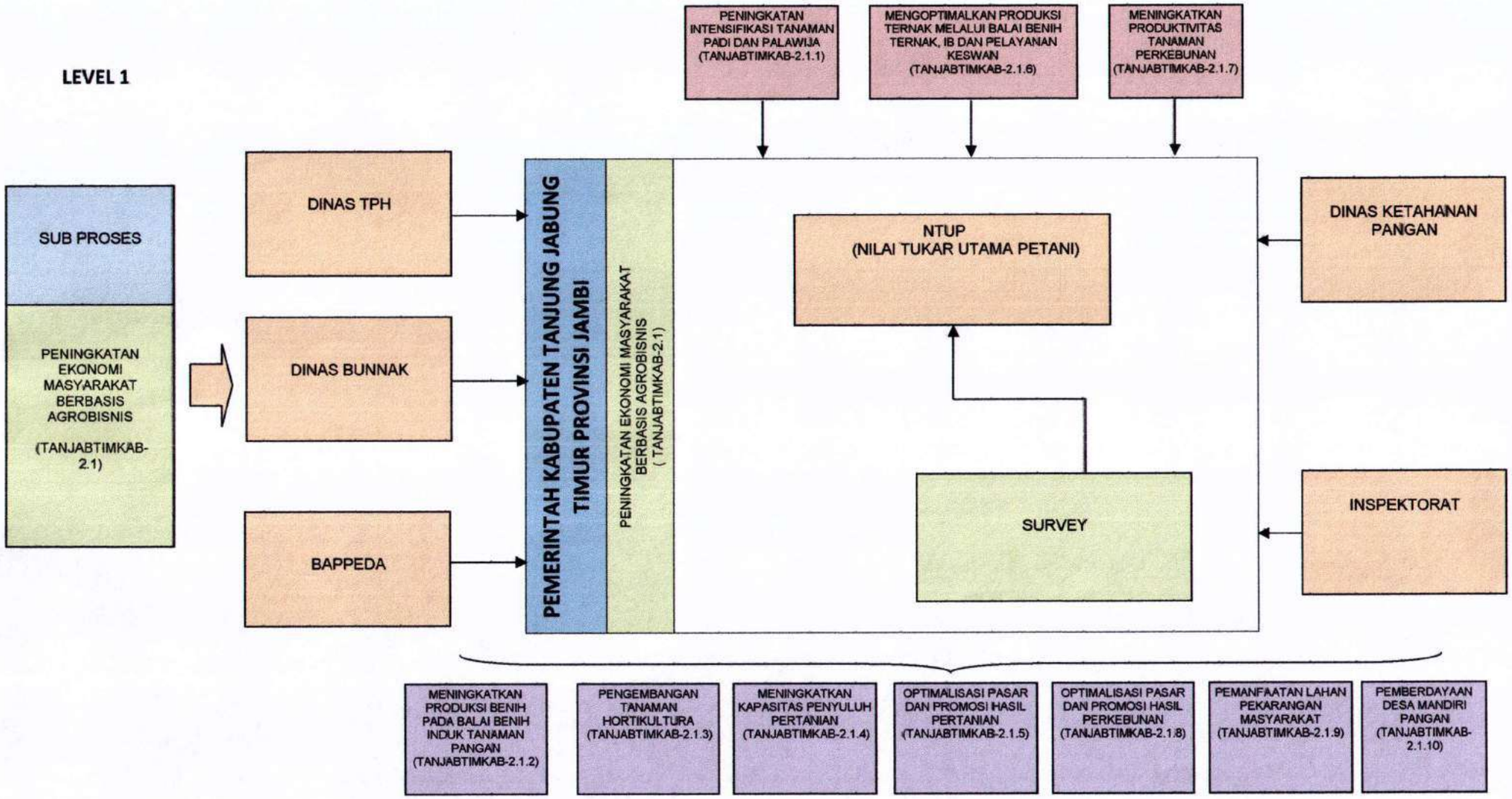

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS AGROBISNIS (TANJABTIMKAB-2.1)

LEVEL 2

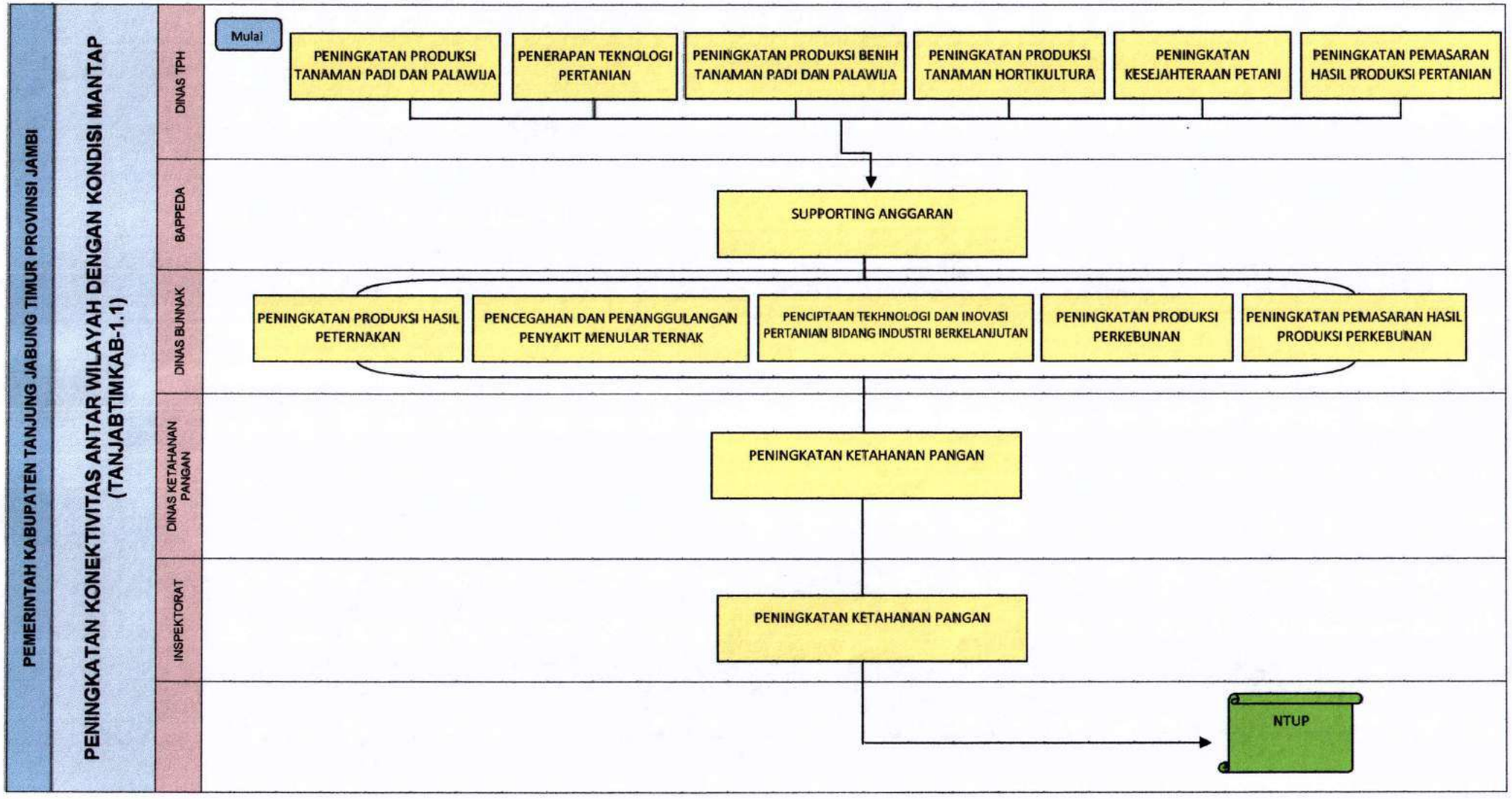

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

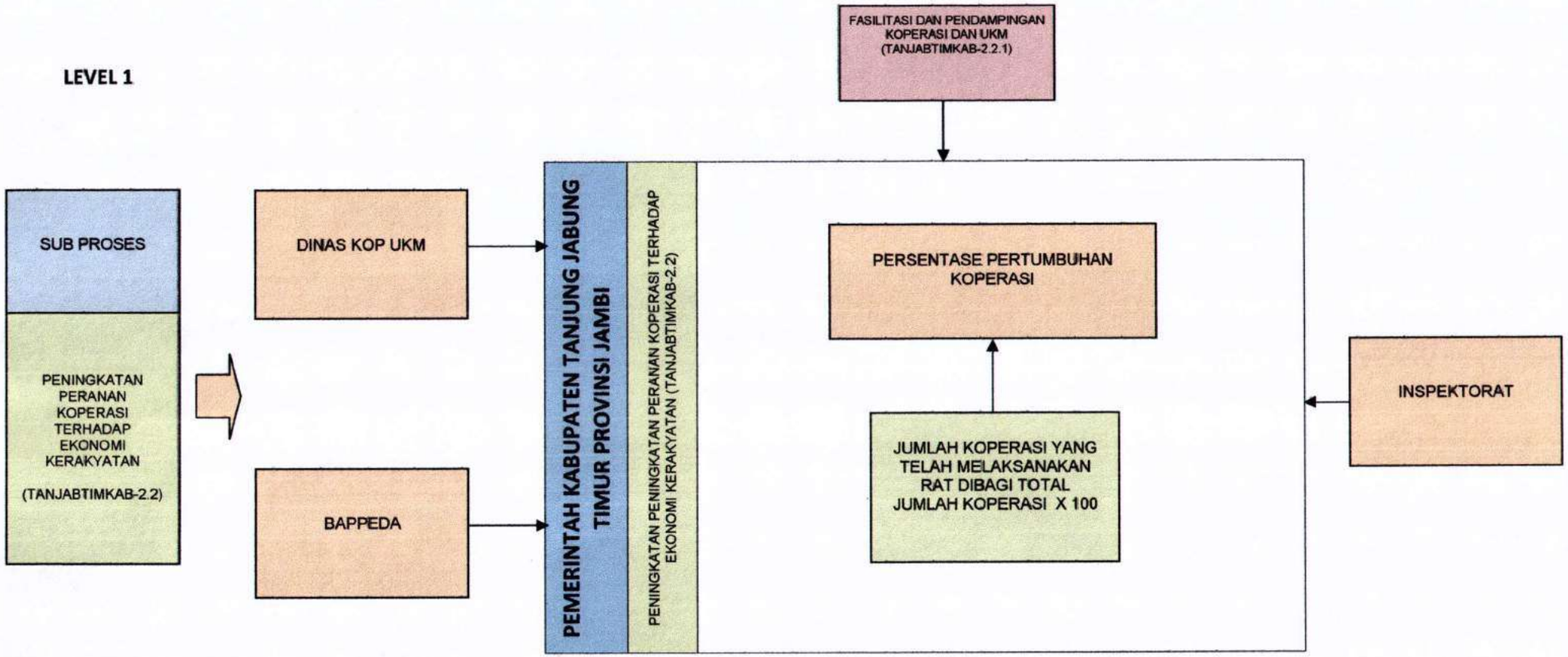

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PERANAN KOPERASI TERHADAP EKONOMI KERAKYATAN (TANJABTIMKAB-2.2)

LEVEL 2

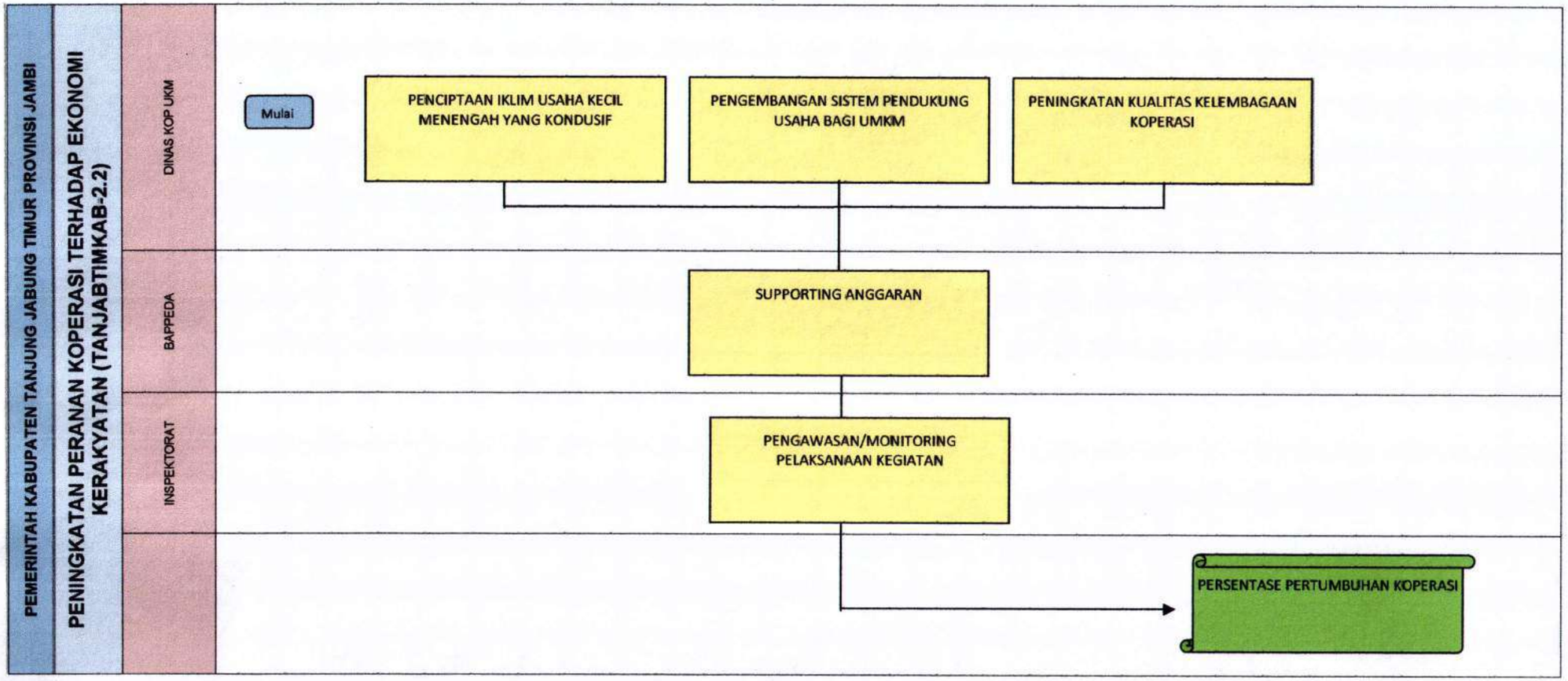

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-2.3

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

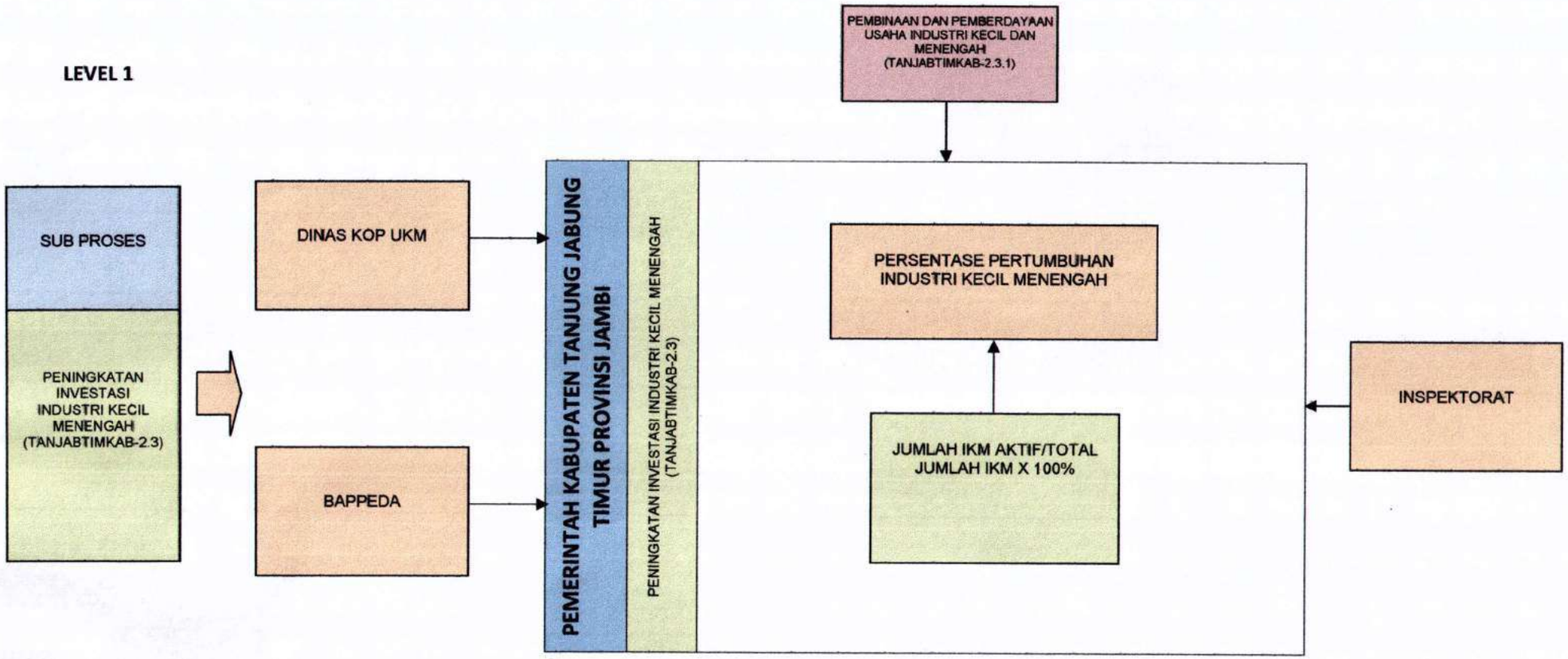

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW (TANJABTIMKAB-1.3)

LEVEL 2

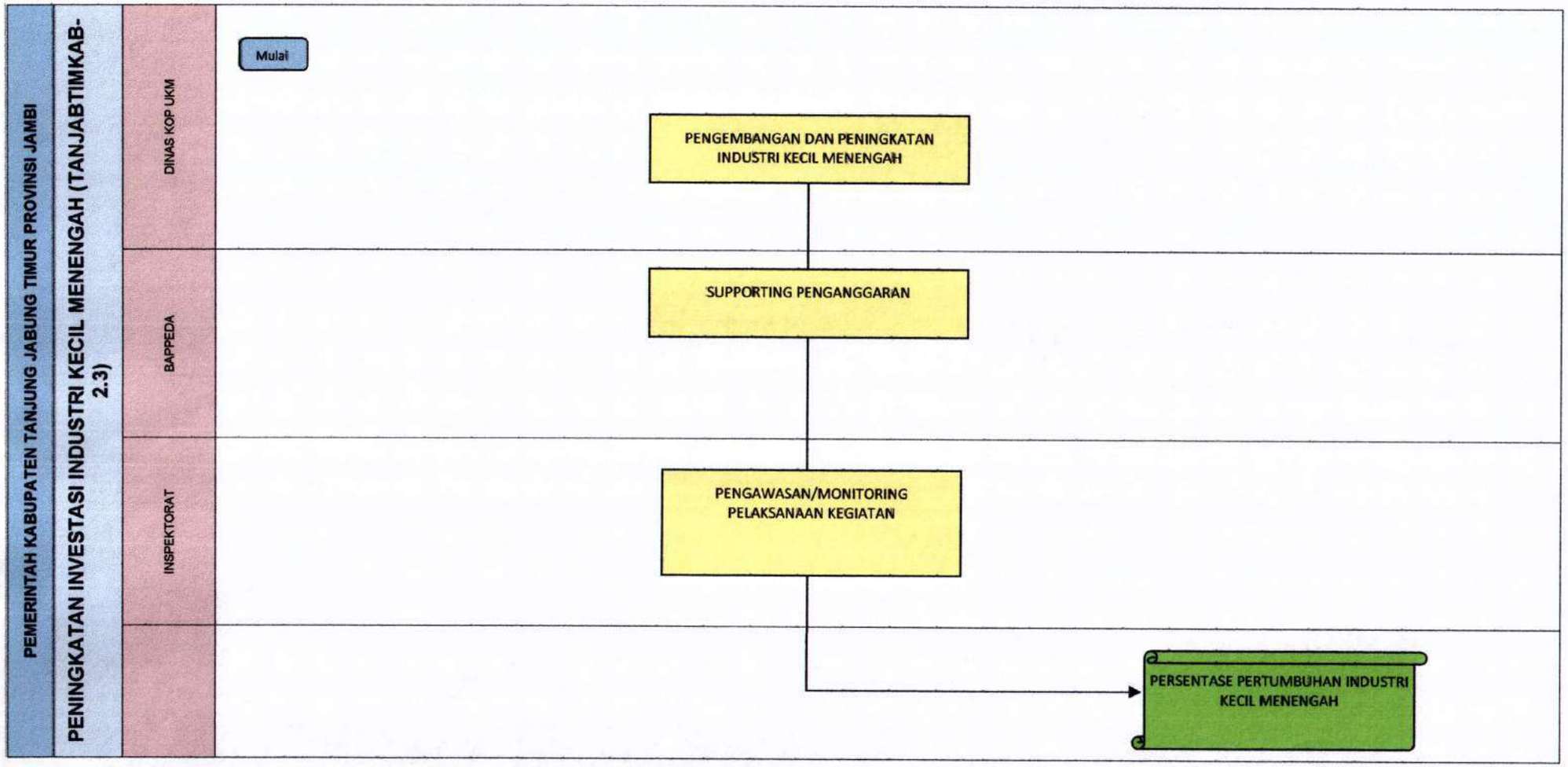

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-2.4
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

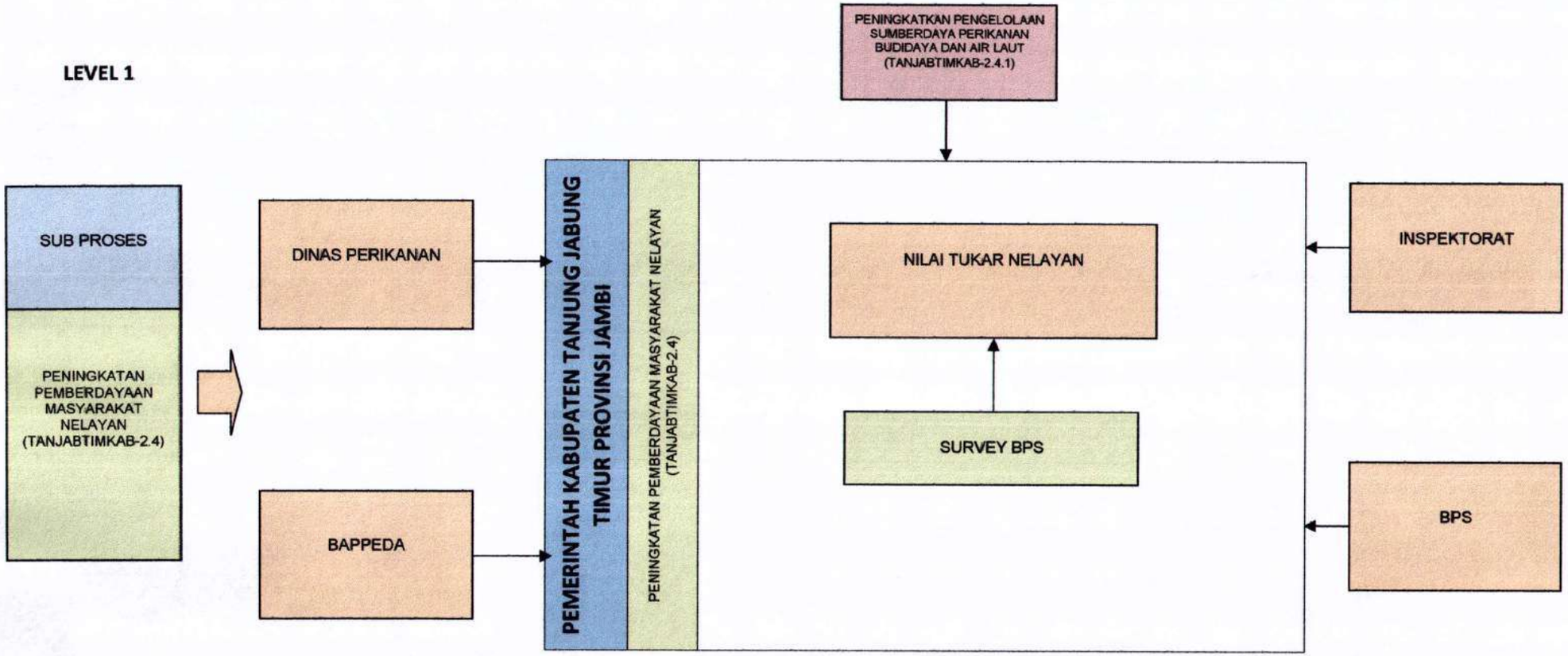

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (TANJABTIMKAB-2.4)

LEVEL 2

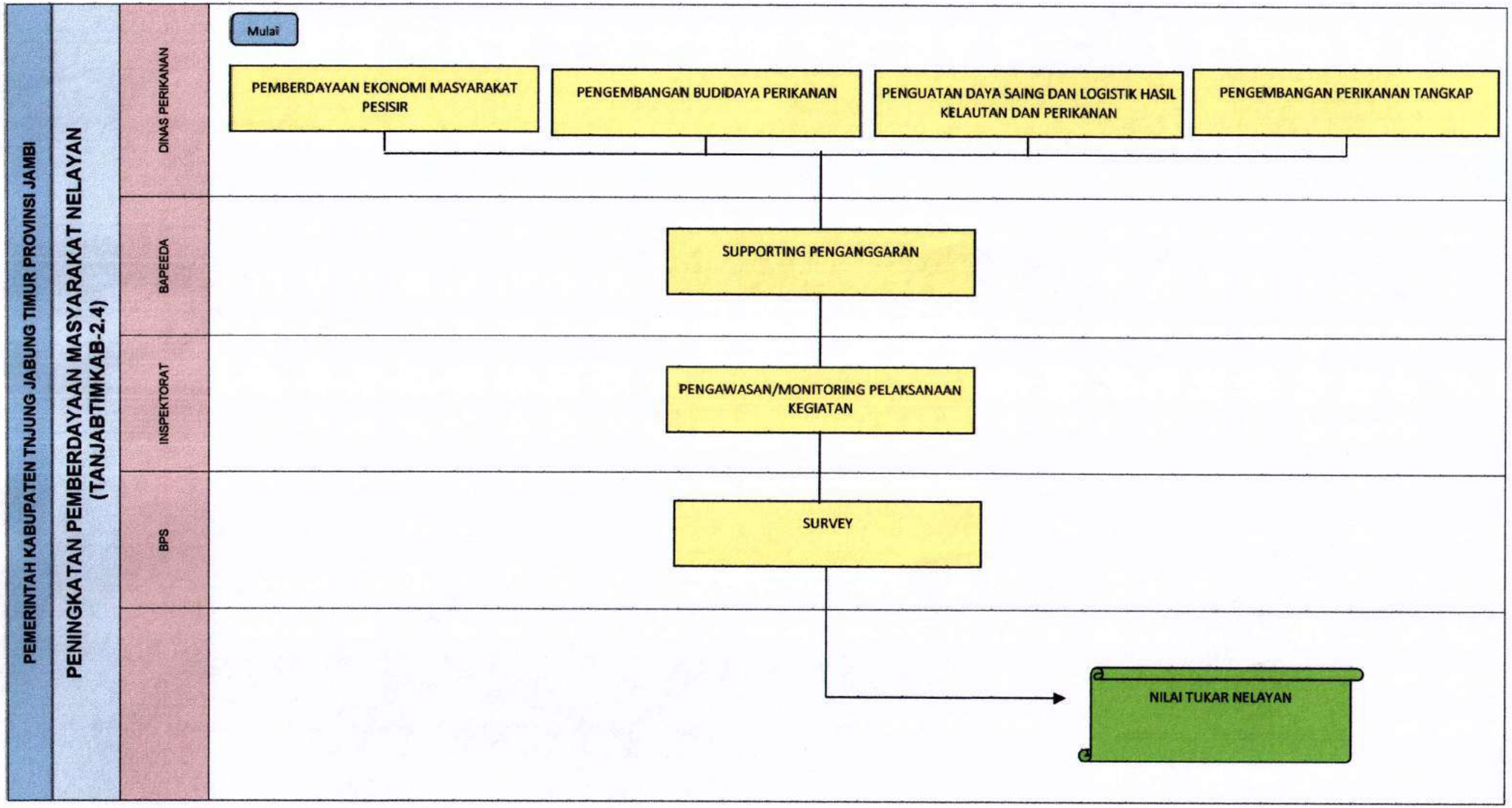

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-2.5

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

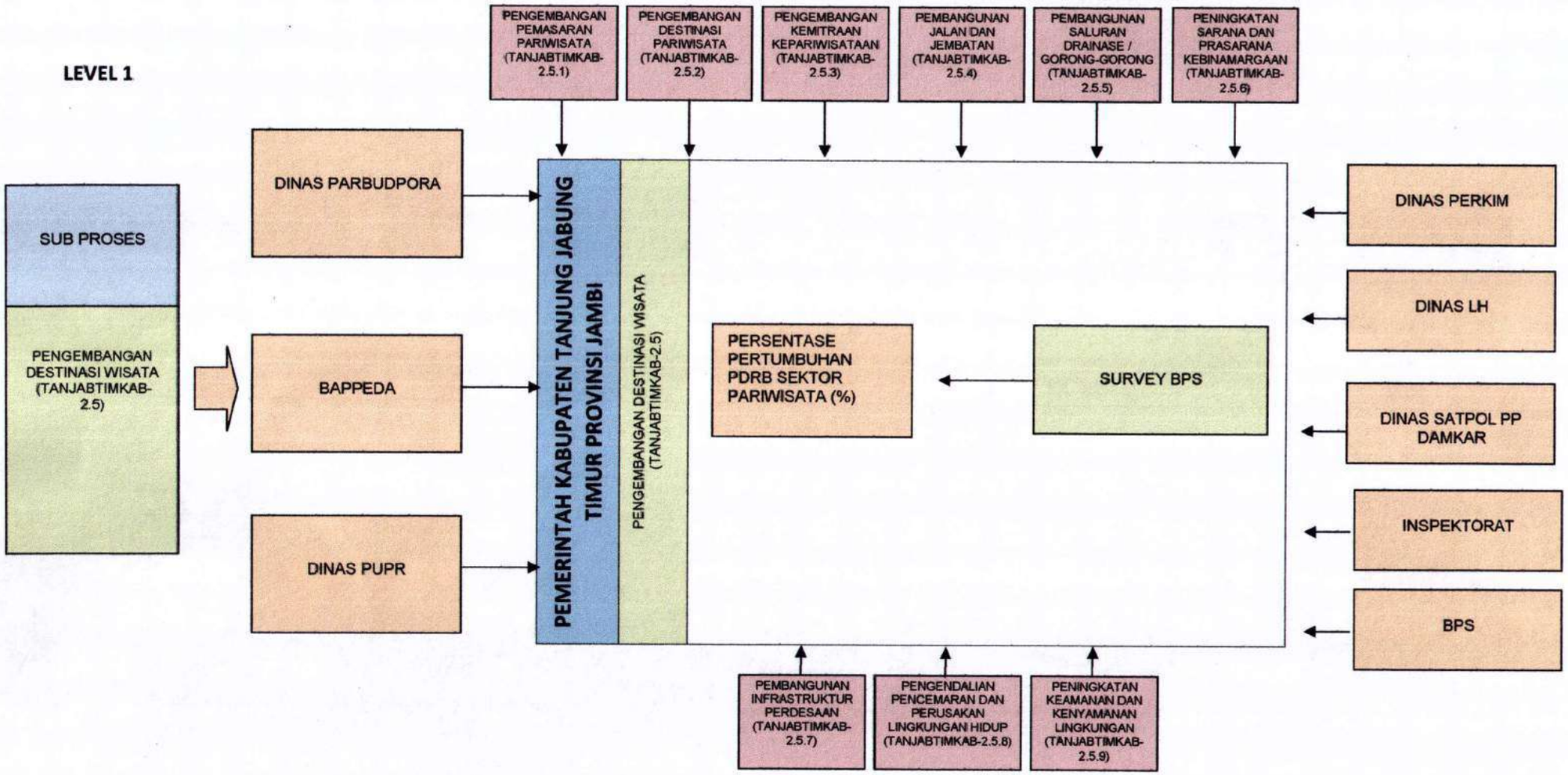

PETA LINTAS FUNGSI

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA (TANJABTIMKAB-2.5)

LEVEL 2

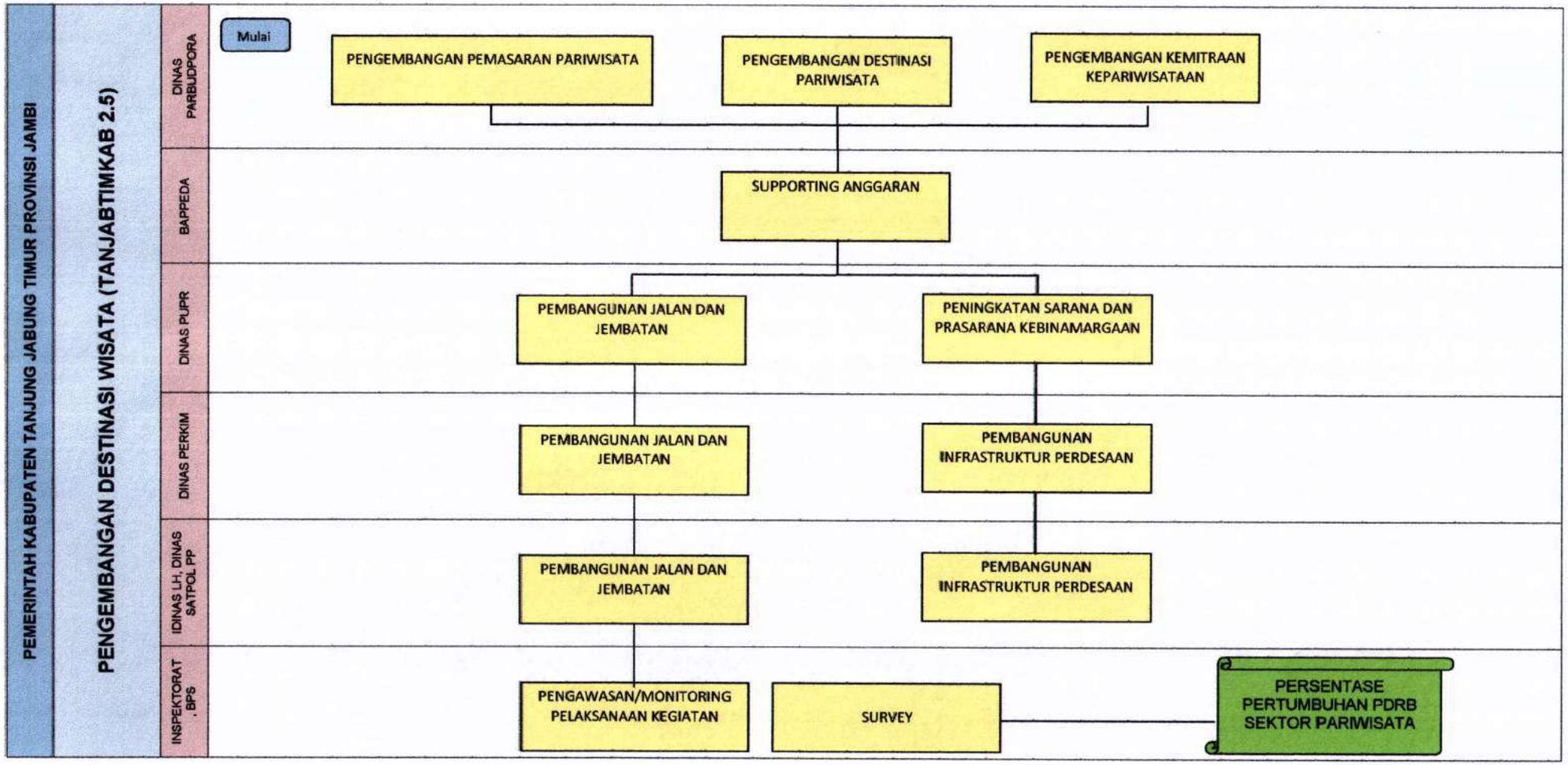

PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

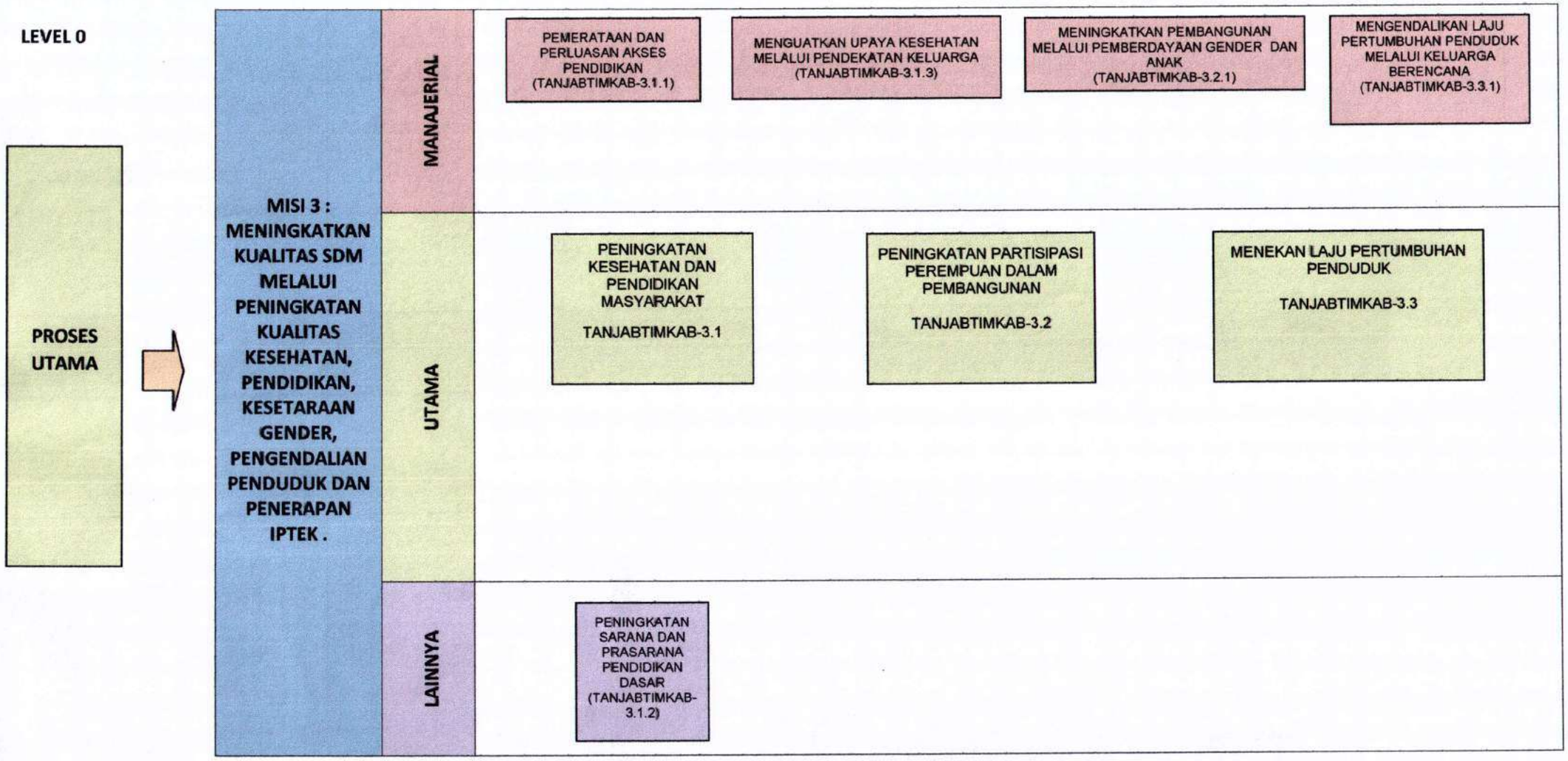

PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

MANAJERIAL

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN (TANJABTIMKAB-3.1.1)

DINAS PENDIDIKAN

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
- PENDIDIKAN NON FORMAL

MENGOPTIMALKAN PRODUKSI MENGUATKAN UPAYA KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN KELUARGA (TANJABTIMKAB-3.1.3)

DINAS KESEHATAN

- PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
- PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
- PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
- PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA
- PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN
- PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
- PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
- PENGEMBANGAN KESEHATAN MSYARAKAT
- PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN GENDER DAN ANAK (TANJABTIMKAB-3.2.1)

DINAS SOSIAL PPPA
11 KECAMATAN

- PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
- PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA BERENCANA (TANJABTIMKAB-3.3.1)

DINAS PPKB

- KELUARGA BERENCANA
- PENIGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
- PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
- PENGENDALIAN PENDUDUK

UTAMA

PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TANJABTIMKAB-3.1

DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PPKB

PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

TANJABTIMKAB-3.2

DINAS SOSIAL PPPA
KECAMATAN

MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

TANJABTIMKAB-3.3

DINAS PPKB

LAINNYA

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (TANJABTIMKAB-3.1.2)

DINAS PENDIDIKAN

- PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIAN
- PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-3.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

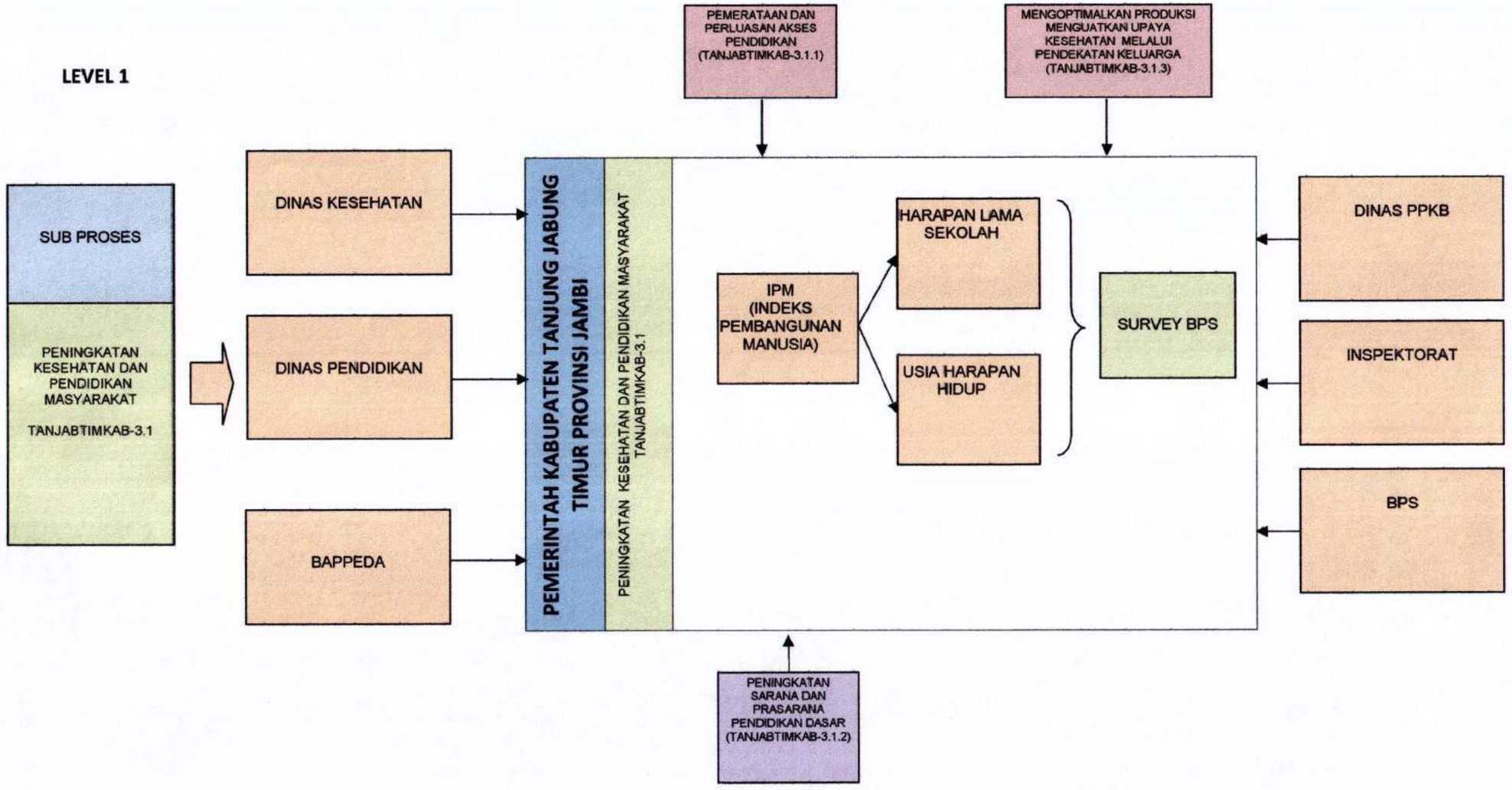

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
TANJABTIMKAB-3.1

LEVEL 2

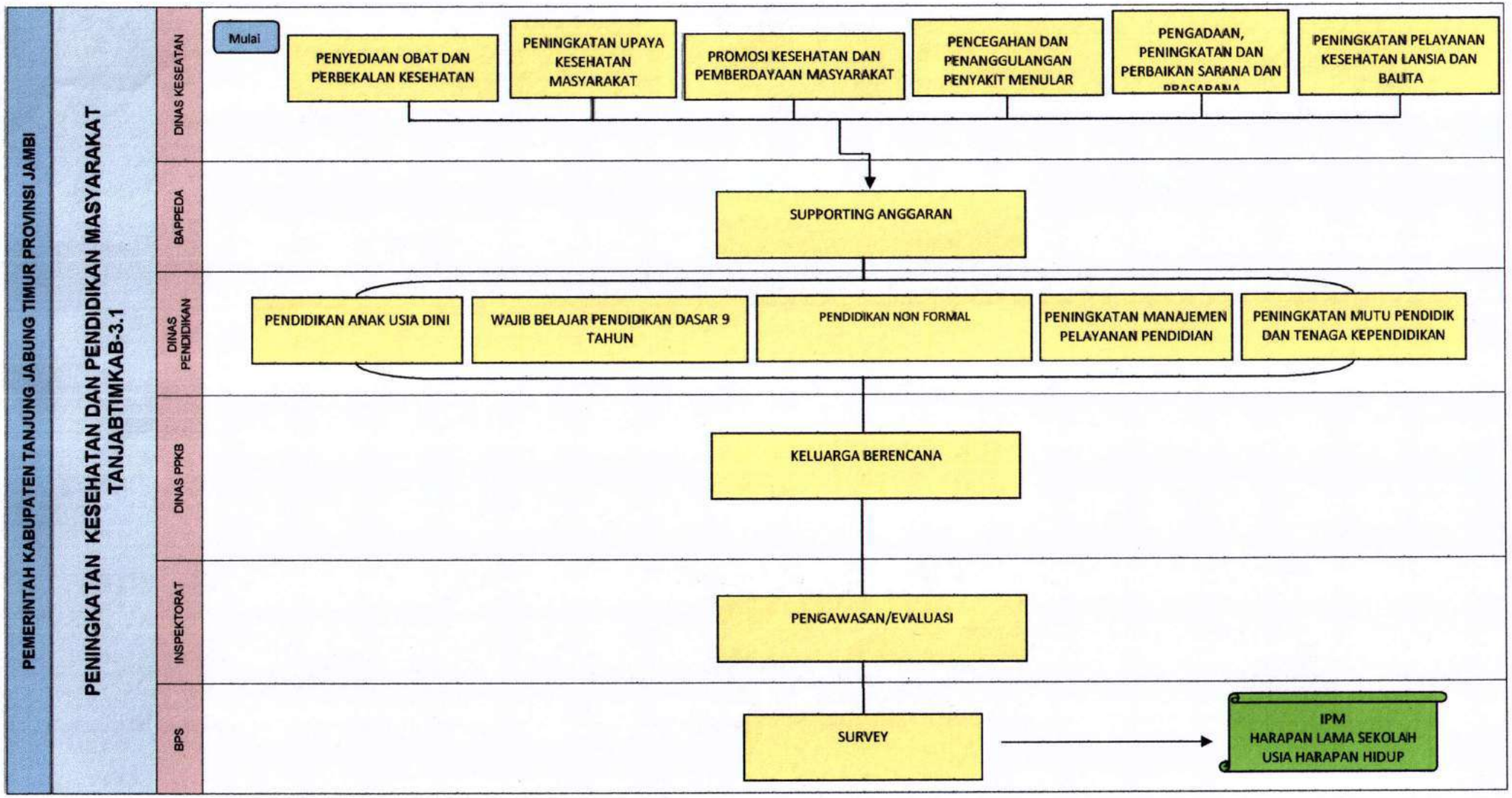

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-3.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

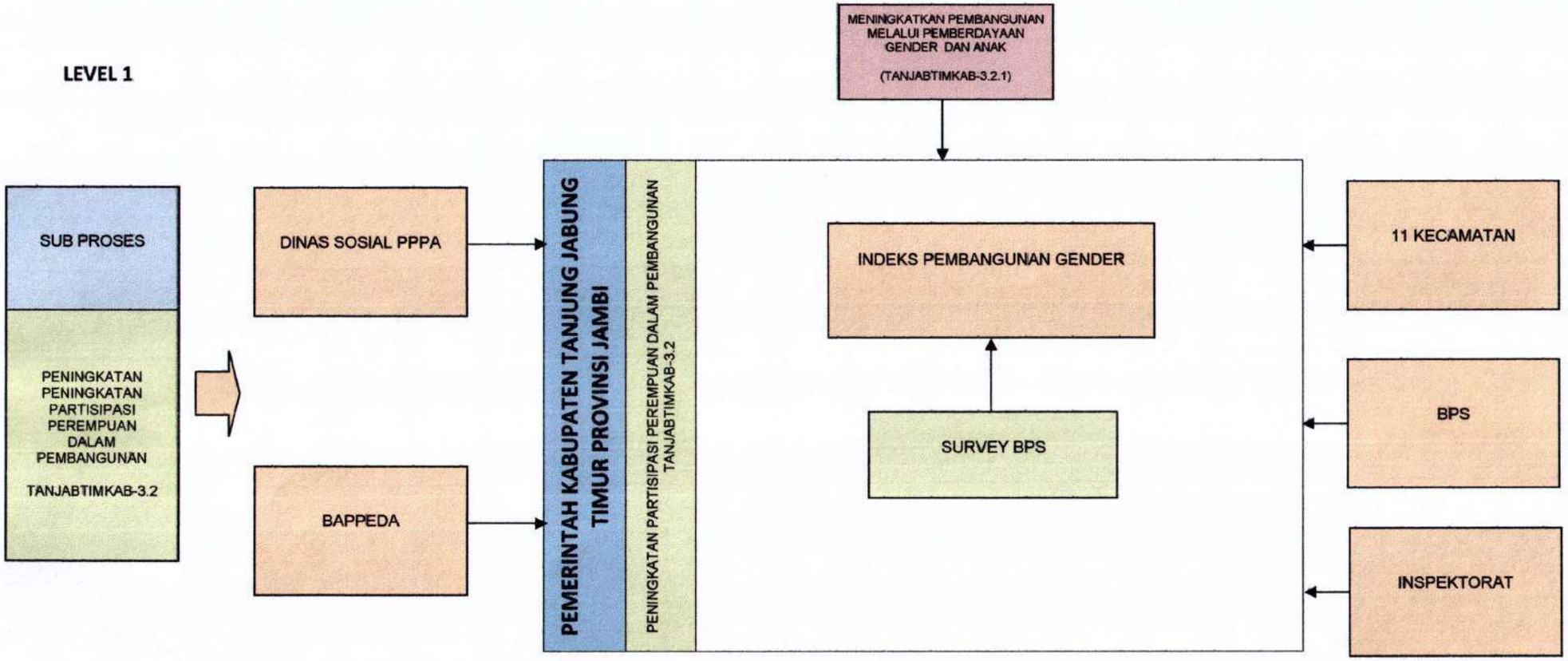

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN TANJABTIMKAB-3.2

LEVEL 2

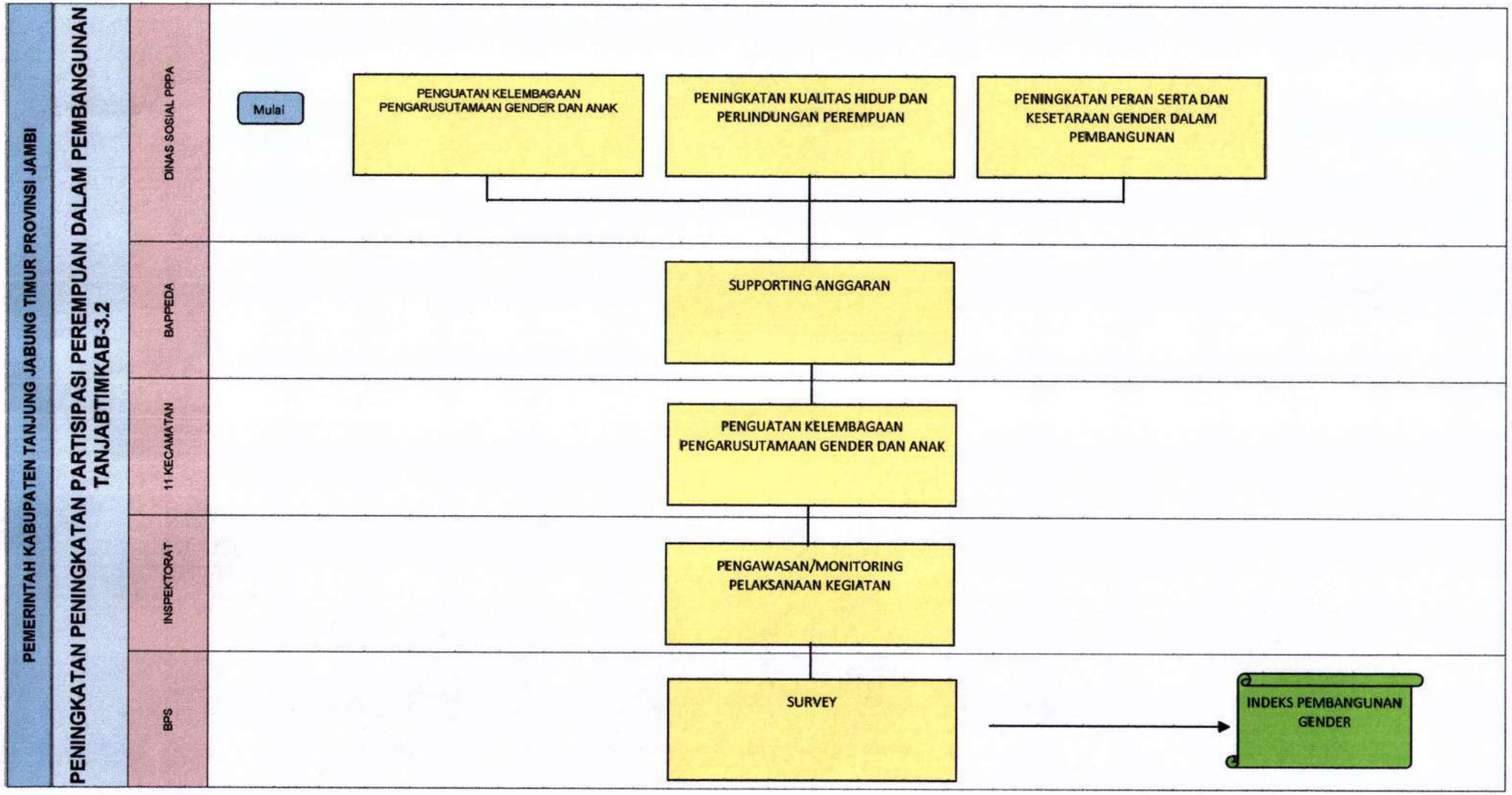

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-3.3

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

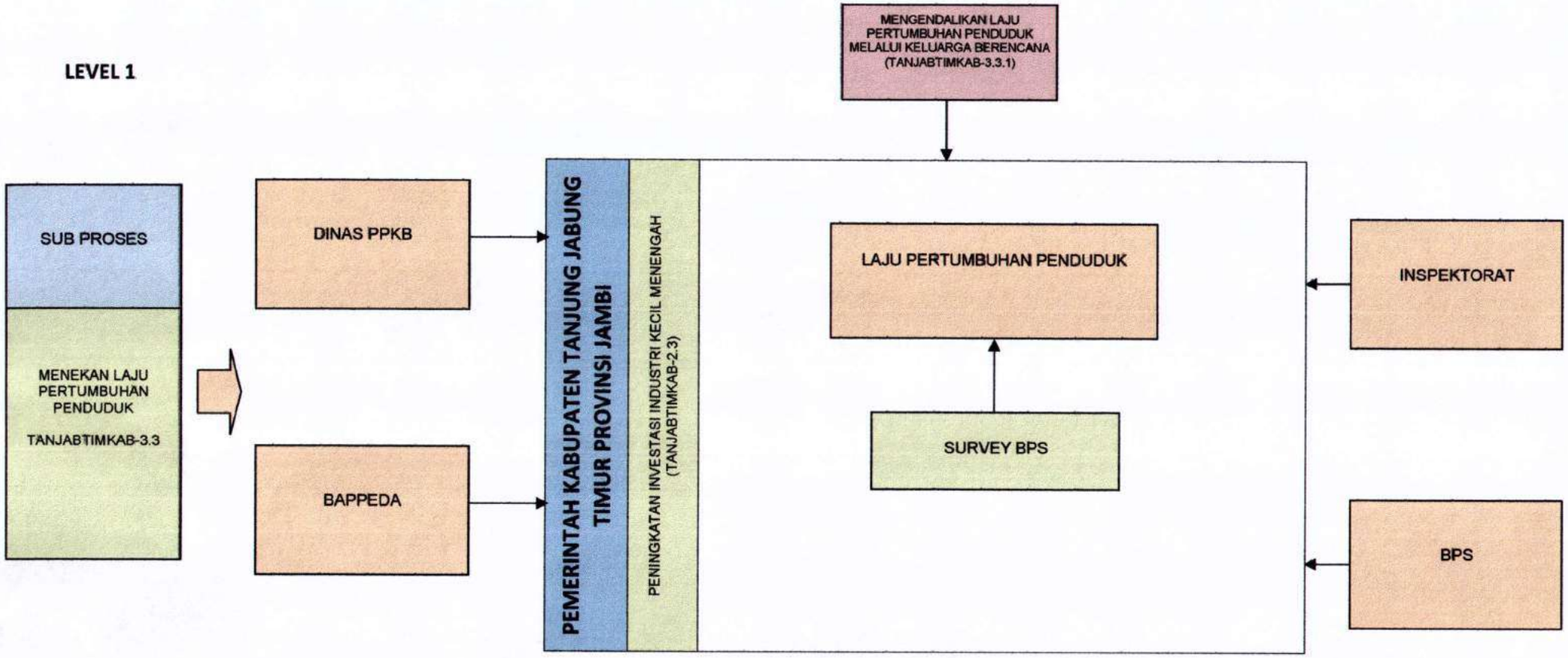

PETA LINTAS FUNGSI

MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (TANJABTIMKAB-3.3)

LEVEL 2

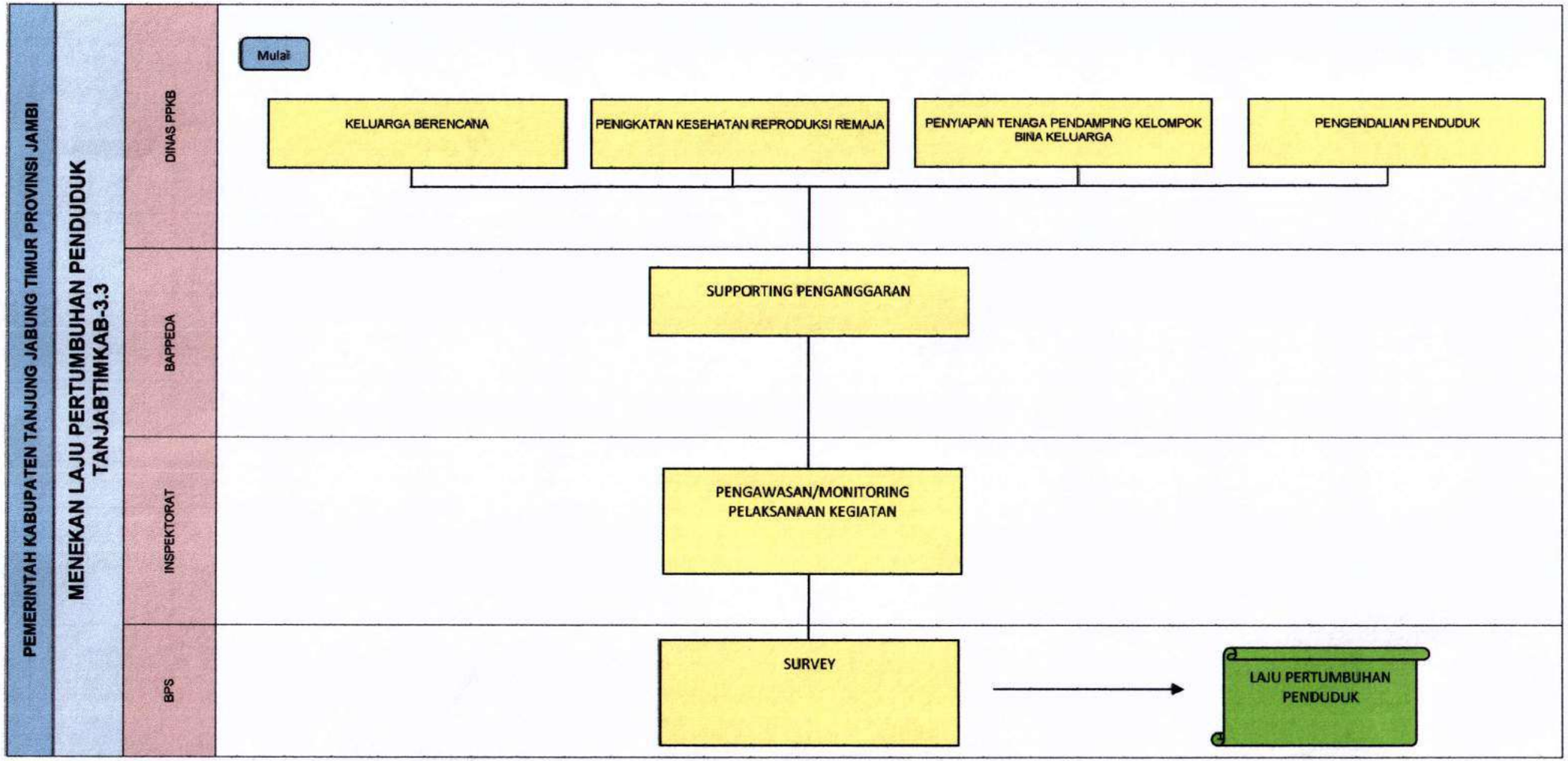

PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

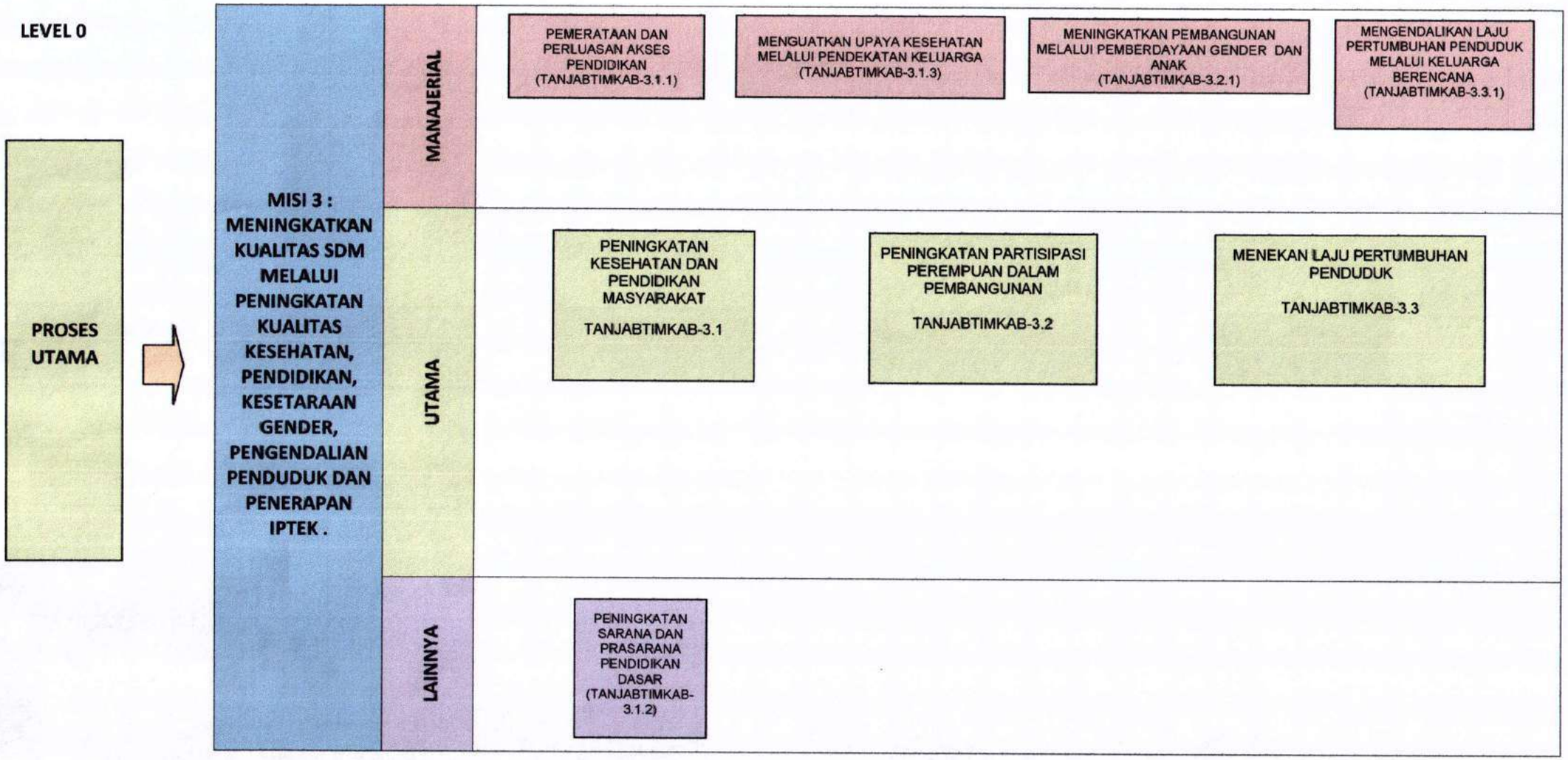

PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

MANAJERIAL

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN (TANJABTIMKAB-3.1.1)

DINAS PENDIDIKAN

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
- PENDIDIKAN NON FORMAL

MENGOPTIMALKAN PRODUKSI MENGUATKAN UPAYA KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN KELUARGA (TANJABTIMKAB-3.1.3)

DINAS KESEHATAN

- PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
- PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
- PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
- PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA
- PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN
- PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
- PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
- PENGEMBANGAN KESEHATAN MSYARAKAT
- PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN GENDER DAN ANAK (TANJABTIMKAB-3.2.1)

DINAS SOSIAL PPPA
11 KECAMATAN

- PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
- PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA BERENCANA (TANJABTIMKAB-3.3.1)

DINAS PPKB

- KELUARGA BERENCANA
- PENIGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
- PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
- PENGENDALIAN PENDUDUK

UTAMA

PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TANJABTIMKAB-3.1

DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PPKB

PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

TANJABTIMKAB-3.2

DINAS SOSIAL PPPA
KECAMATAN

MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

TANJABTIMKAB-3.3

DINAS PPKB

LAINNYA

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (TANJABTIMKAB-3.1.2)

DINAS PENDIDIKAN

- PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIAN
- PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-3.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

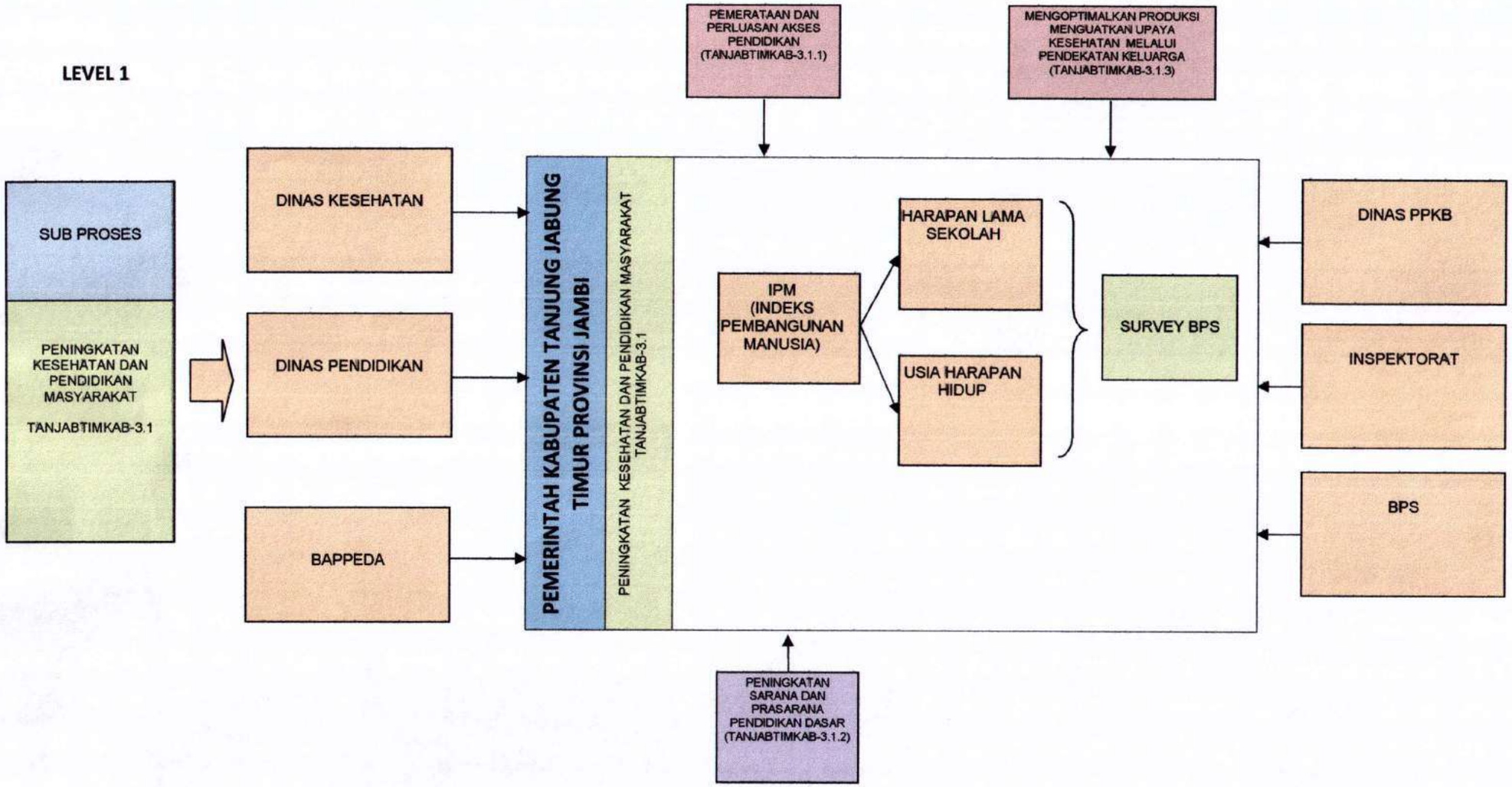

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
TANJABTIMKAB-3.1

LEVEL 2

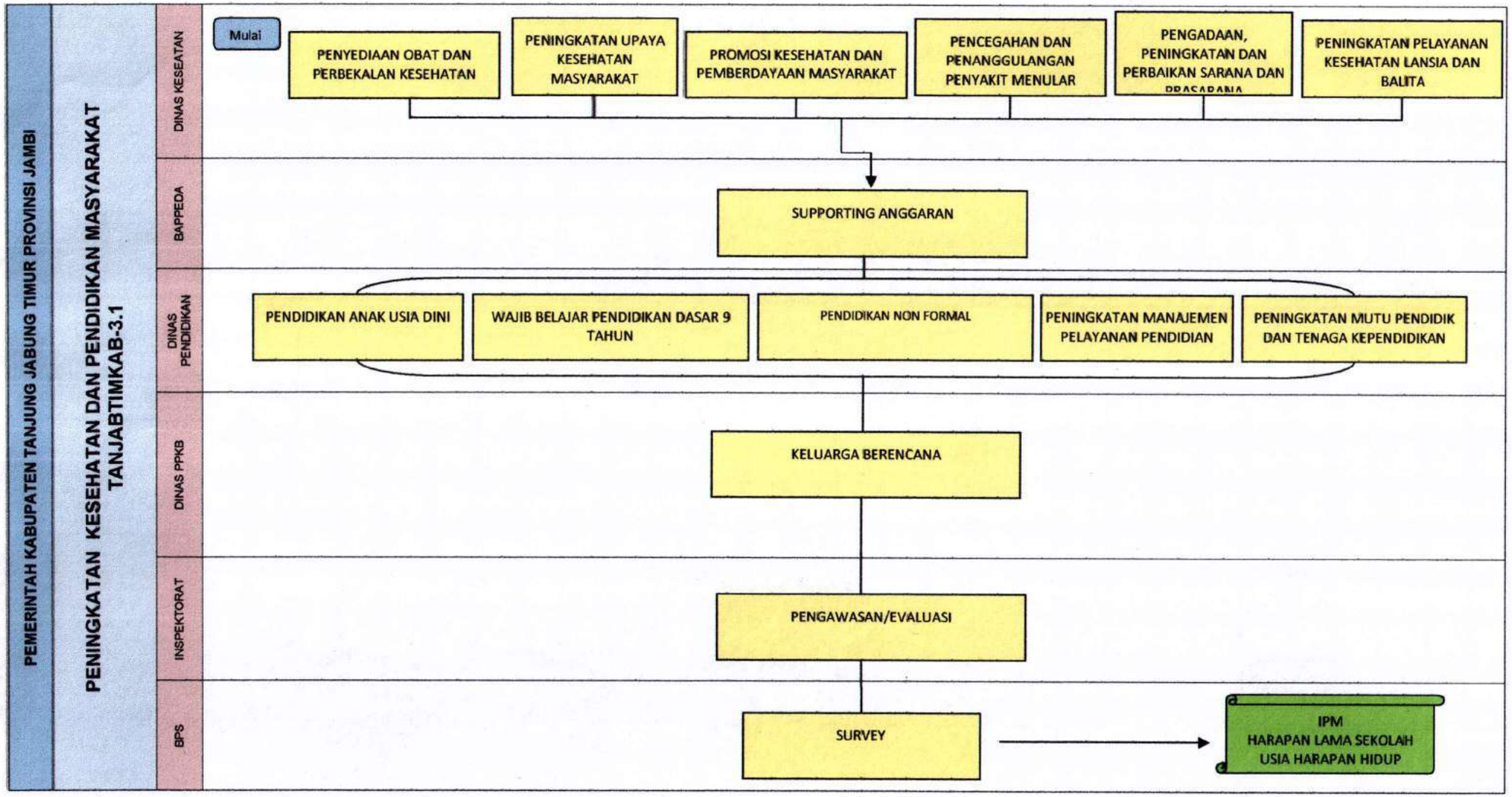

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-3.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

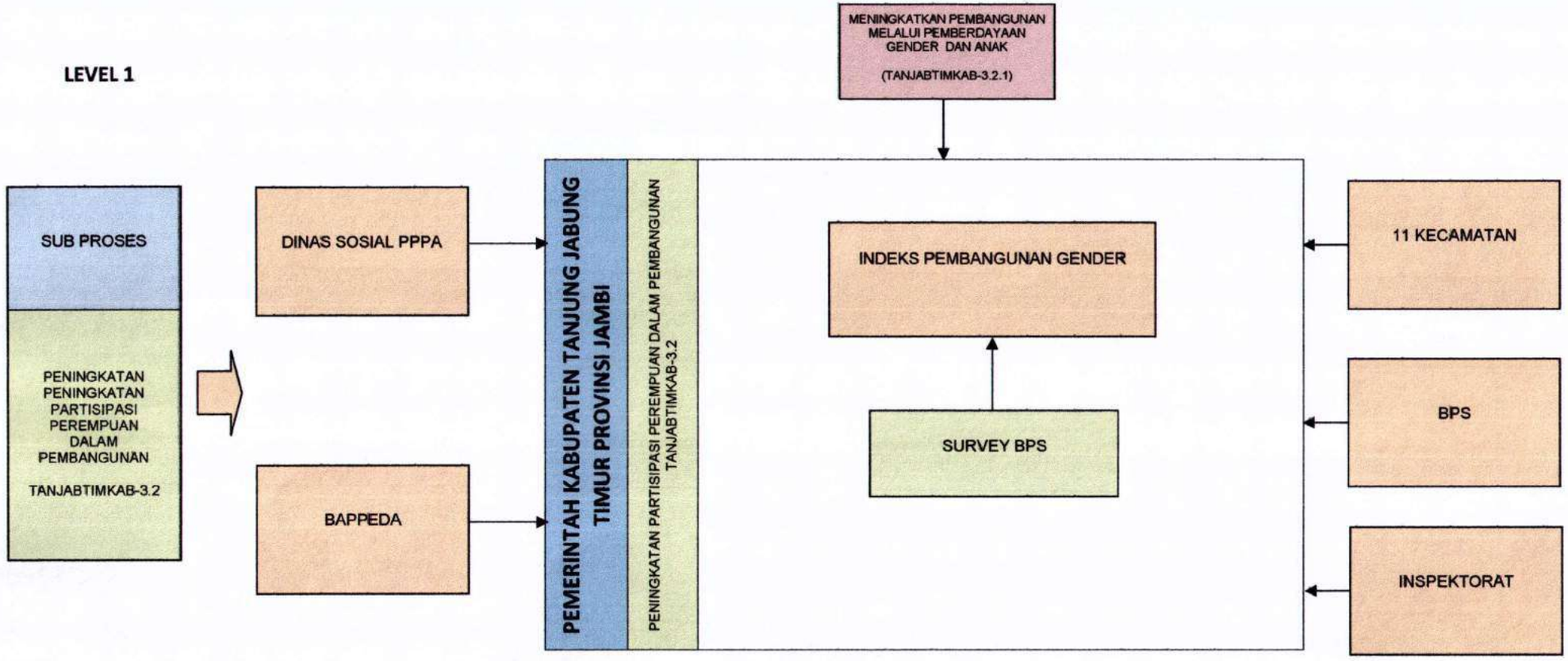

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN TANJABTIMKAB-3.2

LEVEL 2

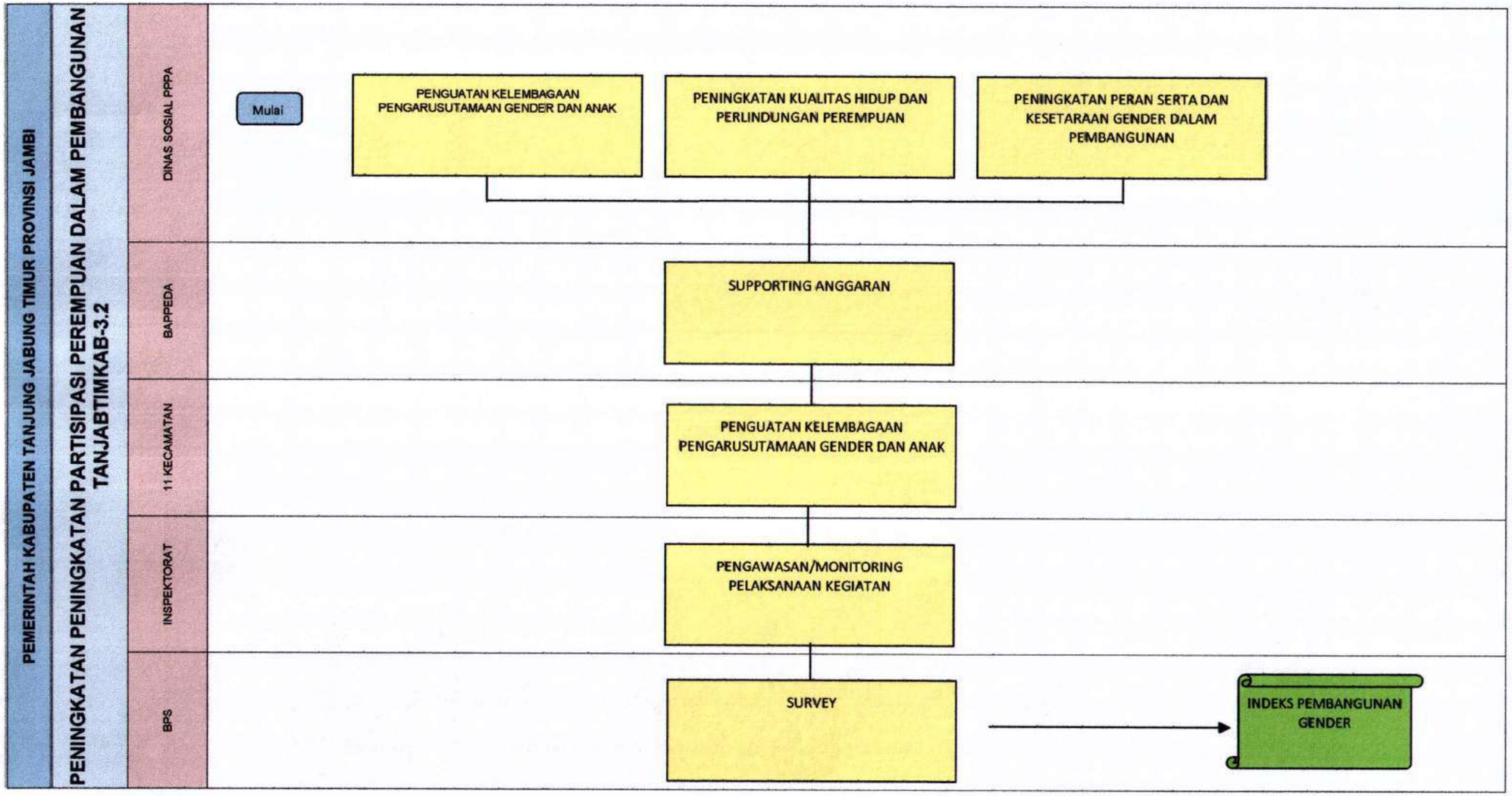

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-3.3

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

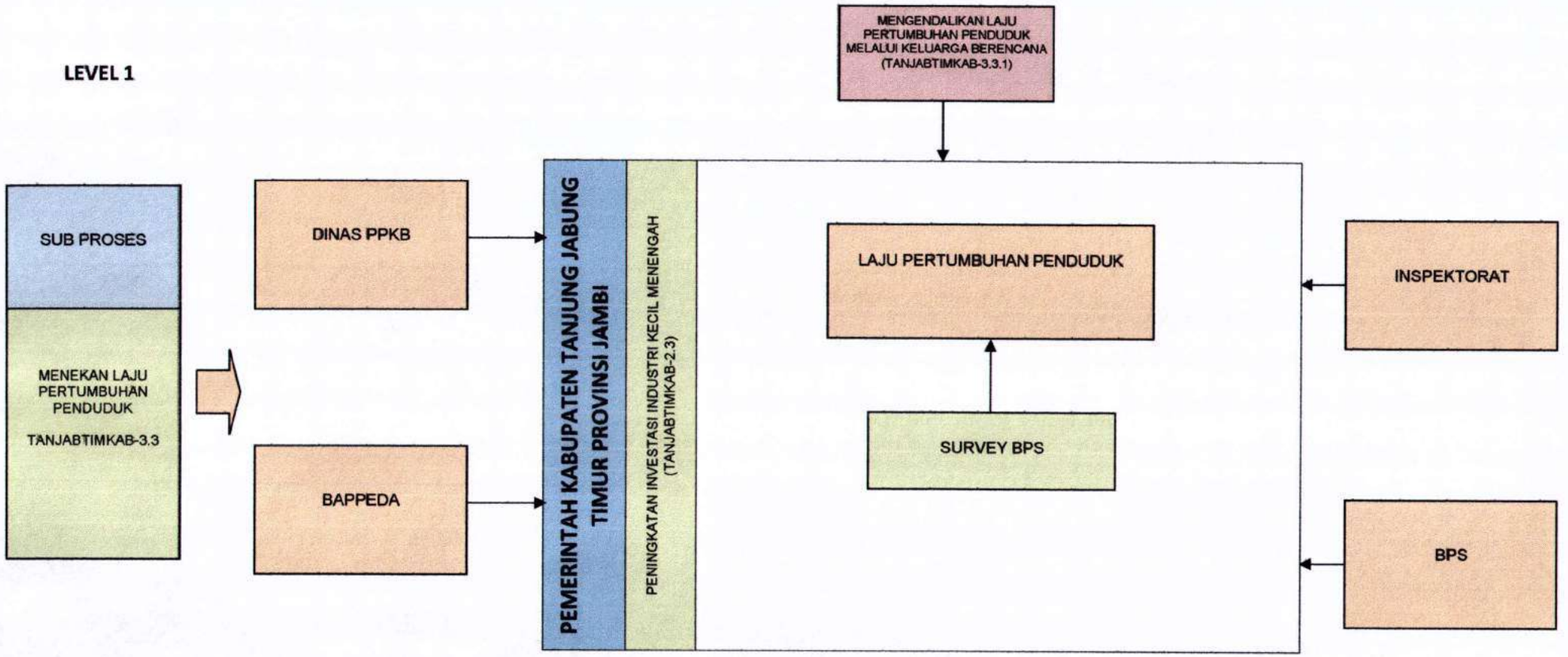

PETA LINTAS FUNGSI

MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (TANJABTIMKAB-3.3)

LEVEL 2

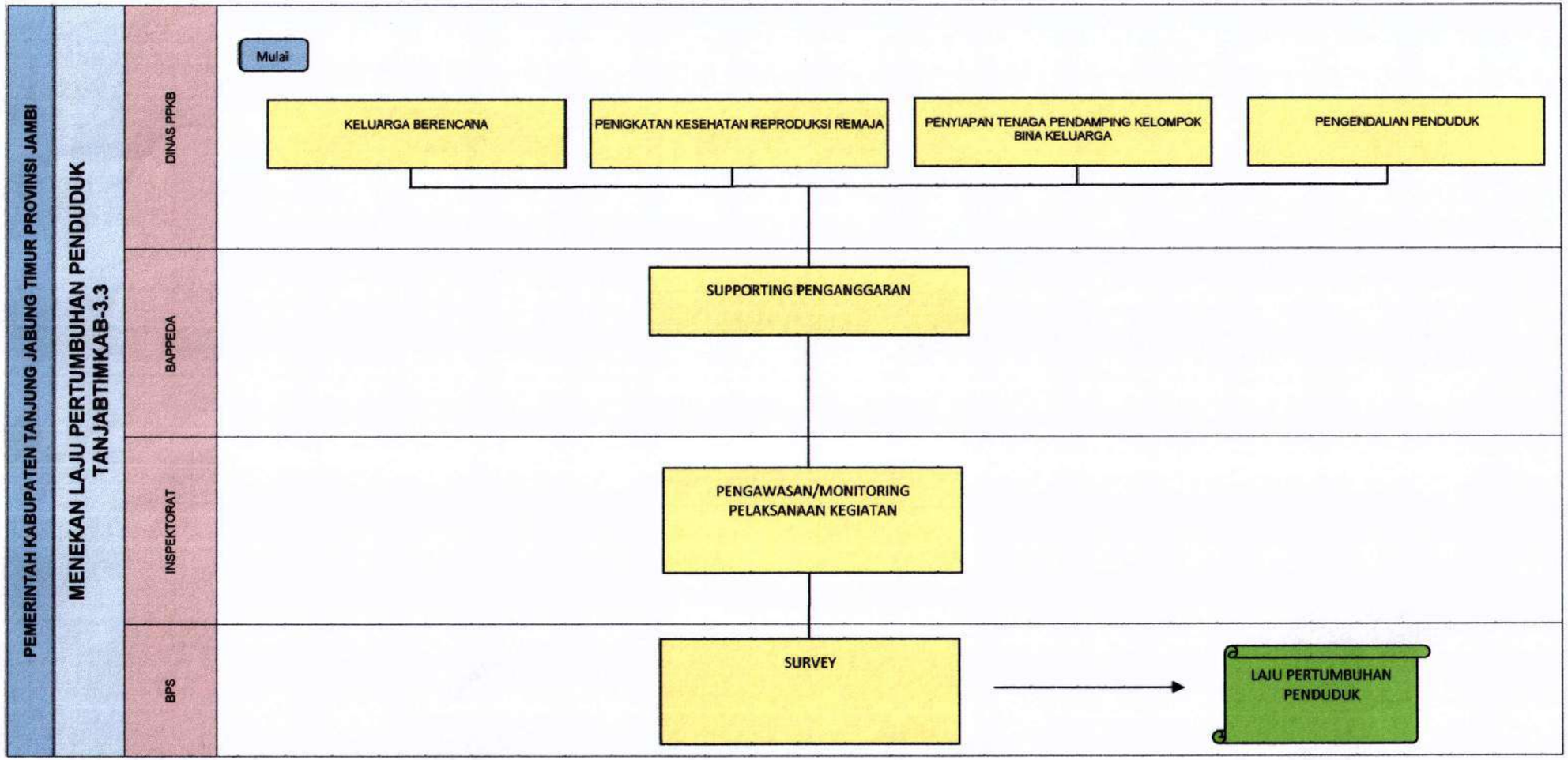

PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

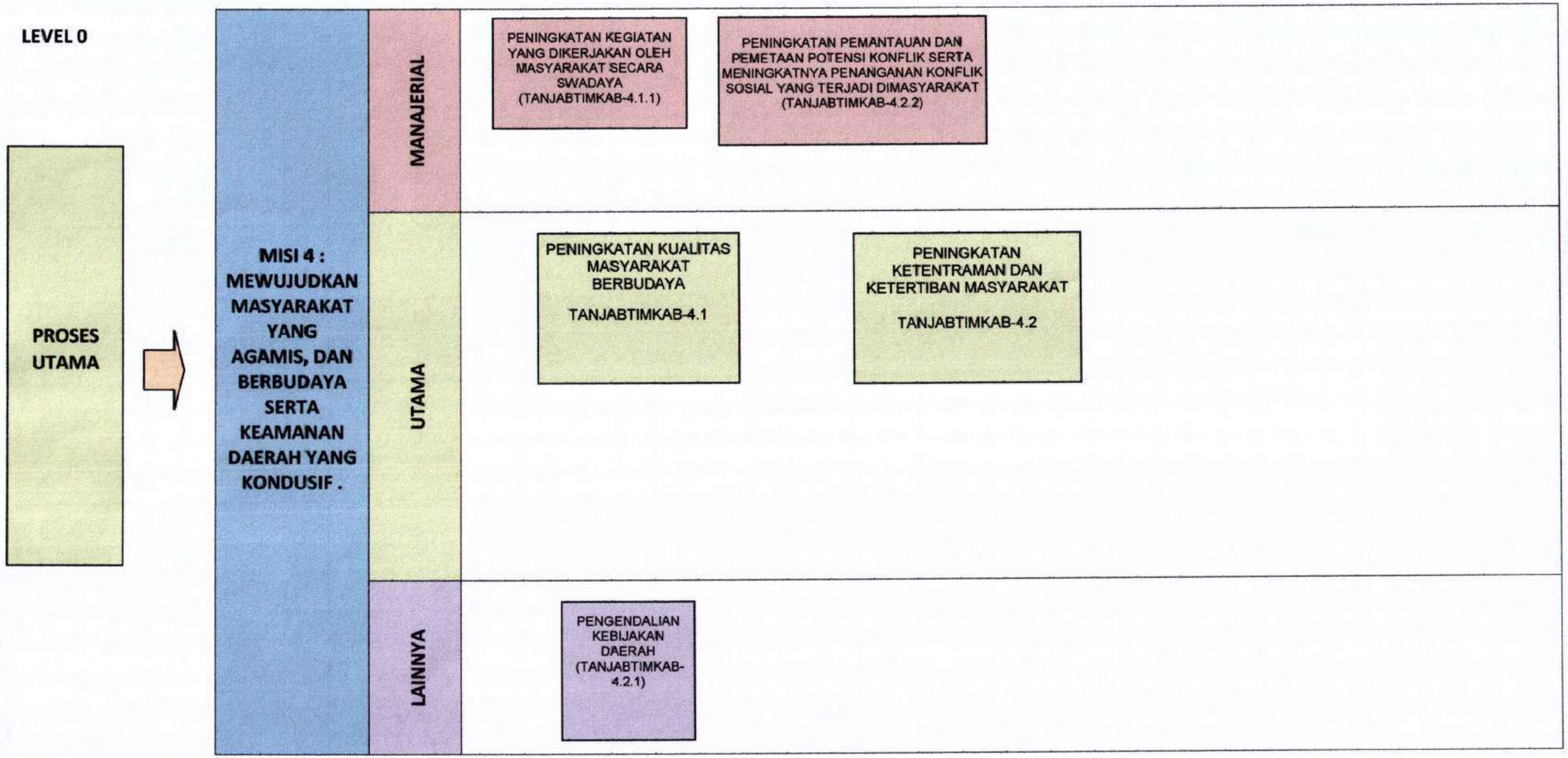

PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

MANAJERIAL

PENINGKATAN KEGIATAN YANG DIKERJAKAN OLEH MASYARAKAT SECARA SWADAYA
(TANJABTIMKAB-4.1.1)

DINAS TPH
DINAS PERKIM

- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI
- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH
- PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PEMETAAN POTENSI KONFLIK SERTA MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DIMASYARAKAT
(TANJABTIMKAB-4.2.2)

BADAN KESBANGPOL
SATPOL PP DAMKAR

- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- PENINGKATAN PEMBARANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
- PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
- PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

UTAMA

PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT BERBUDAYA

TANJABTIMKAB-4.1

DINAS TPH
DINAS PERKIM

PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TANJABTIMKAB-4.2

BADAN KSBANGPOL
DINAS SATPOL PP DAMKAR

LAINNYA

PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAERAH
(TANJABTIMKAB-4.2.1)

BADAN KESBANGPOL

- PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-4.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

LEVEL 1

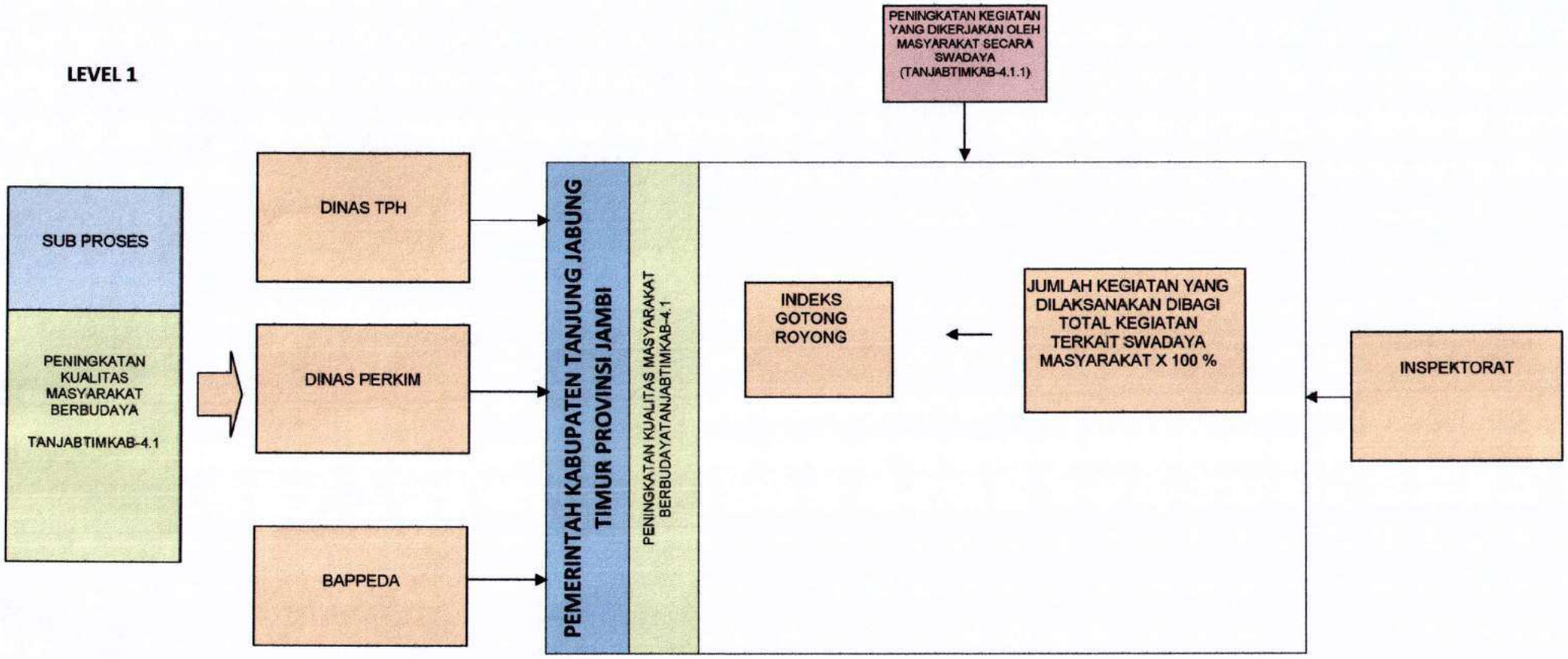

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT BERBUDAYA TANJABTIMKAB-4.1

LEVEL 2

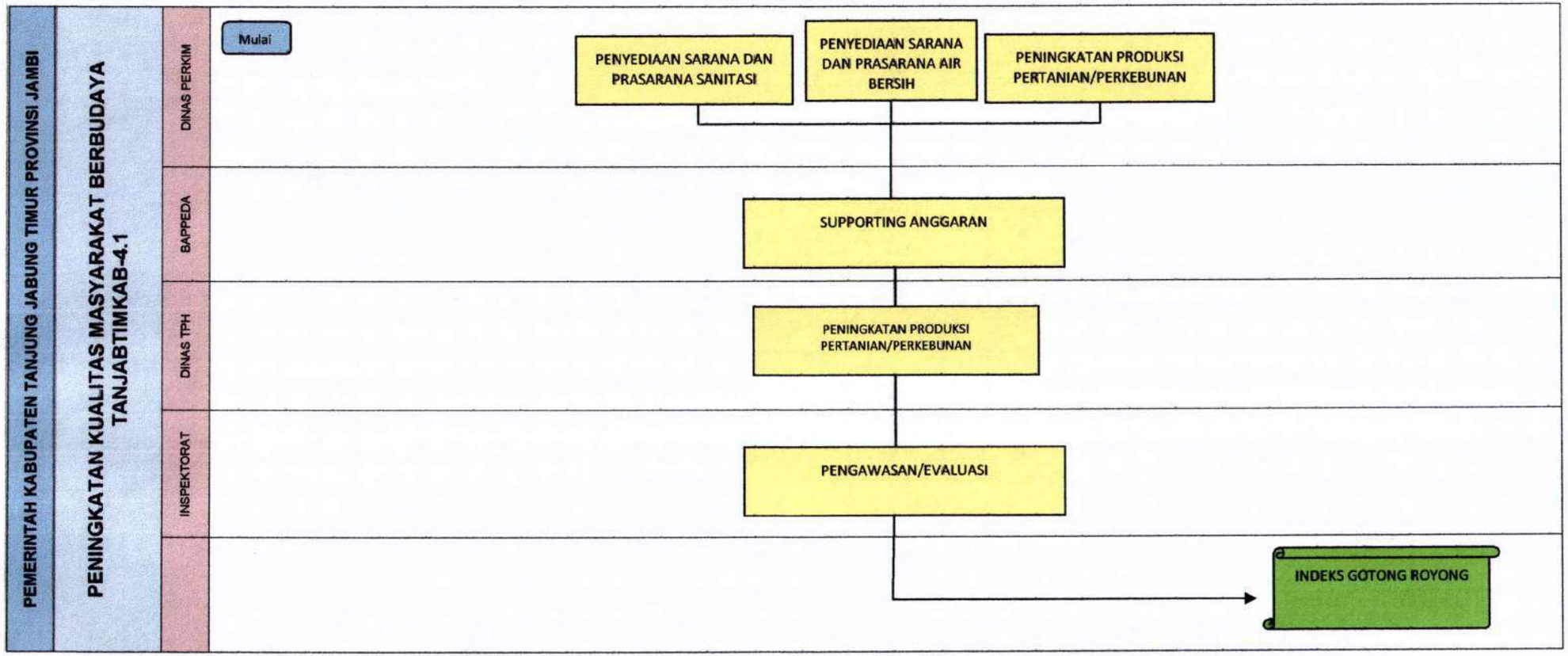

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-4.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

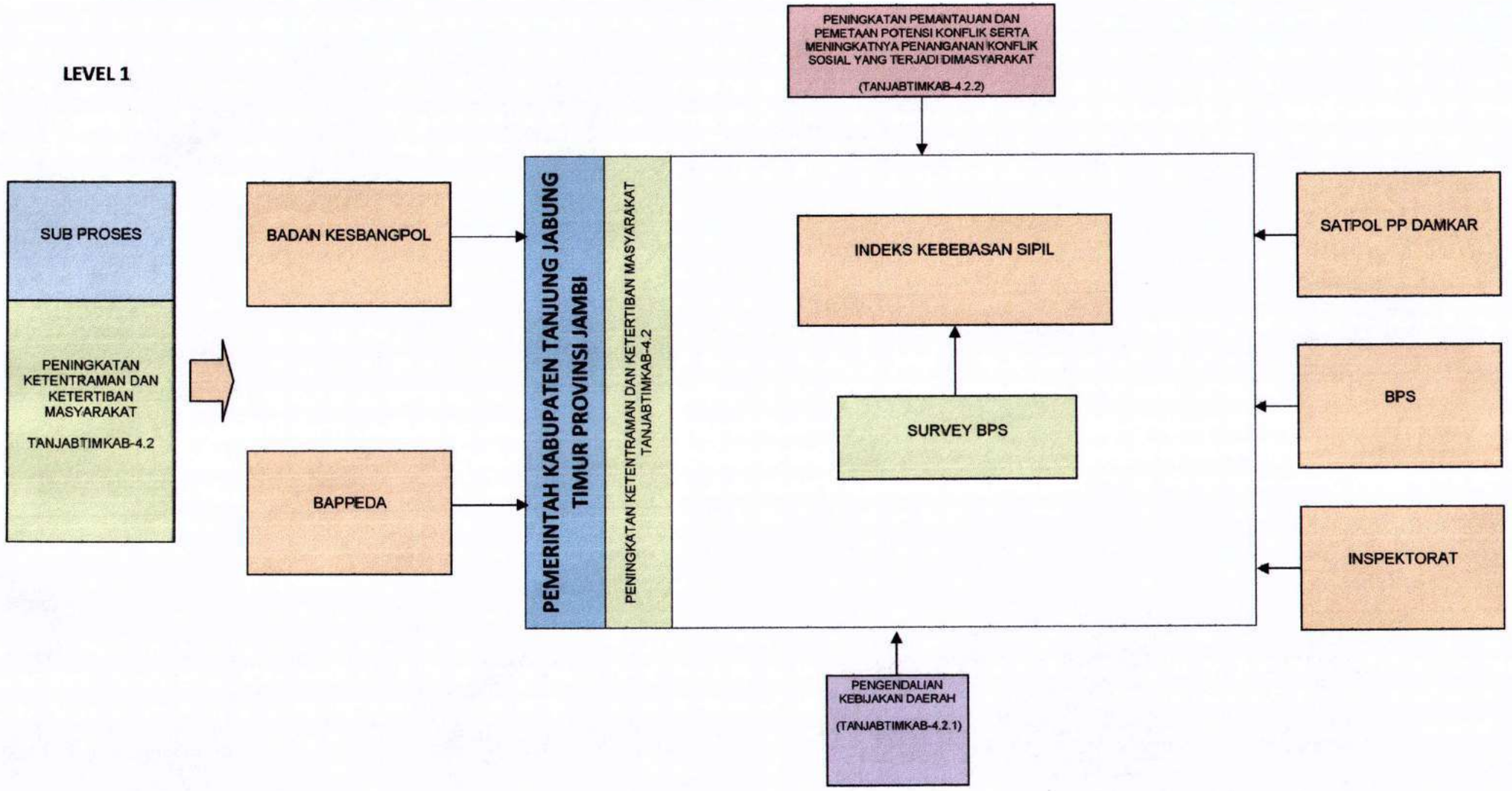

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
TANJABTIMKAB-4.2

LEVEL 2

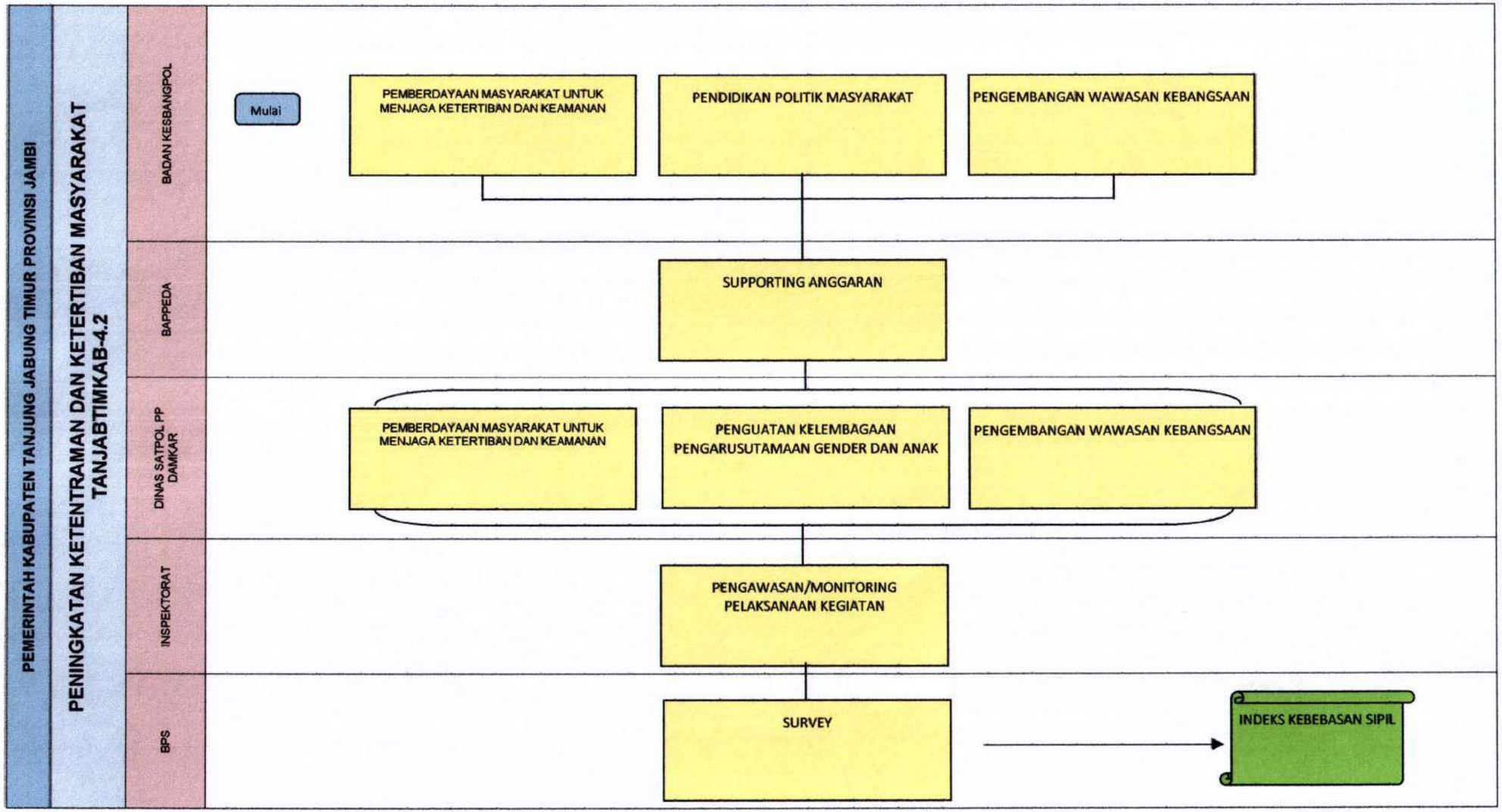

PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

LEVEL 0

PROSES UTAMA

MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS

MANAJERIAL

- PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA (TANJABTIMKAB-5.1.1)
- MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA (TANJABTIMKAB-5.1.2)
- PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (TANJABTIMKAB-5.2.1)
- PENINGKATAN CAPAIAN PENILAIAN SAKIP DAN MATURITAS SPIP (TANJABTIMKAB-5.4.1)
- MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (TANJABTIMKAB-5.4.3)
- PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENDAPATAN, ASET, TATA NASKAH, DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN SERTA KINERJA (TANJABTIMKAB-5.3.1)

UTAMA

- PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMANDIRIAN DESA TANJABTIMKAB-5.1
- PENINGKATAN NILAI INVESTASI PEMBANGUNAN TANJABTIMKAB-5.2
- TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN TRANSPARAN BERBASIS E-GOVERNMENT TANJABTIMKAB-5.3
- PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA DAERAH TANJABTIMKAB-5.4

LAINNYA

- PENINGKATAN KAPABILITAS INTERNAL AUDIT (TANJABTIMKAB-5.4.2)

PETA RELASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

MANAJERIAL

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA

(TANJABTIMKAB-5.1.2)

DINAS PMD

- PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
- PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

(TANJABTIMKAB-5.2.1)

DPMPTSP

- PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

PENINGKATAN CAPAIAN PENILAIAN SAKIP DAN MATURITAS SPIP

(TANJABTIMKAB-5.4.1)

SEKRETARIAT DAERAH
INSPEKTORAT

- PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
- PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(TANJABTIMKAB-5.4.3)

INSPEKTORAT
BADAN KEUANGAN DAERAH

- PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENDAPATAN, ASET, TATA NASKAH, DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN SERTA KINERJA

(TANJABTIMKAB-5.3.1)

DINAS KOMINFO

- PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
- PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

(TANJABTIMKAB-5.1.1)

DPMPTSP, DINAS KESEHATAN, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS DUKCAPIL, SEKRETARIAT DAERAH, SELURUH OPD

- PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
- UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- PENATAAN PELAYANAN PUBLIK
- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
- PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH
- UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN RUJUKAN
- STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
- PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
- PENATAAN PEMANFAATAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

UTAMA

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMANDIRIAN DESA

TANJABTIMKAB-5.1

DINAS KESEHATAN, DPMPTSP
DINAS DUKCAPIL, RSUD NH
DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN,
SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PMD

PENINGKATAN NILAI INVESTASI PEMBANGUNAN

TANJABTIMKAB-5.2

DPMPTSP

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN TRANSPARAN BERBASIS E-GOVERNMENT

TANJABTIMKAB-5.3

DINAS KOMINFO

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA DAERAH

TANJABTIMKAB-5.4

INSPEKTORAT
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH

LAINNYA

PENINGKATAN KAPABILITAS INTERNAL AUDIT

(TANJABTIMKAB-5.4.2)

INSPEKTORAT

PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-5.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

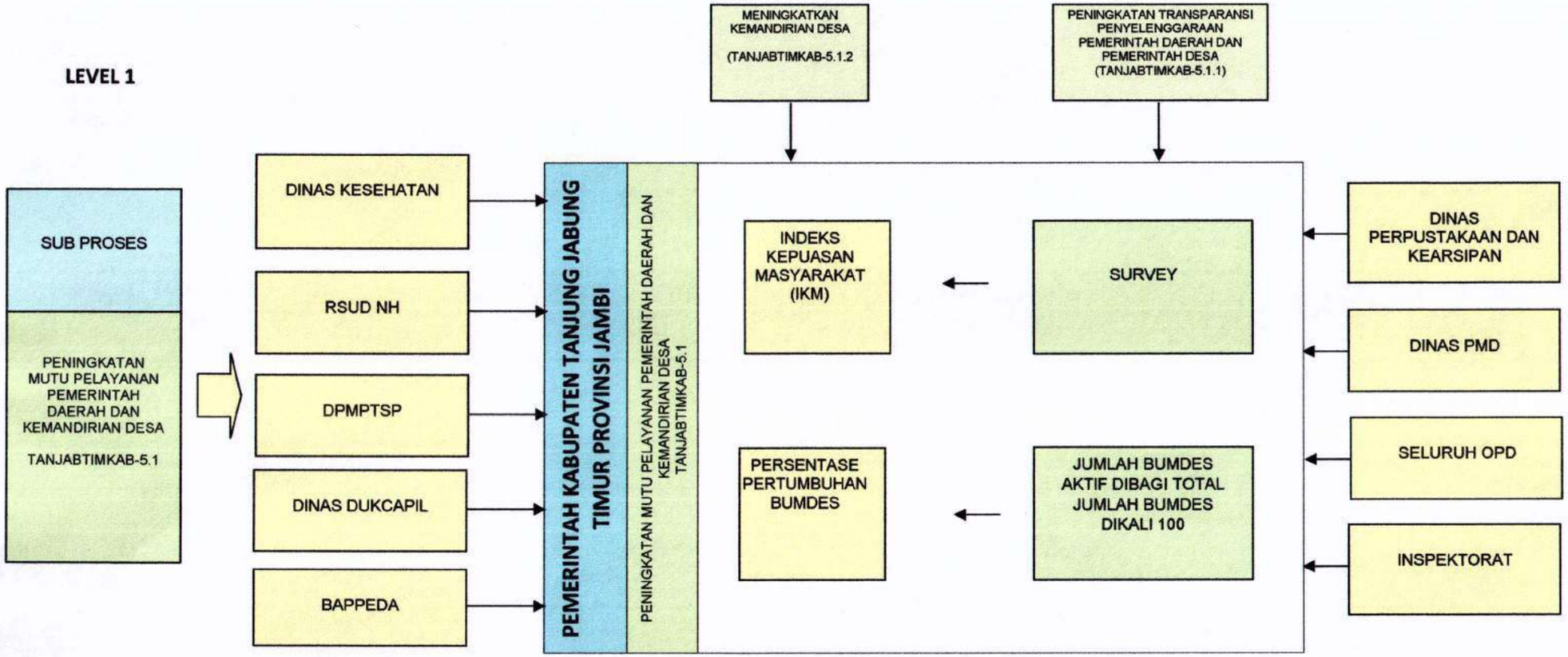

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMANDIRIAN DESA (TANJABTIMKAB-5.1)

LEVEL 2

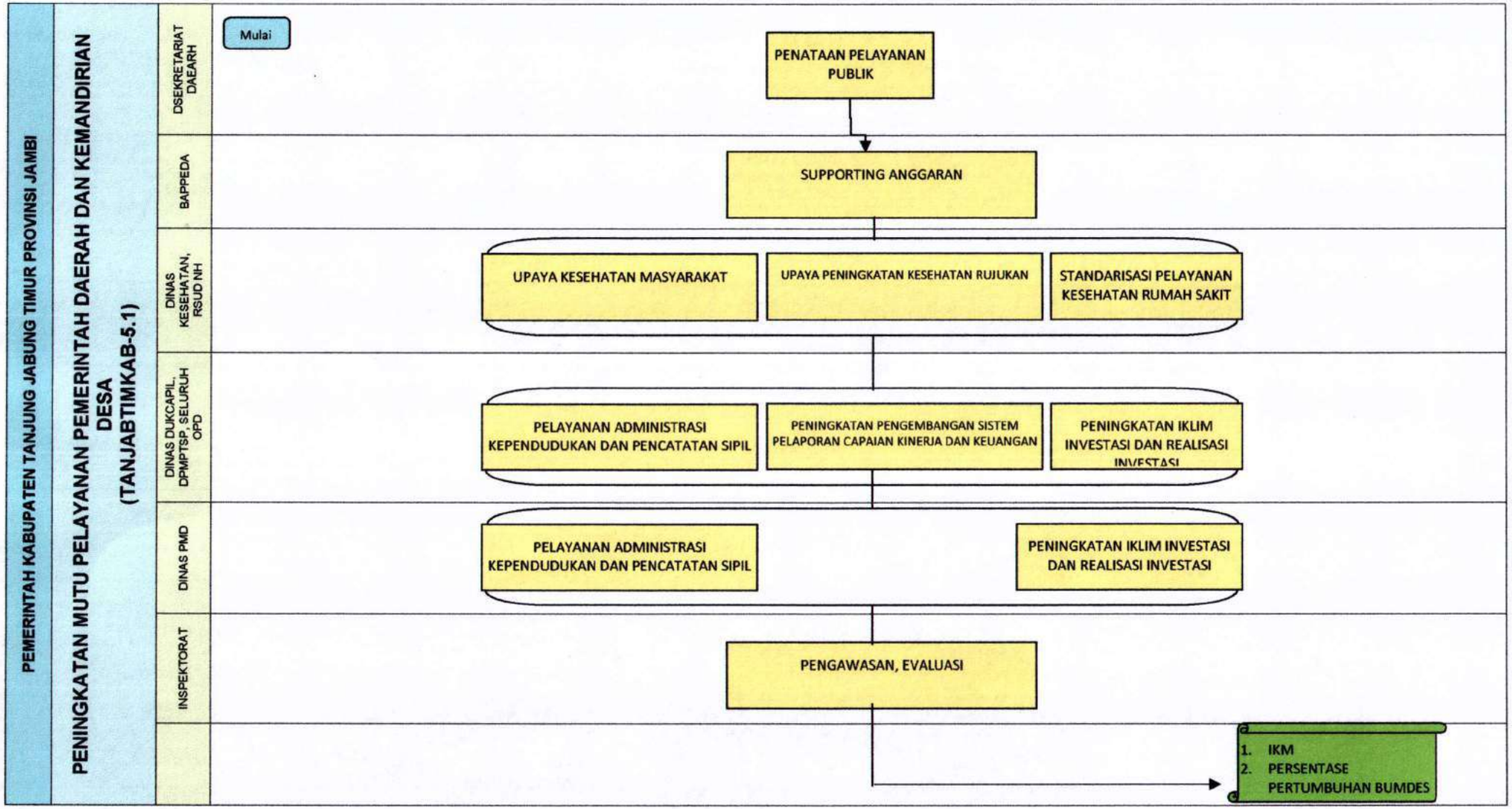

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-5.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

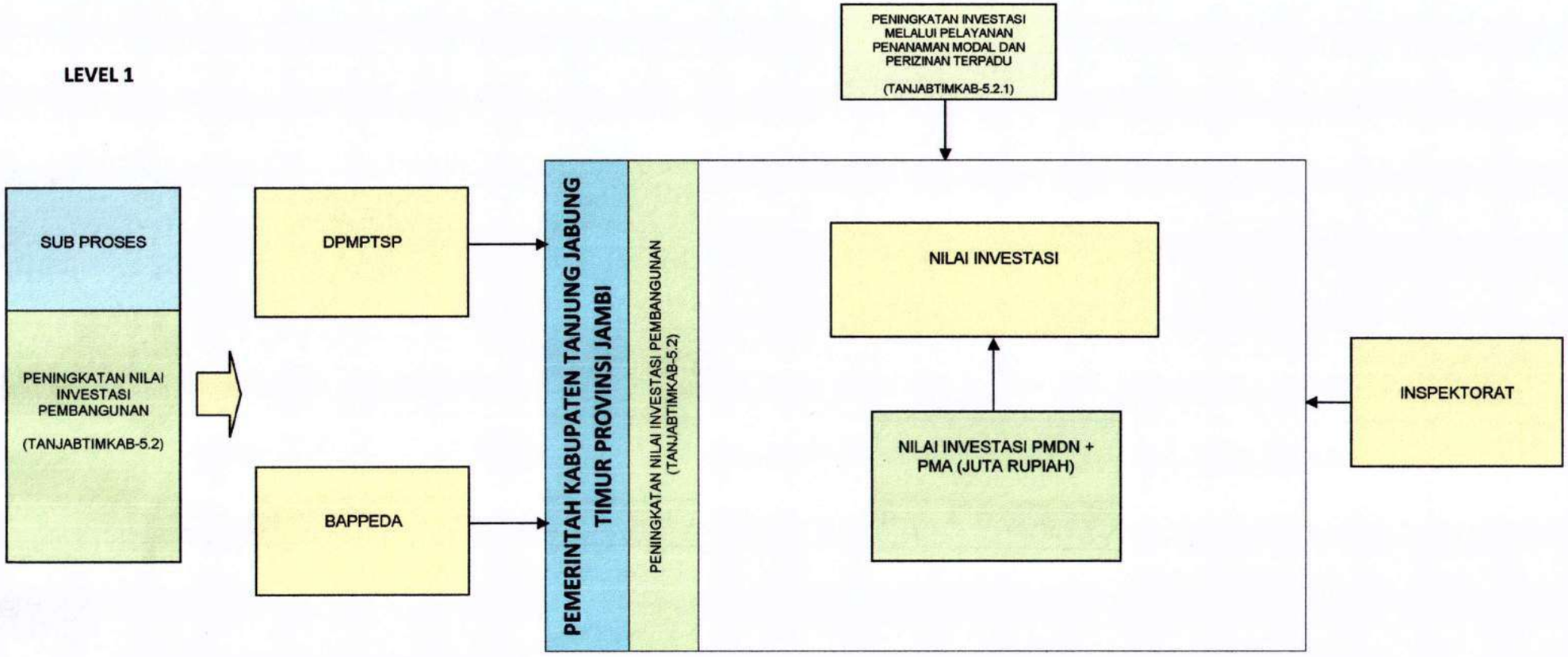

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN NILAI INVESTASI PEMBANGUNAN (TANJABTIMKAB-5.2)

LEVEL 2

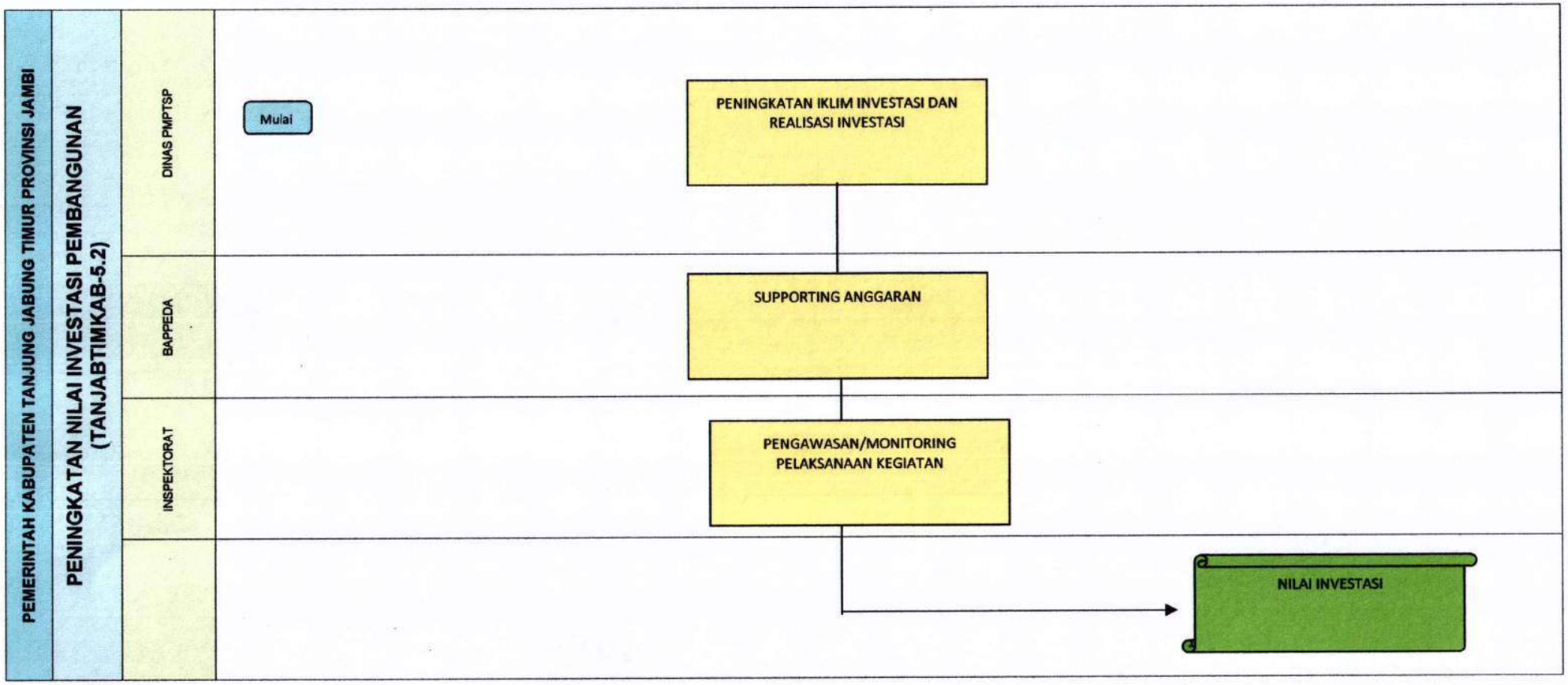

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-5.3

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

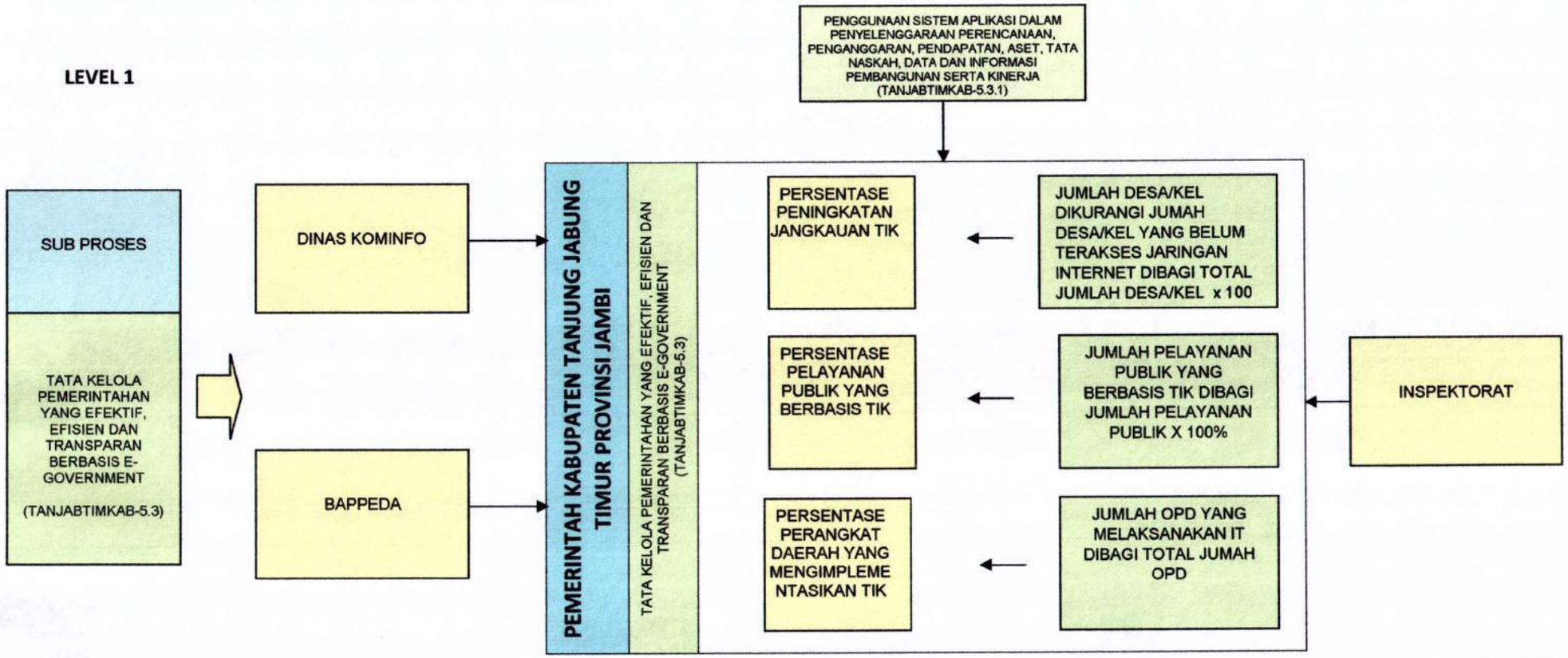

PETA LINTAS FUNGSI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN TRANSPARAN BERBASIS E-GOVERNMENT (TANJABTIMKAB-5.3)

LEVEL 2

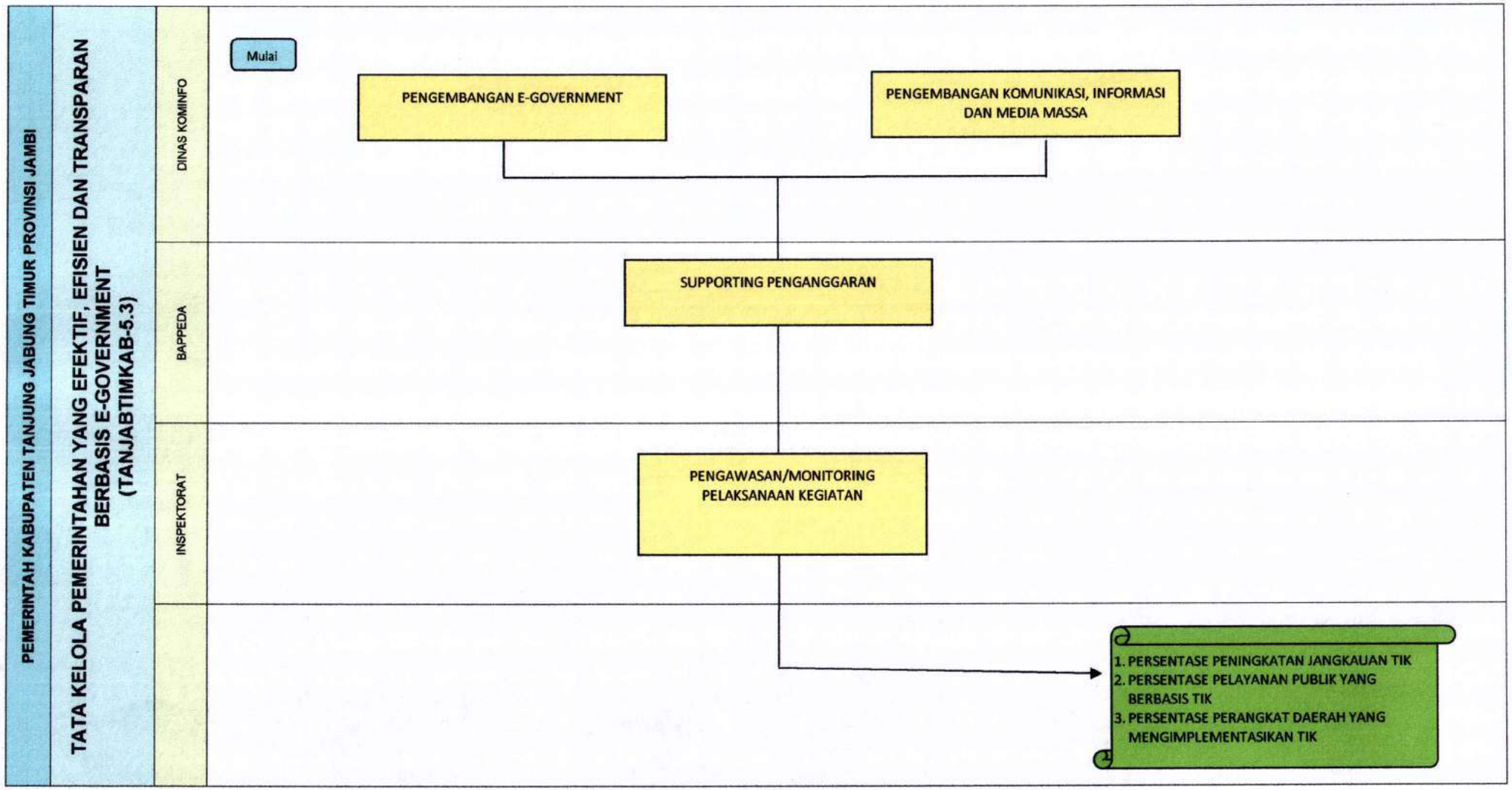

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 : TANJABTIMKAB-5.4

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

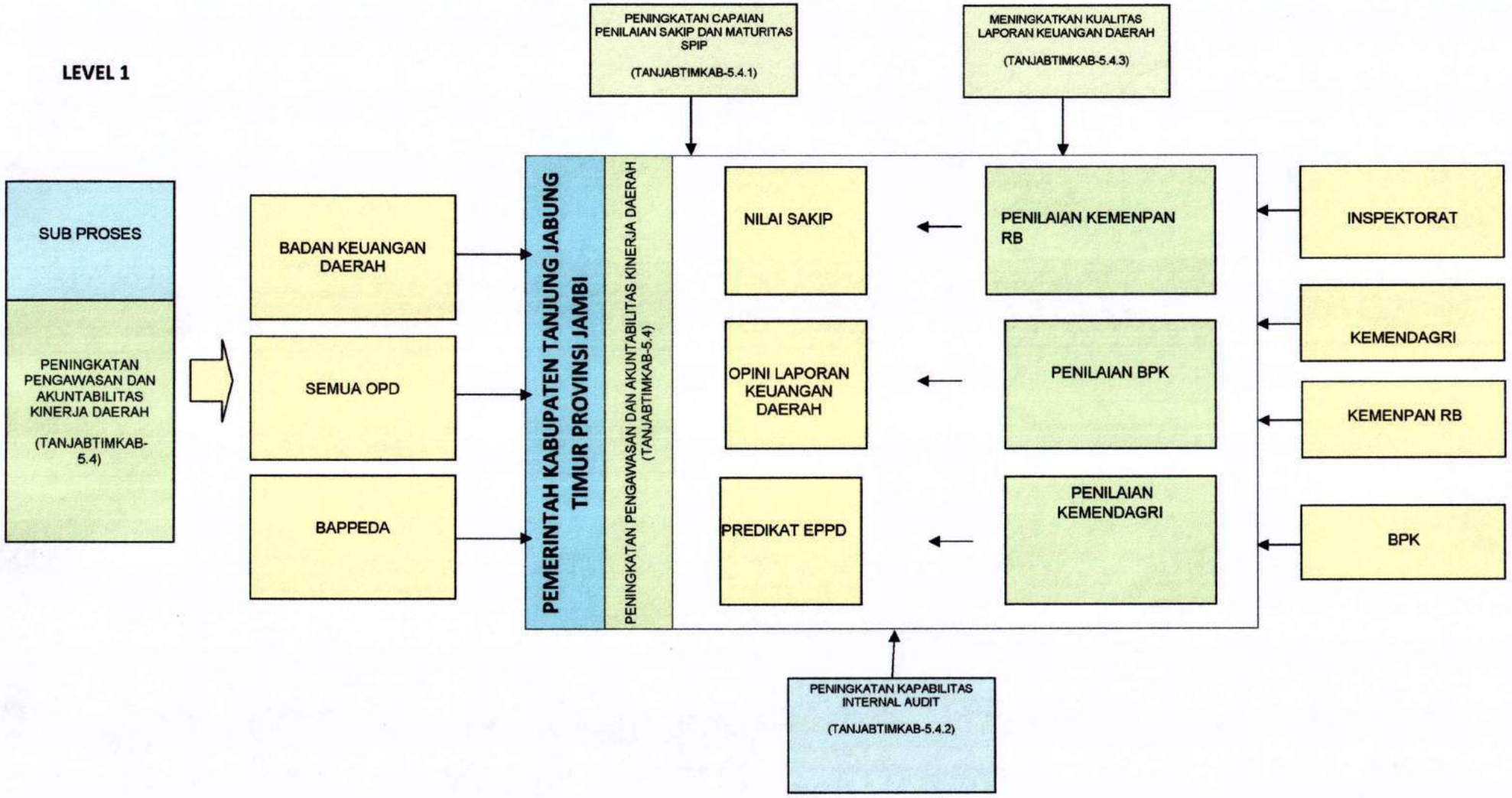

PETA LINTAS FUNGSI

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (TANJABTIMKAB-5.4)

LEVEL 2

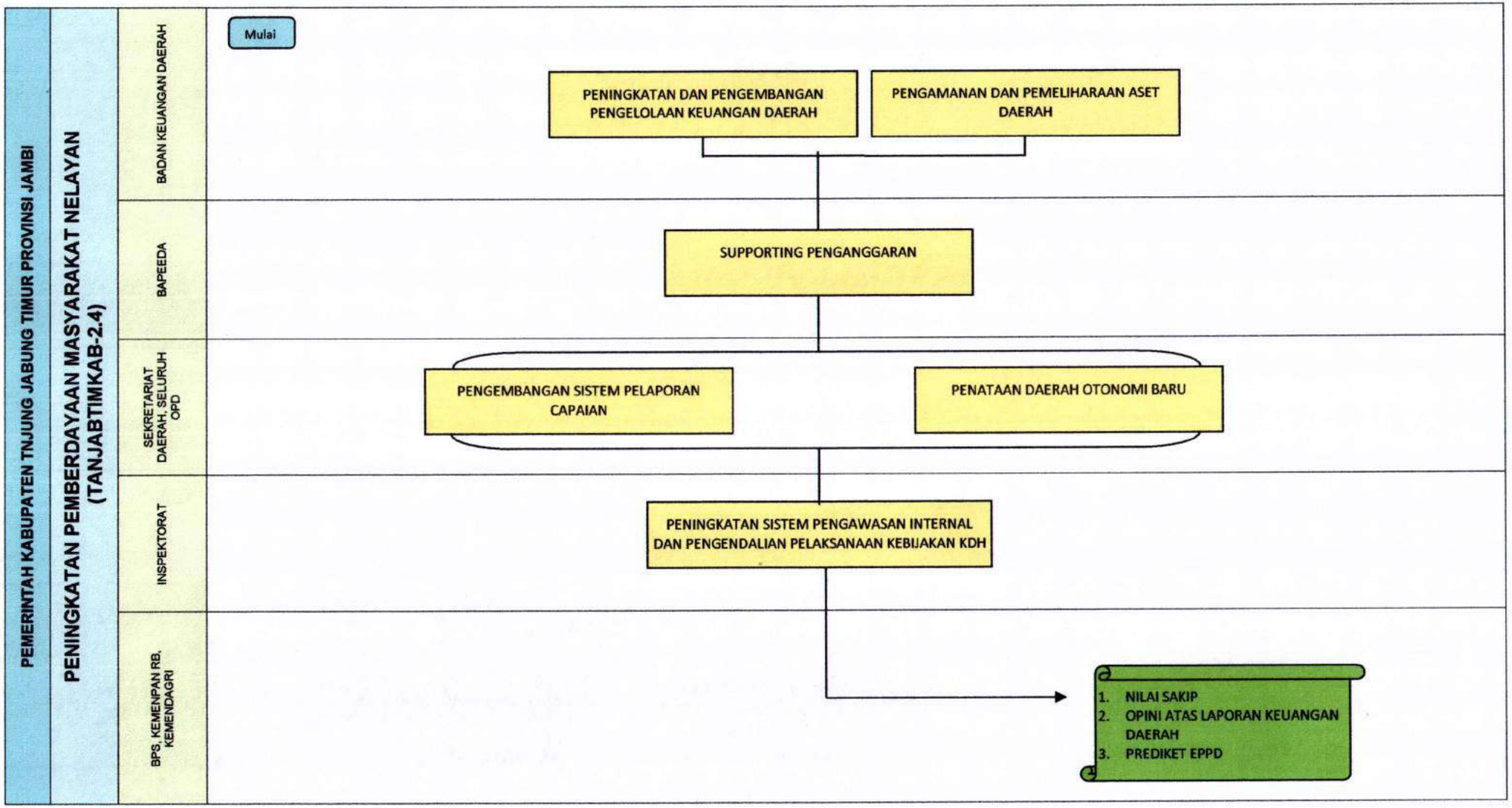

PETA LINTAS FUNGSI
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA (TANJABTIMKAB-2.5)

LEVEL 2

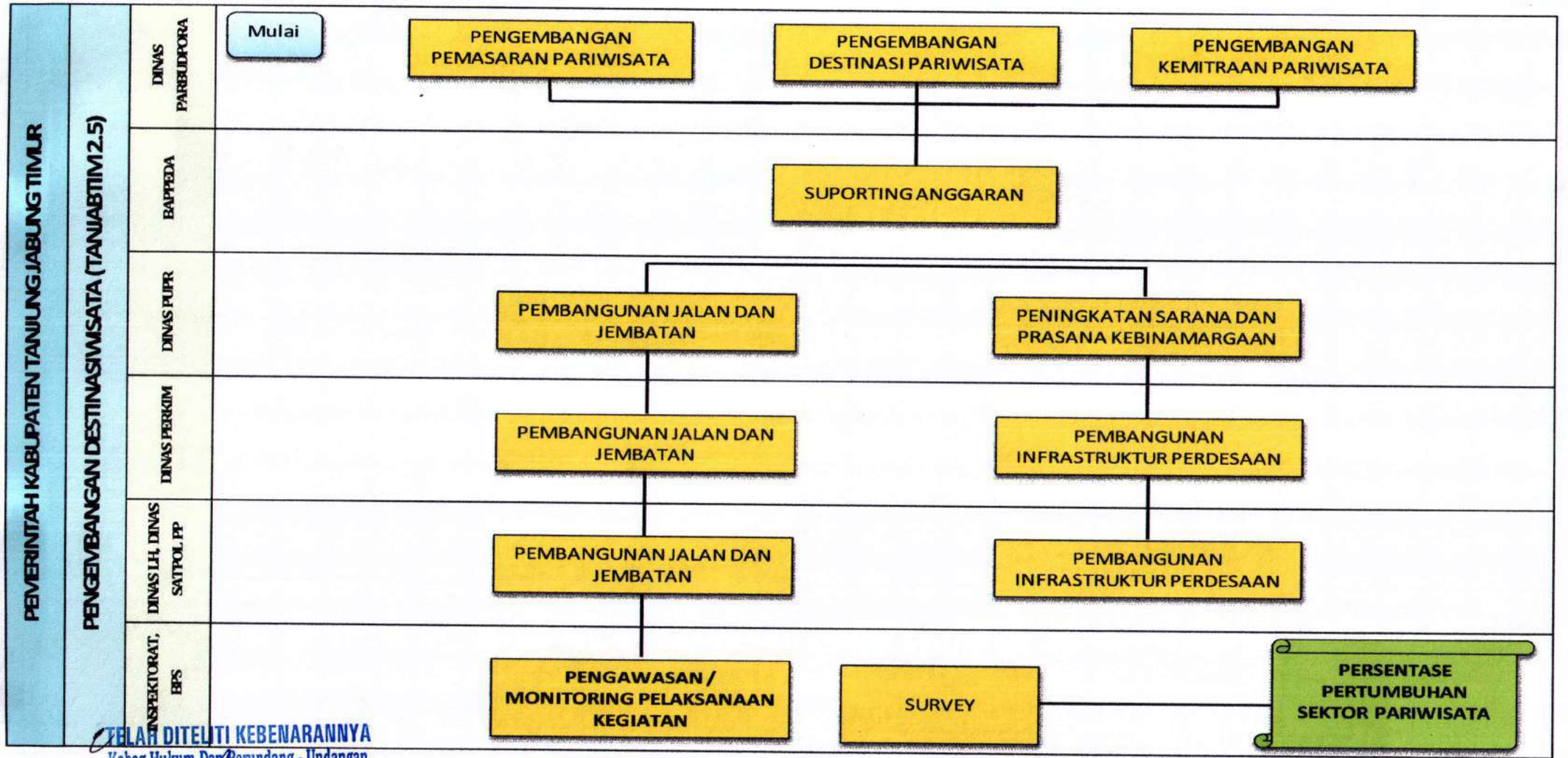

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 006

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
NIP	NIP	NIP

Pjs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

14/10 2020

H. VARIAL ADHI PUTRA

LAMPIRAN VIII

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah

Nama : **S A P R I L, S.IP**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MuaraSabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

S A P R I L, S.IP
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP : 19690419198908 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daaerah	Skor / Nilai Evaluasi LPPD Kabupaten	1
	Persentase batas wilayah kabupaten yang diselesaikan	3
	Persentase permasalahan kasus lahan yang terselesaikan	75%
Meningkatnya kualitas qori dan qori'ah	Peringkat capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi / Nasional	1
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase respon positif masyarakat terhadap kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%
Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup Setda	Persentase keselarasan perencanaan Setda terhadap RPJMD	100%
	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan	96,35%
Terkendalinya laju inflasi	Cakupan pengendalian terhadap inflasi	95%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan yang efektif	Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa tepat waktu	95%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%
	Nilai AKIP Kabupaten Kabupaten	61%
	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran dan tepat fungsi	85%
	Indeks kepuasan layanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.621.308.725,19	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.800.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	69.801.000,-	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.500.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.398.700,-	APBD
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.750.000,-	APBD
7	Program Penataan Pelayanan Publik	26.924.800,-	APBD
8	Program Penataan Otonomi Baru	619.744.400,-	APBD
9	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	2.191.902.000,-	APBD
10	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	861.188.750,-	APBD

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
11	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	296.581.600,-	APBD
12	Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qur'ani	1.798.426.500,-	APBD
13	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	252.532.500,-	APBD
14	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	219.197.650.-	APBD
15	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	59.015.000,-	APBD
16	Program Penataan Perangkat Daerah	261.351.500,-	APBD
17	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	457.250.00,-	APBD
18	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.221.120.791,-	APBD

Pjs.BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

SEKRETARIS DAERAH

S A P R I L, S.IP
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP : 19690419198908 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transfaran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFARUDDIN, S.IP
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM
Jabatan : Pjs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Pjs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR	SEKRETARIS DPRD
H.VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM	**SYAFARUDDIN, S.IP**
	Pembina TK I (IV/b)
	NIP. 19671015 198810 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan	Indeks Kepuasan Dewan terhadap Kesekretariatan	78
		Indeks Kepuasan OPD terhadap Kesekretariatan	78
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kesekretariatan	78

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7,704,114,000.42	APBDP
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	2,727,652,000	APBDP
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	159,475,000	APBDP
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	104,264,900	APBDP
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	39,200,000	APBDP
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	141,596,000	APBDP
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	4,942,039,100	APBDP
			15,818,341,000.42	

Muara Sabak, November 2020

Pjs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H.VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

SEKRETARIS DPRD

SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Tk I(IV/b)
NIP. 19671015 198810 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHAS PURROJANI, S.Sos**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, SE, MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur
Selaku atasan langsung pihak pertama

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
H. VARIAL ADHI PUTRA, SE, MM	**SUHAS PURROJANI, S.Sos**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1		Level IACM (Internal Auditor Control Model)	Level 2
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	2		Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3		Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%
		4		Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal B	75%

No	Program	Anggaran				Keterangan
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	72,000,000.00	75,543,100.00	1,627,000.00	- 78,011,600.00	APBD
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	575,806,000.00	1,183,322,100.00	121,685,050.00	578,480,065.00	APBD

Muara Sabak, November 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, SE, MM

INSPEKTUR
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

SUHAS PURROJANI, S.Sos

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ALI FAHRUDDIN, M.P.A**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M	**Drs. ALI FAHRUDDIN, M.P.A**

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	**TARGET 2020**
1	Mengoptimalkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi RKPD dalam APBD	94%
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	94%
3	Menyediakan data yang akurat dan valid sebagai bahan Perencanaan dan Informasi	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
		Nilai AKIB	71%
		Laporan Keuangan sesuai SAP	Sesuai

Jumlah APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 5.393.341.865,24 yang terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.615.555.260,50 dan,
2) Belanja Langsung sebesar Rp. 2.777.786.604,74

No	Program	Belanja Langsung (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	920,555,893.34
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293,305,900.00
3	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	15,825,000.00
4	Pengembangan Data dan Informasi	62,643,000.00
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	583,909,900.38
6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	262,470,458.00
7	Perencanaan Sosial Budaya	358,531,064.02
8	Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan LH	280,545,389.00
Jumlah		**2,777,786,604.74**

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M

KEPALA BAPPEDA

Drs. ALI FAHRUDDIN, M.P.A

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUSIRWAN, SE**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji, akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama

NUSIRWAN, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680908 199403 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	1. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilatas kinerja dan Keuangan	1. Skor IKM	78
		2. NILAI AKIP	66
		3. Laporan Keuangan	Sesuai
	2. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4. WTP	WTP
	3. Meningkatnya Pendapatan Daerah	5. Persetase Peningkatan PAD	2,2%
		6. Persentase Peningkatan Dana Perimbangan	2,3%
	4. Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	7. Tertib Administrasi Penatausahaan Aset	35

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KET
1	2	3	4
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.738.053.620,54	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	875.642.946,00	
III	Peningkatan Dispilin Aparatur	-	
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.850.000,00	
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	122.845.500,00	
VI	Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000,00	
VII	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.913.720.580,00	
VIII	Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah	108.479.812,00	
Jumlah		**9.772.592.458,54**	

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NUSIRWAN, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680908 199403 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Drs. IMRON TB, M.Pd**
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**
Jabatan	:	Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM	**Drs. IMRON TB, M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan lingkungan yang kondusif di masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat yang Difasilitasi	100%
2	Menciptakan Stabilitas Politik yang demokratis agar tetap tegaknya persatuan dan kesatuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Indeks Kebebasan Sipil	82%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75
		Nilai AKIP	65
		Laporan Keuangan	susuai

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	713.797.500,60	
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp	119.000.000,00	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp	36.947.000,00	
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	24.066.000,00	
5	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	60.695.000,00	
6	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp	50.617.000,00	
7	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rp	3.185.741,70	
8	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	3.030.000,00	
9	Perwujudan Penguatan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp	44.657.000,00	
	JUMLAH	**Rp**	**1.055.995.242,30**	

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM	**Drs. IMRON TB, M.Pd**

PERYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HADI FIRDAUS, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM**
Jabatan : PJS Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM	**Drs. HADI FIRDAUS, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menjadikan Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional dalam Tugas	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tugas	59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor IKM	78
		Nilai AKIP	67
		Laporan Keuangan	Sesuai
3.	Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Yang Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Berbasis IT	30%

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.302.078.400,00**
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**254.317.697,51**
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	**37.350.000,00**
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**12.000.000,00**
5. Perencanaan Pembangunan Daerah	**23.000.000,00**
6. Pendidikan Kedinasan	**35.672.200,00**
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**5.680.000,00**
8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**1.356.861.885,00**
JUMLAH	**3.026.960.182,51**

Muara Sabak, November 2020

PJS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM

KEPALA BKPSDMD,

Drs. HADI FIRDAUS, M.Si

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **J A K F A R, S.Sos**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya di sebut pihak Pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., MM.**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., MM.

Pihak Pertama

J A K F A R, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196806121988101001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melindungi masyarakat dari bencana	Persentase desa tangguh bencana	24 Desa/Kel.	
2.	Meningkatnya waktu penanganan korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan	persentase waktu penanganan bencana kurang dari 1 hari	100%	
		Tingkat pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan di daerah bencana	50%	
3.	Sarana dan Prasana Masyarakat korban bencana bisa dipulilhkan	Tingkat pemulihan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi	100%	
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	77	
		Nilai AKIP	65	
		Laporan Keuangan	Sesuai	

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp 761,154,380
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 470,700,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 31,650,000
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 37,020,760
5	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Rp 1,193,915,000
6	Program Tanggap Darurat	Rp 1,237,782,000
7	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	Rp 29,290,000

Muara Sabak, November 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., MM.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

JAKFAR, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196806121988101001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
PERUBAHAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG TIMUR

TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.,MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.,MM

Pihak Pertama,

ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19740331 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kajian yang dipergunakan dalam rangka mengambil kebijakan daerah	1	Persentase kaijan yang dipergunakan	75
		2	Persentase Peningkatan Partisifasi Masyarakat / Lembaga Pendidikan dalam Lomba KTI dan TTG	75
2.	Meningkatnya Pelayanan publik ,Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3	Skor IKM	B
		4	Nilai Akip	B
		5	Laporan Keuangan	SESUAI

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580.508.517,53	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158.295.500,-	100 %
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	-	100 %
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.000.000,-	100 %
5	Program Penelitian dan Pengembangan	216.603.149,-	100 %
6	Program Kelembagaan dan Kelaksanaan	2.770.000,-	100 %
Jumlah		**972.177.166,53**	**100 %**

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.,MM

Pihak Pertama

ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19740331 200012 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISDIANSYAH, ST.MM**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

RISDIANSYAH, ST.MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19750527 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancer	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	73.12%
2	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Cakupan luas lahan pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	38%
3	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten	Persentase rekomendasi kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%
4	Meningkatnya kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel, Profesional dan Berintegrasi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	90%
		Persentase peningkatan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kecamatan	82%
5	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM	82
		Nilai AKIP	68
		Laporan Keuangan	Sesuai

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.648.322.050,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	12.019.149.452,05	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	83.600.000,00	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	18.000.000,00	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	10.000.000,00	
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	71.825.016.249,00	

7	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp.	7.909.115.000,00
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp.	15.448.798.500,00
9	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp.	36.448.214.000,00
10	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	1.387.199.850,00
11	Pemberdayaan Jasa Kontruksi	Rp.	121.803.898,98
12	Pemanfaatan Tata Ruang	Rp.	206.639.550,00
13	Pengendalian Tata Ruang	Rp.	93.500.900,00
	JUMLAH	**Rp.**	**148.219.359.450,03**

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

RISDIANSYAH, ST.MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19750527 200212 1 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ADIL P ARITONANG**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA

Pihak Pertama,

Drs. ADIL P ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808311988101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman	1	Persentase pengurangan kawasan kumuh	5,12%
		2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	77,00%
		3	Persentase sanitasi layak	67,00%
		4	Persentase jalan lingkungan kondisi baik	40,59%
		5	Persentase Titik taman yang terbangun	88%
3	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	6	Skor IKM	60%
		7	Nilai AKIP	70%
		8	Laporan Keuangan	sesuai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	(APBD/APBN)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.977.413.000,00
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	8.043.835.122,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.900.000,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	42.800.000,00
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00
7	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	14.083.449.969,63
8	Program Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih	9.356.687.850,00
9	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	1.210.703.200,00
10	Program penerangan lampu kota	2.841.967.645,00
11	Program penyediaan saran prasarana sanitasi	1.510.127.000,00
		40.079.883.786,63

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA

Pihak Pertama

Drs. ADIL P ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808311988101001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **ERNAWATI,S.Kep,Ns.M.Kes**
Jabatan	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	: **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST,MM**
Jabatan	: Pjs Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Pjs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR	**KEPALA DINAS KESEHATAN**
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST,MM	**ERNAWATI,S.Kep,Ns,M.Kes**
	Pembina Tk.I (IVb)
	NIP. 19690617199502 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	65.65 Tahun
		Indeks Keluarga Sehat	0.15%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.63%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		SUMBER DANA
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2,559,509,129.85	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	66,492,000	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	34,360,063	APBD
4	Program Perencanaan Pembangunan	Rp	183,119,634	APBD
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	1,293,648,000	DAK
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	29,080,350,225.64	APBD/DAK
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	339,602,279	APBD/DAK
8	Program perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	818,109,000	APBD/DAK
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	250,749,000	APBD/DAK
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	5,552,608,500	APBD/DAK
12	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp	15,652,305,000	APBD/DAK
14	Program pengawasan dan pengendalian	Rp	6,200,000	APBD
15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Rp	64,440,000	DAK
17	Program Pengembangan Kesehatan	Rp	2,073,619,000	APBD/DAK
20	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Rp	1,443,654,000	DAK
21	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp	568,657,000	APBD/DAK

Muara Sabak, November 2020

Pjs Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST,MM

Kepala Dinas Kesehatan

ERNAWATI, S.Kep, Ns, M.Kes
Pembina Tk.I (IVb)
NIP : 19690617199503 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. JUNAEDI RAHMAD, MH**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**

Jabatan : Pjs.Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 25 November 2020

PIHAK KEDUA

H.VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM

PIHAK PERTAMA

DRS.JUNAEDI RAHMAD,MH
Pembina utama Muda/IVc
NIP.19690103 1990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **Dinas Pendidikan**
Tahun Anggaran : **2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	7 Tahun
		2. Harapan Lama Sekolah	11.38%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indek Kepuasan Masyarakat	82,25
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	67,39

NO.	PROGRAM	PAGU
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,425,520,153
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,135,334,615
3	Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	120,540,000
4	Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capain Kinerja Aparatur Capaian Kinerja Keuangan	10,000,000
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000
6	Pendidikan Anak Usia Dini	4,037,938,000
7	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	79,790,005,122
8	Pendidikan Non Formal	1,561,973,200
9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,148,010,000
10	Manajemen Pelayanan Pendidikan	122,360,000.00
		92,366,681,090.00

Pjs.Bupati Tanjung Jabung Timur

H.Varial Adhi Putra, ST.MM

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Drs. Junaedi Rahmad,MH
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19690103 199003011004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARUJI, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM	**ARUJI, SH** Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19681018200121002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	1. Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat/Skor IKM	86
		2. Nilai AKIP	67
		3. Nilai Laporan Keuangan	Sesuai
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Masyarakat	1. Persentase Peningkatan Masyarakat yang memiliki KK	100%
		2. Persentase Peningkatan Penduduk wajib KTP yang ber KTP	100%
		3. Persentase Anak 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	80.05%
		4. Persentase Anak yang memilliki Kartu Identitas Anak	15%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Rp	1,014,133,100.34	APBD-P
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	2 Rp	157,897,900.00	APBD-P
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Rp	1,250,000.00	APBD-P
			APBD-P
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Rp	2,000,000.00	APBD-P
5. Penataan Administrasi Kependudukan	5 Rp	1,021,550,000.00	APBD-P
6. Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Rp	508,912,600.00	APBD-P
TOTAL	**Rp**	**2,705,743,600.34**	

Muara Sabak, November 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ARUJI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681018 200012 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Drs. IBNU HAYAT, M.M**
JABATAN : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

NAMA : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**
JABATAN : Pjs. Bupati Kabuapten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

Pihak Pertama

Drs. IBNU HAYAT, M.M
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19690214 198908 1001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : DINAS PERIKANAN
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi	1. Persentase Peningkatan Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,05 %
		2. Persentase Peningkatan Produksi Pengelolaan Perikanan Tangkap	0,45 %
	Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan	3. Persentase Produksi pengolahan sesuai dengan Yang diminta oleh Pasar	0,45 %
2.	Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Perikanan	4. Persentase Peningkatan Lokasi Kelestarian Sumberdaya Perikanan	1 Lokasi
3.	Meningknya Pelayan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5. Skor IKM	76
		6. Nilai AKIP	B
		7. Nilai Laporan Kuangan	B

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Administrasi Perkantoran	950.975.220,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173.000.000,00	
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	86.767.305.00	
4.	Perencanaan Pembangunan Strategi Daerah (Renstra dan Renja)	46,150.000.00	
5.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	276.143.500.00	
6.	Pengembangan Budidaya Perikanan	500.188.000.00	
7.	Pengembangan Perikanan Tangkap	2,159.904.500.00	
8.	Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	341.232.323,40	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**4.534.360.848,40**	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (PEGAWAI)	**2.648.334.321,65**	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**7.182.695.170,05**	

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

Pihak Pertama

Drs. IBNU HAYAT, M.M
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19690214 198908 1001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **IDRIS, SE**

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan sanksi.

MuaraSabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

IDRIS, SE
Pembina TK.I/IV b
Nip. 19650914 198603 1003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1	2	3	4
1	Meningkatkan ketahanan pangan	1. Persentase peningkatan ketersediaan pangan 2. Persentase penanganan daerah rawan pangan 3. Prevalensi harga pangan 4. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	95,18% 100% CV <10% 12 Kali
2	Meningkatkanya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai indeks kepuasan / skor ikm 2 Nilai AKIP 3 Laporan keuangan yang baik	77 67 Sesuai

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	:	926.486.650,00	APBD-P
2	Program sarana dan prasarana aparatur	:	47.965.000,00	APBD-P
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	:	3.875.000,00	APBD-P
4	Program perencanaan pembangunan daerah	:	1.100.000,00	APBD-P
5	Program peningkatan ketahanan pangan	:	474.628.960,07	APBD-P
	Jumlah		**1.465.055.610,07**	

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

IDRIS, SE
Pembina TK.I/IV b
Nip. 19650914 198603 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERMAN TONI, S.E, M.E**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T, M.M**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T, M.M

Pihak Pertama,

HERMAN TONI, S.E, M.E
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19780420 200212 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	- Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi IT	61%
		- Cakupan layanan akses internet pada ruang publik	75%
		- Persentase peningkatan jangkauan TIK	95%
		- Cakupan Layanan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat desa/kelurahan	12.9%
		- Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	60%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Nilai AKIP	66
		Laporan Keuangan Hasil Evaluasi Inspektorat	Sesuai

Program		Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	89,056,252.77	APBD II
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	156,606,300.00	APBD II
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	9,275,000.00	APBD II
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2,500,000.00	APBD II
5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	287,665,543.00	APBD II
6. Pengembangan e - Government	Rp	1,541,289,400.00	APBD II

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T, M.M

Muara Sabak, November 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

HERMANTONI, S.E, M.E

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19780420 200212 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorintasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HADI FIRDAUS, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**

Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM	**Drs. HADI FIRADAUS, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat	0,30%
		Persentase Penurunan Kecelakaan Air	0,02%
		Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas	37,26%
		Persentase Pemasangan Perlengkapan Keselamatan	1,00%
		Persentase Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100,00%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
		Nilai AKIP	B
		Laporan Keuangan	Sesuai

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.618.344.500,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	742.210.000,00	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.667.613,00	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.632.000,00	
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	255.310.000,00	
7	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	32.680.000,00	
8	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	195.212.258,72	
9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.400.000.000,00	

Muara Sabak, November 2020

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Drs. HADI FIRDAUS, M. Si

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SYAHBUDIN, M.H**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

Pihak Pertama

Drs. SYAHBUDIN, M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670918 199703 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah**
Tahun Anggaran : **2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya koperasi yang mandiri	Persentase peningkatan koperasi mandiri	25%
2	Meningkatnya usaha mikro ke usaha kecil	Persentase peningkatan usaha kecil	6%
3	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Skor IKM	78
		Nilai AKIP	62
		Nilai Laporan Keuangan	Sesuai

NO.	PROGRAM	PAGU
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	452,806,805.11
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152,414,400
3	Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capain Kinerja Aparatur Capaian Kineria Keuangan	51,625,006
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	3,750,000
5	Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif	-
6	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	117,918,525
7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	228,362,250
	Jumlah	**1,006,876,986.11**

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. Varial Adhi Putra, ST, MM

Kepala Dinas

Drs. Syahbudin, MH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **GUSTIN WAHYUDI, S.STP**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM	**GUSTIN WAHYUDI, S.STP**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.50
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan	Cakupan Layanan Penanganan Sampah	86%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Rp 2.476.885.618,00	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Rp 817.660.000,00	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	3. Rp -	
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4. Rp 10.000.000,00	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	5. Rp 5.600.000,00	
6. Perencanaan Pembangunan Daerah	6. Rp 5.600.000,00	
7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	7. Rp 64.120.000,00	
8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8. Rp 327.644.797,52	
9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9. Rp 299.359.500,00	
	Rp 4.006.869.915,52	

Muara Sabak, November 2020

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

GUSTIN WAHYUDI, S.STP

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MARIONTONI, S.Sos**
Jabatan	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

NAMA	:	**H. VARIAL ADHI PUTRA, ST,MM**
Jabatan	:	Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST,MM

Pihak Pertama

MARIONTONI, S.Sos
Pembina Utama Muda (III/c)
NIP. 19690324 198908 1 001

FORMULIR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kompetensi dan atau tenaga kerja terampil mandirii	50%
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial tenaga Kerja	1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial. 2. Persentase tenaga kerja yang diberikan upah sesuai peraturan. 3. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	90% 90% 100%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kawasan eks Transmigrasi	Persentase Rata-rata pendapatan masyarakat eks transmigrasi ≥ Rp.1.700.000,-	60%
4.	Meningkatnya kualias pelayanan publik dan akuntabiltas kinerja	1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Nilai AKIP 3. Laporan Keuangan	77 65 Sesuai SAP

NO	Program	Anggaran (Rp)	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.326.363.387,30
2.	Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	250.200.000,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	15.000.000,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	53.710.000,00
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	17.040.342,50
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	21.615.000,00
7.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	97.414.000,00
.	Program Pembinaan Hubungan Industrial	Rp.	38.044.000,00
9.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp.	1.098.511.498,00
JUMLAH		**RP.**	**2.917.898.227,80**

Muara Sabak, November 2020

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST,MM

KEPALA DINAS

MARIONTONI, S.Sos
Pembina Utama Muda (III/c)
NIP. 19690324 198908 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan beriorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DEDDY ARMADI, SH.MH

Jabatan : Kepala Dinas Parbudpora Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

DEDDY ARMADI, SH.MH
Pembina Tk I (IV/b)
Nip. 197506152000121004

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Disparbudpora
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kunjungan Wisata dan Perekonomian Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	9,55%
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah	55%
Meningkatkan Kelestrasian Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarikan	41%
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peringkat Prestasi pada Porprov	Peringkat 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	'- Indeks Kepuasan Masyarakat	(79) B
	'- Nilai AKIP	(60,01-70,00) B

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Rp. 953.783.250	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Rp. 497.302.500	
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3. Rp. 24.000.000	
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rp. 16.500.000	
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	5. Rp. 169.600.000	
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6. Rp. 628.900.000	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	7. Rp. 609.608.500	
8. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	8. Rp. 320.417.429	
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	9. Rp. 629.000.000	
10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	10. Rp. 154.350.000	
11. Program Pengembangan Destina Pariwisata	11. Rp. 1.689.931.000	
12. Program Pengembangan Kemitraan	12. Rp. 410.830.000	

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Kepala Dinas Parbudpora

DEDDY ARMADI, SH.MH
Nip. 197506152000121004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. HERO SURATMAN

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. VARIAL ADI PUTRA, ST. MM

Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADI PUTRA, ST. MM

Pihak Pertama,

Drs. HERO SURATMAN

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing	- Jumlah IKM yang produktif	595 IKM
	- Persentase Pertumbuhan IKM	88,91%
Meningkatnya stabilitas harga barang serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	54,15%
Meningkatnya kualitas dan Prasarana pasar tradisional	Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik	9 Pasar
	Persentase pasar dalam kondisi baik	90%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.421.300,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.980.000,00
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	27.070.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000,00
5	Program Pengembangan dan Peningkatan IKM	299.625.699,24
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	210.121.000,00
7	Program Kemetrologian, Pengawasan dan Tertib Niaga	89.325.000,00
8	Program Peningkatan Manejemn Pasar	579.966.980,00
	Jumlah	**2.065.509.979,24**

Muara Sabak, Nopember 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. VARIAL ADI PUTRA, ST. MM

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. HERO SURATMAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. RAJITO**
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM

Pihak Pertama,

Ir. RAJITO
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660211199203 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam	0,26%
		2. Persentase Peningkatan Produksi Kopi	1,94%
		3. Persentase Peningkatan Produksi Pinang	2,02%
		4. Persentase Penurunan Kebakaran Lahan dan Kebun	0,06%
		5. Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan	2%
2	Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Daging	6. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	4,18%
		7. Persentase Peningkatan Produksi Daging	4,17%
		8. Persentase Penurunan Tingkat Kematian Ternak	2,20%
		9. Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	4,93%
		10. Persentase Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet	15%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	11. Nilai Indeks Kepuasan/Skor IKM	77
		12. Nilai AKIP	72
		13. Laporan Keuangan yang Baik	Sesuai

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.736.047.367,00	APBD II
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	317.197.000,00	APBD II
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	32.690.000,00	APBD II
4.	Perencanan Pembangunan Daerah	Rp.	1.750.000,00	APBD II
5.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	5.808.000,00	APBD II
6.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	9.800.000,00	APBD II
7.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	687.342.000,00	APBD II
8.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Rp.	324.833.000,00	APBD II
9.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/ Perkebunan	Rp.	499.973.919,24	APBD II
10.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Rp.	137.044.000,00	APBD II
		Rp.	**3.752.485.286,24**	

Muara Sabak, November 2020

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Ir. RAJITO
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660211199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

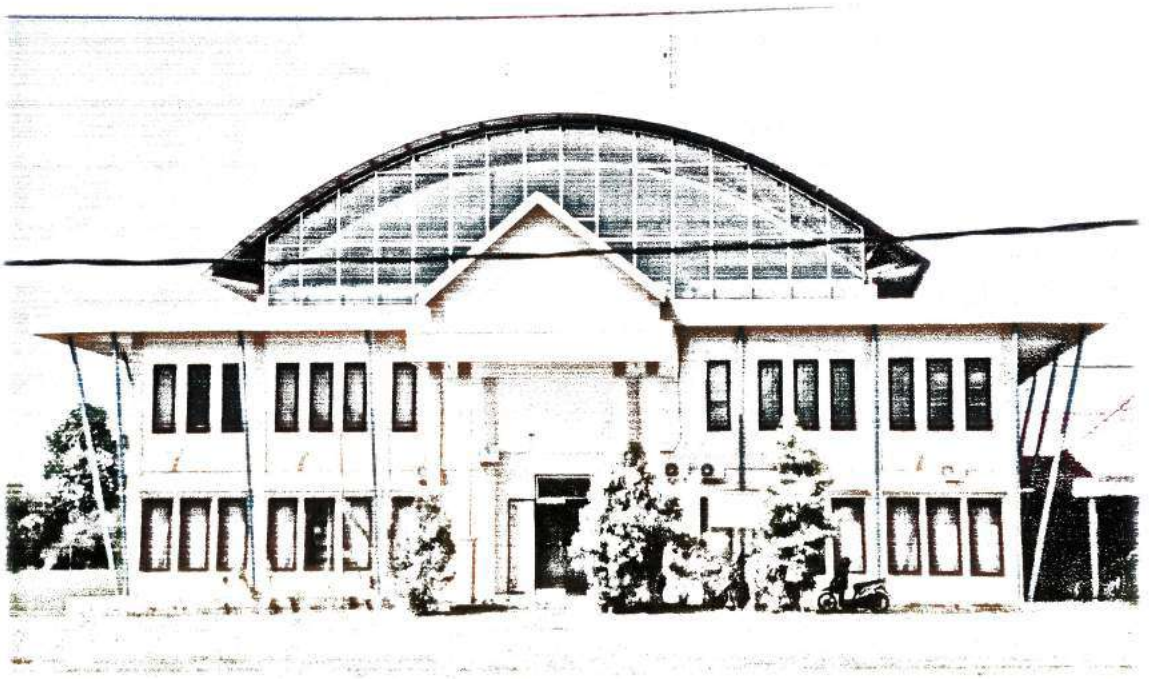

TAHUN 2020

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ARMAN**

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM**

Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak **KEDUA**	**Pihak PERTAMA**
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM	**Drs. ARMAN** Pembina Utama Tingkat I /IV.c NIP. 196610081988101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan KerjaPerangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Layanan Instansi - Nilai AKIP - LaporanKeuangan	- 81,18 - 77 - 70 - Sesuai
2.	Meningkatnya Minat Baca	- Persentase Peningkatan Kunjungan	- 10%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perpustakaan	- Persentase Perpustakaan Sekolah yang berstandar	- 2%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku	- Persentase Arsip yang di amankan	- 2 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**Rp. 2.156.060.610,70**
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**Rp. 1.022.663.242,40**
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.616.497.742,40
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.204.174.500,00
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 0,00
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.9.080.000,00
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.6.680.000,00
6.	Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan	Rp. **165.746.000,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN
7.	Peningkatan Kualitas PelayananInformasi Arsip	Rp.**20.485.000,00**
	JUMLAH	**Rp. 3.178.723.853,10**

Pjs. BupatiTanjungJabungTimur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM

KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Drs. ARMAN
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196610081988101001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. BERILYAN**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muara Sabak, 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM

Pihak Pertama

Drs. BERILYAN
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19680820 198908 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	89.04%
2	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	54.79%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Skor IKM	80
		Nilai AKIP	68
		Laporan Keuangan	Sesuai

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	533,286,900.66	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	160,205,499.00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	-	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	-	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	4,050,000.00	APBD
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	3,220,000.00	APBD
7.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	99,735,000.00	APBD
8.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	136,904,000.00	APBD
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	590,810,000.00	APBD
10.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	356,899,696.00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**1,885,111,095.66**	

Muara Sabak, 2020

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST,MM

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. BERILYAN
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19680820 198908 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUHAMAD EDUARD**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**

Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM	**Drs. MUHAMAD EDUARD**
	NIP. 197404081993031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,810 (A)
		2. Nilai AKIP	68
		3. Laporan Keuangan	Sesuai
2.	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Nilai RealiasiInvestasi PMDN (Rp) *(dalam juta rupiah)*	330.750
		2. Nilai RealiasiInvestasi PMA ($)	5.202.000

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Adminitrasi Perkantoran.	Rp	538.916.594	APBD
2. Program Sarana dan Prasaranna	Rp	151.232.500	APBD
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Rp	39.400.000	APBD
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp	900.000	APBD
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Rp	269.428.250	APBD

Muara Sabak, November 2020

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. MUHAMAD EDUARD
NIP. 197404081993031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Barusman, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA ST, MM

Pihak Pertama,

BARUSMAN, S.Sos
Pembina TK I / IV b
NIP. 19650418 198703 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target 2020
1.	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,76%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3,8%
		Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	67,5%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9%

No	Program	Anggaran		Sumber Dana
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	977.012.155,00	APBD (11 kegiatan)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	172.010.000,00	APBD (3 kegiatan)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	-	APBD (1 kegiatan)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	11.000.000,00	APBD (1 kegiatan)
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	7.000.000,00	APBD (1 kegiatan)
7	Program Keluarga Berencana	Rp	3.420.892.600,00	APBD/DAK/BOKB (12 kegiatan)
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	5.000.000,00	APBD (3 kegiatan)
11	Program Pengendalian Penduduk	Rp	13.900.000,00	APBD (1 kegiatan)
15	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp	306.690.000,00	APBD/BOKB (2 kegiatan)

Muara Sabak, November 2020

Bupati Tanjung Jabung Timur

(H. Varial Adhi Putra, ST, MM)

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Barusman, S.Sos
Pembina TK I / IV b
NIP. 19650418 198703 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**MUHAMMAD RIDWAN, S.I.P.**
Jabatan	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.**
Jabatan	:	Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.	**MUHAMMAD RIDWAN, S.I.P.**
	NIP. 19721207 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, jaminan dan rehabilitasi sosial keluarga dan fakir miskin	1. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase masyarakat miskin desil 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial 3. Cakupan masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial 4. Cakupan masyarakat Disabilitas mandiri	70 10 60 8
Meningkatkan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	65
Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	1. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2. Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	90 Pratama
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai AKIP	80 62

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 627.465.192,30,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 165.920.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 0,-
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 12.040.750,-
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 6.220.000,-
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 27.350.000,-
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 397.341.728,-
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 5.000.000,-
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Rp. 90.902.600,-
10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 0,-
11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 726.600.000,-
J u m l a h	**Rp. 2.058.840.270,30,-**

Muara Sabak, November 2020

BUPATI TANJUNG AJABUNG TIMUR

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MUHAMMAD RIDWAN, S.I.P.
NIP. 19721207 199203 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNARNO, SP**
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur,

H. VARIAL ADHI PUTRA

Kepala Dinas,

SUNARNO, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	%
1	Meningkatnya produksitivitas tanaman Pangan	Persentase peningkatan Produktivitas tanaman Padi (Ton/Ha) (GKG)	0,71	%
2	Meningkatnya produksitivitas tanaman hortikultura	Persentase peningkatan Produktivitas tanaman Hortikultura (ton/Ha) Semangka	7,50	%
3	Meningkatnya sarana prsarana pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Persentase sarana prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	71,75	%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Penyuluh Pertanian	Persentase peningkatan Penyuluh Pertanian berprestasi	3	%
5	Meningkatnya kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	101,30	%
6	Meningkatnya pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Pemenuhan Komponen IKM	82	
		2. Pemenuhan Komponen / Nilai SAKIP	B	
		3. Laporan Keuangan tepat waktu	SESUAI	

Jumlah APBD Tahun 2020 yang terdiri dari : **12.953.034.423**

1) Belanja tidak langsung 6.975.868.311

2) Belanja Langsung sebesar 5.977.166.112

PROGRAM	ANGGARAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.191.405.500
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	291.224.500
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129.768.712
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.341.700
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	633.100.000
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan	16.847.000
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	23.749.200
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	2.688.729.500
TOTAL ANGGARAN	5.977.166.112

Pjs. Bupati Tanjug Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

SUNARNO, SP

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN

RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transfaran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. H. MUHAMMAD NASRUL FELANI**

Jabatan : Direktur RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM**

Jabatan : Pjs Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

Pihak Pertama,

dr. H. MUHAMMAD NASRUL FELANI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pemberian informasi obat (PIO)	100%
	Indeks kepuasan masyarakat	100%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100%
	BOR (Bed Occupancy Rate)	31,01
	ALOS (Average Length of Stay)	3,09
	BTO (Bed Turn Over)	40,56
	TOI (Turn Over Interval)	7,39
	NDR (Net Death Rate)	0,0012
	GDR (Gross Death Rate)	0,0006
	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit katergori tipe "C"	95%
	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RSU	97%
	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100%
	Persentase pelaksanaan PPI	100%
	Persentase pelaksanaan RSIB	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.236.280.000,00	11 Kegiatan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	966.530.605,42	3 Kegiatan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.572.500,00	7 Kegiatan
4.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35.994.500,00	5 Kegiatan
5.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	53.800.000,00	1 Kegiatan
6.	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	7.404.920.025,00	4 Kegiatan
7.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	135.000.563,80	1 Kegiatan
8.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	688.748.100,00	2 Kegiatan
9.	Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	113.209.000,00	4 Kegiatan
10.	Program Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD	9.763.052.642,97	1 Kegiatan

Pjs Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

Direktur RSU Nurdin Hamzah

dr. H. MUHAMMAD NASRUL FELANI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta beriorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**HENDRI, SE**
Jabatan	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	**H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan	:	Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama

HENDRI, SE
Pembina Tingkat I/IV.B
NIP. 19781109 200501 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan petugas linmas	50 %
2	Peningkatan penanganan pelanggaran Perda	Persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.	50%
3	Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar	63%
		Persentase cakupan layanan kebakaran	63%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.481.193.350,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	252.325.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	80.553.700,00	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	9,000,000.00	APBD
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	18.025.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	227.754.250,00	APBD
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.	1.013.981.500,00	APBD
8	Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	114.502.500,00	APBD
		Rp.	4.197.335.300,00	

Muara Sabak, November 2020

Pjs. BUPATI

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

HENDRI, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT MUARA SABAK BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH**
Jabatan : Camat Muara Sabak Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M**
Jabatan : Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MuaraSabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M	**ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Sabak Barat
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	549.878.050	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.901.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	21.386.000	
5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	19.400.000	
6. Program Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	2.200.000	
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	290.560.000	
8. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	116.395.000	
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Desa	6.248.948.175	

MuaraSabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M

Pihak Pertama,

ARIE JULIAN SAPUTRA, S.IP.,MH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ZULFAISYAL, S.AP**
Jabatan : Camat Kecamatan Muara Sabak Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MuaraSabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM

Pihak Pertama,

ZULFAISYAL, S.AP
Pembina / IV.a
Nip. 19781023 200012 1 003

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Muara Sabak Timur
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	585.030.000	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.830.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	
5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	19.727.000	
6. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Profesi	10.000.000	
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	61.900.000	
8. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	277.500.000	
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.750.250.800	

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM

Pihak Pertama,

ZULFAISYAL, S.AP
Pembina / IV.a
Nip. 19781023 200012 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BUDI WAHYU, S. STP**
Jabatan : Camat Rantau Rasau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM**
Jabatan : Pjs.Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

Pihak Pertama,

BUDI WAHYU, S.STP
Pembina (IV/a)
Nip. 19840308200312 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Rantau Rasau
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

SASARAN 1		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilits Kinerja dan Keuangan		
Indikator Kinerja	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80
Nilal AKIP		65
Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai

SASARAN 2		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Persentase Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Kepala daerah kepada Camat		90,00%

PROGRAM	**ANGGARAN (Rp)**	**KET**
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572.733.800	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.550.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.600.000	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000	
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	3.500.000	
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	53.000.000	
8. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	96.250.000	
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	808.835.000	

Muara Sabak, Nopember 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

CAMAT RANTAU RASAU

BUDI WAHYU, S. STP
Pembina (IV/a)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HELMI AGUSTINIUS, SE**
Jabatan : Camat Nipah Panjang

*Selanjutnya disebut **Pihak Pertama***

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabataan :Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

*Selanjutnya disebut **Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami..

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM	**HELMI AGUSTINIUS, SE**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Nipah Panjang

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	100%
	Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan meningkat	5 jenis pelayanan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	40%
Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat

	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	622.960.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	137.250.000,00	
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	12.500.000,00	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	-	
5	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rp	21.250.000,00	
6	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	Rp	-	
7	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp	-	
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	10.000.000,00	
9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustaman Gender dan Anak	Rp	22.860.000,00	
10	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp	128.300.000,00	
11	Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	1.772.174.500,00	
	JUMLAH	**Rp**	**2.727.294.500,00**	

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Camat Nipah Panjang

HELMI AGUSTINIUS, SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. YANI, SE**
Jabatan : Camat Berbak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM**
Jabatan : Pjs.Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM	**M. YANI, SE**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Berbak
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

SASARAN 1		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilits Kinerja dan Keuangan		
Indikator Kinerja	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80
Nilal AKIP		65
Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai

SASARAN 2		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Persentase Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Kepala daerah kepada Camat		90,00%

PROGRAM	**ANGGARAN (Rp)**	**KET**
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510.431.550	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	212.750.275	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.700.000	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.500.000	
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	16.150.000	
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	2.400.000	
7. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	10.000.000	
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	78.350.000	
9. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	69.150.000	
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	808.311.450	

Muara Sabak, Nopember 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. VARIAL [illegible]

CAMAT BERBAK

[illegible]

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRANS AFRIANTO, S.STP**
Jabatan : Camat Sadu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM**
Jabatan : Pjs.Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM	**FRANS AFRIANTO, S.STP**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Sadu
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

SASARAN 1		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilits Kinerja dan Keuangan		
Indikator Kinerja	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80
Nilal AKIP		65
Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai

SASARAN 2		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Persentase Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Kepala daerah kepada Camat		90,00%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	517.468.000	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.700.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.950.000	
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.325.000	
7. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5.800.000	
8. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	-	
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	33.022.500	
10. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	230.035.500	
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	791.153.000	

Muara Sabak, November 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

CAMAT SADU,

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **AMIRUDDIN,S.Sos**
Jabatan : Camat Kecamatan Dendang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MuaraSabak, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM	**AMIRUDDIN, S.Sos**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Muara Dendang
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	490.598.650,00	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.800.000,00	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.000.000,00	
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.380.000,00	
7. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	7.301.500,00	
8. Program Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan,keagamaan dan Profesi	9.000.000,00	
9. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	34.049.350,00	
10. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	88.050.000,00	
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Rantau Indah	935.491.900,00	

MuaraSabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA,ST.MM

Pihak Pertama,

AMIRUDDIN, S.Sos

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : **SUWANDI, AMd.**

Jabatan : Camat Kecamatan Geragai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M.**

Jabatan : Pjs.Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M.	**SUWANDI, A.Md.**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Geragai
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	487.879.000,-	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.050.000,-	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,-	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,-	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000,-	
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.137.500,-	
7. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	22.600.000,-	
8. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Profesi	0,-	
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	29.175.000,-	
10. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	184.634.750,-	
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa	893.352.500,-	

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M.

Pihak Pertama,

SUWANDI,A.Md

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KUALA JAMBI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIQ KURNIAWAN,S.STP**
Jabatan : Camat Kecamatan Kuala Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

TAUFIQ KURNIAWAN,S.STP

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Kuala Jambi
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,73
	Nilai AKIP	62,86
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	567.333.975	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.630.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.100.000	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.875.000	
7. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	3.250.000	
8. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	0	
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	31.375.000	
10. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	41.885.000	
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.866.735.000	

Muara Sabak, 2020

Pjs.BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

CAMAT
KECAMATAN KUALA JAMBI,

TAUFIQ KURNIAWAN,S.STP

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HENDRI, SE**
Jabatan : CAMAT MENDAHARA ULU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM**
Jabatan : Pjs.Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM

Pihak Pertama,

HENDRI, SE

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Mendahara Ulu
Tahun Anggaran Perubahan : 2020

SASARAN 1		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilits Kinerja dan Keuangan		
Indikator Kinerja	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80
Nilal AKIP		65
Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai

SASARAN 2		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	**REALISASI 2019**	**TARGET 2020**
Persentase Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Kepala daerah kepada Camat		90,00%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	478.690.130	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.300.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000	
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.000.000	
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	11.195.600	
7. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi	1.5.000.000	
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	42.400.000	
9. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	222.200.000	
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	755.921.300	

Muara Sabak, Nopember 2020

Pjs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

CAMAT MENDAHARA ULU

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA CAMAT MENDAHARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AMRI JUHARDY, S.IP**
Jabatan : Camat Kecamatan Mendahara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM**
Jabatan : Pjs. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

AMRI JUHARDY, S.IP
Pembina / IV.a
NIP. 197306131993031002

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Mendahara
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai AKIP	65
	Laporan Keuangan Berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten	Sesuai

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	522.549.300	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.800.000	
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.500.000	
5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	10.000.000	
6. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan profesi	10.250.000	
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	32.880.000	
8. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	70.685.700	
9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	813.144.000	

MuaraSabak, Nopember 2020

Pihak Kedua,

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pihak Pertama,

AMRI JUHARDY, S.IP
Pembina / IV.a
NIP. 197306131993031002